

Pertumbuhan Inggris Capai Level Tertinggi dalam 8 Bulan

Jumat, 23 Oktober 2026 19:00 WIB

Tom Rees

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125598/pertumbuhan-inggris-capai-level-tertinggi-dalam-8-bulan/2>

Bloomberg, Sektor swasta Inggris tumbuh dengan laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, dan tren penurunan lapangan kerja yang berlangsung selama dua tahun pun berakhir, menurut survei yang menjadi sorotan luas. Sebuah situasi yang menunjukkan bahwa perekonomian terus bertahan di tengah guncangan energi akibat perang di Iran.

Dalam gambaran akhir menjelang pengumuman anggaran minggu depan, indeks PMI S&P Global melonjak menjadi 53,1 pada Oktober, naik dari 52 sebelumnya. Angka ini jauh lebih baik daripada penurunan ke 51,7 yang diperkirakan para ekonom, dengan angka tersebut tetap berada di atas ambang batas 50 yang memisahkan pertumbuhan dan kontraksi.

Indeks ketenagakerjaan PMI tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sedikit menambah jumlah tenaga kerja untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun. Pesanan baru meningkat pada laju tercepat sejak 2024, dengan perusahaan-perusahaan menyebut peningkatan penjualan berkat investasi dalam kecerdasan buatan.

Survei tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Inggris terus membantah prediksi para ekonom terkait perlambatan, meskipun rumah tangga dan perusahaan terguncang oleh lonjakan harga energi. Para peramal ekonomi sebelumnya memperkirakan kuartal terakhir tahun 2026 akan lebih lemah setelah pertumbuhan yang secara mengejutkan kuat hingga saat ini.

Namun, S&P menyatakan bahwa baik sektor jasa maupun manufaktur mengalami percepatan pertumbuhan bulan ini meskipun harga minyak melonjak di atas US\$110 per barel.

Sinyal menggembirakan dari ketahanan ekonomi ini ditegaskan oleh perusahaan-perusahaan yang merekrut pekerja tambahan untuk pertama kalinya sejak perekrutan terhambat oleh anggaran musim gugur 2024,” kata Chris Williamson, chief business economist S&P Global Market Intelligence. Ia mengatakan bahwa data Oktober yang kuat tercatat meskipun perusahaan-perusahaan menunda pengeluaran akibat ketidakpastian menjelang pengumuman anggaran pada 28 Oktober.

Williamson menambahkan bahwa “gambaran ekonomi yang menjanjikan dari PMI terbaru seharusnya memberikan landasan yang menggembirakan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat selama bulan-bulan musim dingin, kecuali ada kejutan yang tidak diinginkan” dalam pengumuman anggaran tersebut.

Ekonomi yang tangguh akan memperkuat alasan bagi Bank of England untuk menaikkan suku bunga bulan depan guna memerangi inflasi. Survei S&P menunjukkan tekanan harga tetap tinggi dengan biaya input naik pada laju tercepat sejak Juni.

Di Luar Perkiraan, Inflasi Inti Singapura Melambat pada September

Jumat, 23 Oktober 2026 14:30 WIB

Claire Jiao

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125553/di-luar-perkiraan-inflasi-inti-singapura-melambat-pada-september/2>

Bloomberg, Inflasi inti Singapura melambat di luar perkiraan pada September. Perekonomian yang bergantung pada impor itu relatif mampu bertahan di tengah kembali melonjaknya harga minyak global. Kondisi ini memperkuat keputusan bank sentral pekan lalu untuk mempertahankan kebijakan moneternya.

Inflasi inti, yang tidak mencakup biaya perumahan dan transportasi pribadi, tercatat sebesar 2% secara tahunan pada September, menurut Departemen Statistik Singapura pada Jumat (23/10). Angka tersebut turun dari 2,2% pada bulan sebelumnya dan jauh di bawah perkiraan median sebesar 2,3% dalam survei Bloomberg.

Inflasi umum (all-items inflation) juga tercatat sebesar 2,2%, lebih rendah dibandingkan perkiraan analis sebesar 2,4%.

Inflasi sektor transportasi melambat menjadi 7,4% pada September, dari 8,1% pada Agustus. Sementara itu, inflasi pangan dan perumahan hanya naik tipis, masing-masing menjadi 2,4% dan 1,4%.

Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS), selaku bank sentral, pekan lalu mempersempit proyeksi inflasi inti tahun ini menjadi 1,5%-2%, dari proyeksi sebelumnya yang memperkirakan inflasi dapat mencapai 2,5%. MAS juga memperkirakan inflasi umum berada di kisaran 2%.

Dalam keputusan kebijakan moneternya, MAS turut mengisyaratkan bahwa kedua indikator inflasi tersebut berpotensi tetap sedikit tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini seiring kembali naiknya harga energi global dan meningkatnya biaya pangan akibat cuaca buruk.

Meski demikian, bank sentral secara tak terduga memutuskan untuk tidak memperketat kebijakan moneter. MAS menyatakan, langkah-langkah yang telah diambil pada awal tahun ini cukup untuk “meredam potensi kenaikan inflasi impor dalam waktu dekat”.

Menurut bank sentral, inflasi inti dan inflasi umum diperkirakan rata-rata berada di kisaran 1,5%-2,5% tahun depan, seiring meredanya tekanan biaya impor serta gangguan pasokan energi dan pangan. Tekanan harga domestik juga diperkirakan tetap terkendali, antara lain berkat subsidi pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Inflasi Jepang Melonjak, BOJ Diproyeksi Naikkan Bunga Desember

Jumat, 23 Oktober 2026 08:50 WIB

Toru Fujioka

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125496/inflasi-jepang-melonjak-boj-diproyeksi-naikkan-bunga-desember/2>

Bloomberg, Indikator utama inflasi Jepang kembali melampaui target Bank of Japan (BOJ) untuk pertama kalinya tahun ini. Kondisi tersebut memperkuat alasan bagi bank sentral untuk menaikkan suku bunga pada Desember, sebagaimana diperkirakan secara luas.

Indeks harga konsumen (IHK) di luar bahan pangan segar naik 2,1 persen pada September dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada Jumat (23/10). Angka tersebut sesuai dengan estimasi median para ekonom.

Indeks yang tidak mencakup bahan pangan segar maupun energi, yang dipantau ketat BOJ sebagai indikator inflasi mendasar, naik 2,4 persen. Sementara itu, IHK secara keseluruhan meningkat 2,1 persen.

Kenaikan harga terutama didorong oleh biaya hotel, air, dan pangan. Di sisi lain, pemotongan pajak bensin terus membantu meringankan beban biaya energi bagi konsumen.

Hasil tersebut memperkuat alasan bagi BOJ untuk kembali menaikkan suku bunga setelah bank sentral itu meningkatkan biaya pinjaman pada September, untuk kedua kalinya dalam tiga bulan. Data IHK juga menyoroti tekanan inflasi yang ditimbulkan konflik di Timur Tengah terhadap Jepang, yang sangat bergantung pada impor energi dan pangan.

Harga jasa—salah satu indikator utama untuk mengukur keberlanjutan inflasi—naik 1,5 persen dibandingkan setahun sebelumnya, mencatat laju tercepat sejak Maret. Kenaikan harga pangan di luar bahan pangan segar meningkat menjadi 2,9 persen, meskipun harga beras turun 20,6 persen, penurunan terdalam dalam catatan data sejak 1971. Setahun lalu, beras menjadi salah satu pendorong utama inflasi secara keseluruhan.

Tekanan inflasi juga meningkat karena pelaku usaha kini tidak terlalu enggan meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen. Menurut Teikoku Databank, sejumlah perusahaan besar makanan dan minuman Jepang berencana menaikkan harga 3.153 produk pada bulan ini. Jumlah tersebut melampaui 3.000 produk selama dua bulan berturut-turut, untuk pertama kalinya sejak Juli 2023.

Central Japan Railway Company dan Fast Retailing, perusahaan induk Uniqlo, termasuk di antara banyak perusahaan yang mengumumkan kenaikan harga pada bulan ini.

Sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Bloomberg bahwa BOJ kemungkinan akan mengindikasikan inflasi mendasar telah mencapai target 2 persen untuk pertama kalinya sejak sasaran tersebut ditetapkan pada 2013. Indikasi itu diperkirakan disampaikan dalam rapat kebijakan pada 30 Oktober.

Namun, sebagian besar perkiraan menunjukkan kenaikan suku bunga BOJ berikutnya baru akan dilakukan pada akhir tahun. Lebih dari 80 persen ekonom memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga acuannya pada Desember, sementara tidak ada satu pun yang memperkirakan kenaikan pada pekan depan, menurut survei Bloomberg.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi telah mengambil berbagai langkah untuk meringankan tekanan biaya hidup yang dihadapi rumah tangga. Awal bulan ini, kabinetnya menyetujui rancangan

undang-undang untuk memangkas sementara pajak penjualan atas bahan pangan selama dua tahun, mulai April.

Bank Sentral Rusia Tahan Suku Bunga 14%, Proyeksi Inflasi 2026 Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 19:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-rusia-tahan-suku-bunga-14-proyeksi-inflasi-2026-naik>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral Rusia mempertahankan suku bunga acuan di level 14% pada Jumat (23/10/2026), di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang nyaris stagnan.

Bank sentral juga menaikkan proyeksi inflasi 2026, menandakan kebijakan moneter ketat kemungkinan berlanjut hingga tahun depan.

Mengutip Reuters, Bank Sentral Rusia menaikkan perkiraan inflasi tahun ini menjadi 7,1%–7,6%, dari proyeksi sebelumnya sebesar 6%–7%. Meski demikian, bank sentral masih menargetkan inflasi kembali ke level 4% pada 2027.

Keputusan mempertahankan suku bunga tersebut sesuai dengan perkiraan 20 analis yang disurvei Reuters.

Dalam pernyataannya, bank sentral menyebut tekanan harga masih tinggi, sementara ekspektasi inflasi belum menunjukkan penurunan yang memadai.

Data terbaru menunjukkan indeks harga konsumen Rusia meningkat 6,2% sejak awal 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan 4,8% pada periode yang sama tahun lalu.

Salah satu sumber tekanan inflasi berasal dari kenaikan harga bahan bakar setelah serangan drone Ukraina mengganggu operasional sejumlah kilang minyak Rusia. Sejak awal tahun, harga bensin melonjak 21%, sedangkan harga solar naik 13,4%.

Gangguan produksi tersebut bahkan memicu antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Rusia.

Dunia Bank sentral menilai penurunan sementara kapasitas produksi di beberapa sektor turut mendorong kenaikan harga.

“Tekanan harga yang mendasari belum menurun dan masih berada pada kisaran 5%–6% secara tahunan,” kata bank sentral Rusia dalam pernyataannya.

Selain gangguan pasokan energi, kenaikan tarif utilitas juga menambah tekanan terhadap inflasi.

Tagihan utilitas rata-rata meningkat 13,4% sejak 1 Oktober, atau 3,5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan pedoman pemerintah pusat.

Suku bunga tinggi tekan pertumbuhan ekonomi

Tekanan inflasi membuat ruang pelanggaran kebijakan moneter Rusia tetap terbatas. Bank sentral memperkirakan suku bunga rata-rata pada 2027 berada di kisaran 12,5%–13,5%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 10,5%–12,5%.

Proyeksi tersebut mengindikasikan Rusia berpotensi menjalani satu tahun lagi dengan suku bunga acuan di atas 12%. Tingkat bunga yang tinggi dinilai pelaku usaha sebagai salah satu hambatan utama bagi pemulihan investasi.

Di sisi lain, kebijakan moneter ketat juga membebani pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan biaya pembayaran utang pemerintah. Ekonomi Rusia diperkirakan hanya tumbuh 0,6% pada 2026.

Tekanan fiskal turut membatasi ruang kebijakan pemerintah. Defisit anggaran negara diproyeksikan mencapai 3,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026, dua kali lipat dari target sebelumnya sebesar 1,6% PDB.

Belanja pemerintah diperkirakan meningkat 13% tahun ini, terutama didorong kenaikan pengeluaran militer. Untuk menutup defisit yang membesar, pemerintah perlu meningkatkan pembiayaan di tengah tingginya biaya pinjaman.

Analisis T-Investment Sofya Donets mengatakan, perubahan prospek ekonomi dan kebijakan tersebut turut menekan pasar keuangan Rusia.

Ia mencatat penurunan indeks saham dan pasar obligasi pemerintah setelah proyeksi terbaru diumumkan.

Bank sentral Rusia masih memiliki satu jadwal rapat penetapan suku bunga pada tahun ini, yakni 18 Desember 2026.

Sejumlah analis menilai proyeksi suku bunga terbaru masih menyisakan ruang bagi pemangkasan sebesar 25 basis poin pada pertemuan tersebut.

Namun, prospek pelonggaran tetap bergantung pada perkembangan inflasi, gangguan produksi, serta tekanan fiskal yang membayangi perekonomian Rusia.

Mata Uang Asia Bergerak Bervariasi Jumat (23/10), Rupiah Masih Tertekan Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 09:43 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-bergerak-bervariasi-jumat-2310-rupiah-masih-tertekan-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Won Korea Selatan dan peso Filipina menjadi mata uang dengan penguatan harian terbesar di antara sejumlah mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (23/10/2026).

Di sisi lain, rupiah melemah di tengah pergerakan mata uang regional yang bervariasi.

Mengutip data Reuters pada Jumat pukul 02.17 GMT, won Korea Selatan menguat 0,16% ke level 1.323,10 per dolar AS. Peso Filipina menyusul dengan kenaikan 0,11% menjadi 63,36 per dolar AS.

Yuan China juga menguat 0,03% ke level 6,673 per dolar AS. Sementara itu, dolar Singapura melemah 0,02% menjadi 1,277 per dolar AS dan dolar Taiwan turun 0,06% ke level 32,508 per dolar AS.

Di kawasan Asia Tenggara, baht Thailand bergerak stabil di level 33,73 per dolar AS. Ringgit Malaysia melemah 0,10% menjadi 4,085 per dolar AS.

Adapun rupiah melemah 0,08% ke level Rp 18.060 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp 18.045 per dolar AS. Rupee India juga relatif stabil di level 94,818 per dolar AS.

Rupiah melemah 7,70% sepanjang 2026

Secara kumulatif sejak akhir 2025, rupiah mencatat pelemahan 7,70% terhadap dolar AS. Posisi rupiah bergerak dari Rp 16.670 per dolar AS pada akhir 2025 menjadi Rp 18.060 per dolar AS berdasarkan data Reuters tersebut.

Pelemahan rupiah secara tahun berjalan lebih besar dibandingkan ringgit Malaysia yang turun 0,71%, rupee India yang melemah 5,22%, serta baht Thailand yang terkoreksi 6,76%.

Peso Filipina juga melemah 7,20% sejak akhir 2025, sedangkan dolar Taiwan turun 3,29%. Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 8,87% dan yuan China naik 4,72% terhadap dolar AS sepanjang periode yang sama.

Dolar Singapura menguat 0,63% secara tahun berjalan, sementara yen Jepang melemah tipis 0,12%.

Pergerakan tersebut menunjukkan kinerja mata uang Asia yang beragam sepanjang 2026, dengan rupiah termasuk mata uang yang mengalami pelemahan cukup besar terhadap dolar AS.

Yen Jepang Menguat ke Level Tertinggi Sebulan, Kekhawatiran AI Tekan Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 09:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-jepang-menguat-ke-level-tertinggi-sebulan-kekhawatiran-ai-tekan-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang menguat ke level terkuat dalam lebih dari sebulan pada perdagangan Jumat (23/10/2026).

Penguatan ini didorong meningkatnya minat investor terhadap aset aman di tengah kekhawatiran atas besarnya belanja kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan keberlanjutan investasi di sektor teknologi.

Mengutip Reuters, yen menguat 0,3% menjadi 156,28 per dolar AS. Mata uang Jepang tersebut berpotensi mencatat kenaikan mingguan sekitar 1%, yang akan menjadi penguatan mingguan terbesar sejak awal September.

Di sisi lain, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeraanjang mata uang utama berada di level 101,52. Indeks tersebut sebelumnya sempat menyentuh 101,44 pada Kamis (22/10/2026), level terendah sejak awal bulan ini.

Kekhawatiran terhadap prospek investasi AI turut mendorong investor beralih ke obligasi pemerintah AS. Imbal hasil atau yield US Treasury tenor 10 tahun bertahan di sekitar 4,953%, mendekati level terendah dalam sebulan setelah turun tajam pada perdagangan sebelumnya seiring aksi jual saham.

Analisis ING menilai, pergerakan yield selanjutnya masih akan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk inflasi, defisit fiskal AS, dan perkembangan investasi AI. Mereka memperkirakan yield Treasury tenor 10 tahun pada akhirnya berpeluang kembali menembus 5%.

Meningkatnya sentimen penghindaran risiko atau risk-off juga mengurangi tekanan bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga pada pekan depan.

Meski demikian, analis ING belum menyarankan investor untuk menambah eksposur besar pada obligasi berdurasi panjang.

Di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, harga minyak justru bertahan tinggi. Kontrak berjangka Brent sempat menembus US\$ 114 per barel, memperpanjang kenaikan sekitar 4% pada perdagangan sebelumnya.

Serangan kelompok Houthi di Arab Saudi memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dari kawasan tersebut.

Pergerakan mata uang dipengaruhi jenis risiko

Analisis OCBC menilai, mata uang yang diuntungkan dari permintaan aset aman berbeda-beda, bergantung pada sumber risiko yang dihadapi pasar.

Kekhawatiran terhadap investasi AI cenderung mendukung yen Jepang. Sementara itu, kenaikan harga minyak akibat ketegangan di Timur Tengah berpotensi menopang dolar Kanada dan krone Norwegia sebagai mata uang negara produsen energi. Adapun tekanan fiskal Prancis dinilai menguntungkan franc Swiss.

Bagi dolar AS, risiko dari perkembangan AI semakin kompleks karena dapat memengaruhi berbagai aspek perekonomian, mulai dari pertumbuhan hingga ekspektasi kebijakan moneter.

Perhatian pasar terhadap yen juga meningkat menjelang rapat kebijakan Bank of Japan (BOJ) pekan depan.

Data pada Jumat menunjukkan inflasi inti konsumen Jepang secara tahunan melampaui target 2% bank sentral pada September, untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan.

Kondisi ini mengindikasikan tekanan harga yang semakin meluas dan memperkuat alasan untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan BOJ akan mempertahankan suku bunga pada rapat pekan depan, sebelum menaikkannya sebesar 25 basis poin pada rapat berikutnya di Desember.

Di pasar valuta asing lainnya, dolar Kanada menguat 0,1% ke sekitar C\$ 1,40 per dolar AS, mendekati level terkuatnya dalam sebulan. Franc Swiss stabil di 0,8199 per dolar AS, dekat level terkuatnya dalam sebulan.

Yuan offshore China bergerak tipis di 6,6715 per dolar AS, mendekati level terkuat dalam lebih dari empat tahun. Euro relatif stabil di US\$ 1,122.

Euro masih menghadapi tekanan dari kekhawatiran mengenai kemampuan Prancis mengatasi beban utangnya yang besar.

Kondisi tersebut menekan obligasi pemerintah Prancis dan memicu kekhawatiran terhadap negara-negara lain di kawasan euro dengan tingkat utang tinggi. Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuannya di level 2,5% pada pekan depan.

Sementara itu, dolar Australia bertahan di US\$ 0,7016, sedangkan dolar Selandia Baru menguat 0,1% menjadi US\$ 0,5687.

BI Beber Alasan Pangkas GWM, tapi Kerek Bunga Fasilitas Simpanan

Jumat, 23 Oktober 2026 17:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125583/bi-beber-alasan-pangkas-gwm-tapi-kerek-bunga-fasilitas-simpanan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) membeberkan alasan dari keputusannya untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), namun di saat yang sama juga menaikkan Suku Bunga Fasilitas Simpanan (Deposit Facility).

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Firman Mochtar menyebut bahwa hal tersebut merupakan salah satu langkah BI untuk mengharmonisasikan antara kebijakan BI dan kondisi operasional di pasar keuangan.

“Yang kemudian akan berdampak kepada sasaran akhir kita [yakni] inflasi, Melalui pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita lakukan,” kata Firman dalam taklimat BI, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, kombinasi penurunan GWM dan kenaikan suku bunga Deposit Facility merupakan bagian dari upaya BI untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter.

Dengan suku bunga yang lebih simetris dan likuiditas yang lebih seimbang, BI berharap sinyal BI Rate dapat diteruskan secara efektif ke pasar uang antarbank, sektor perbankan, aktivitas ekonomi, hingga inflasi.

“Harapannya nanti, semua transmisi dari BI Rate akan tertransmisi ke pasar uang antarbank. Dan setelah pasar uang antarbank yang bergerak simetris di dalam koridor tadi, 75 di atas BI Rate, 75 di bawah BI Rate, itu nanti akan tertransmisi dia ke kegiatan ekonomi di perbankan, kegiatan ekonomi di pertumbuhan ekonomi, dan ke inflasi,” kata Firman.

Dia menegaskan, penyesuaian kedua instrumen tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter ke depan, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

“Adalah bagian dari upaya kita untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kita lakukan sekarang karena kita harus perkuat buffer untuk ke depannya, agar kebijakan kita menjadi lebih efisien dan harapannya menjadi efektif buat ke depan,” ujarnya.

Alasan Penurunan GWM dan Deposit Facility

Menurut Firman, penurunan GWM dilakukan untuk menyeimbangkan likuiditas di pasar uang dan perbankan di tengah pengaruh suku bunga BI, prospek terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi

Pasalnya, pertumbuhan kredit perbankan dinilai cukup tinggi, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) belum seimbang dengan laju penyaluran kredit. Selain itu, Firman menyinggung mengenai penempatan dana pemerintah di perbankan yang juga turut memengaruhi kondisi likuiditas.

“Kita coba kalibrasi sedemikian rupa sehingga, Kita turunkan, GWM-nya. GWM-nya, 9 kan awalnya, Dia menjadi, 7 sekarang,” kata Firman.

Firman menjelaskan, salah satu komponen penyesuaian tersebut dilakukan dengan menurunkan GWM sebesar 1%, yang menurut perhitungannya dapat menambah likuiditas perbankan sekitar Rp90 triliun.

Sementara itu, komponen lainnya berkaitan dengan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Firman menjelaskan bahwa dana dalam komponen tersebut sudah berada di perbankan, tetapi penyesuaiannya diharapkan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi bank untuk memanfaatkan likuiditas yang tersedia.

Sementara itu, Firman bilang Deposit Facility merupakan bagian dari fasilitas simpanan (standing facility) BI yang menjadi batas bawah koridor suku bunga pasar uang antarbank (PUAB). Suku bunga tersebut menjadi salah satu instrumen BI untuk mengarahkan pergerakan suku bunga pasar uang agar sejalan dengan BI Rate.

“DF ini adalah bagian dari bagaimana Bank Indonesia ingin mengarahkan suku bunga PUAB. Suku bunga PUAB itu adalah sasaran operasionalnya Bank Indonesia,” kata Firman.

Dia menjelaskan, sebelum penyesuaian, BI Rate berada di level 5,75%, sedangkan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 6,5% atau 75 basis poin di atas BI Rate. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility sebelumnya sebesar 4,75%, atau 100 basis poin di bawah BI Rate.

Melalui kenaikan sebesar 25 basis poin menjadi 5%, BI berupaya membuat koridor suku bunga lebih simetris, yakni masing-masing berjarak 75 basis poin dari BI Rate.

“Sekarang kita naikkan dia 25 menjadi 75. Mengapa ini kita lakukan? Kita ingin agar sinyal dari BI Rate itu akan bergerak simetris di dalam koridor yang 75 tadi. Bersamaan dengan kita menyeimbangkan likuiditasnya,” ujar Firman.

Menurutnya, penyesuaian tersebut diharapkan membuat pergerakan suku bunga pasar uang antarbank lebih sejalan dengan BI Rate, sehingga transmisi kebijakan moneter dapat berlangsung lebih efektif ke sektor perbankan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Bank Indonesia (BI) menambah likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Caranya dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank konvensional dan bank syariah secara bertahap.

Bagi bank konvensional, GWM akan turunkan dari 9% menjadi 7% secara bertahap. Penurunan dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026. kemudian turun lagi menjadi 1% menjadi 7% mulai 1 Desember 2026.

Bagi bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%. Penurunan dari 7,5% menjadi 6,5% dilakukan mulai 1 November 2026. Penurunan 1% menjadi 5,5% dilakukan pada 1 Desember 2026.

Penurunan GWM juga diikuti dengan penurunan besar kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang turun dari 6% menjadi 5% berlaku mulai 1 Desember 2026.

Tertekan Nilai Tukar, BI Ramal Laju Inflasi 2026 Tak Lampau 3,5%

Jumat, 23 Oktober 2026 16:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125567/tertekan-nilai-tukar-bi-ramal-laju-inflasi-2026-tak-lampau-3-5/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa laju inflasi hingga akhir tahun akan berada di bawah 3,5%, sesuai dengan target pemerintah yang mematok laju inflasi di level 2,5% plus minus 1.

“Hitungan kita, inflasinya ke depan itu masih akan berada di dalam koridor. Masih di bawah 3,5,” kata Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Firman Mochtar dalam taklimat BI, Jumat (23/10/2026).

Firman menyebut target tersebut bisa dicapai meski saat ini Indonesia masih memiliki berbagai tantangan, termasuk nilai tukar yang masih volatile bahkan terus mencatatkan pelemahan.

“Masih di dalam target. Meskipun ada tekanan nilai tukar yang juga kita proyeksikan ke depan,” katanya.

Menurut Firman, saat ini nilai tukar menghadapi sejumlah tantangan baik secara global dengan gejolak geopolitik yang masih terjadi dan secara domestik usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mau tak mau membuat dana asing keluar.

“Jadi aliran modal keluar, tekanan global dan tekanan domestik. Yang secara umum memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” katanya.

Japun mengakui bahwa saat ini inflasi dan stabilitas nilai tukar menjadi salah satu mandat yang harus direspons Bank Indonesia. Sementara pergerakan inflasi 1,5% hingga 3,5% akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu per September Indeks Harga Konsumen (IHK) per September mencapai 3,28% dengan inflasi inti 2,84%. Sementara inflasi volatile food menjadi pemberat dengan laju sebesar 5,03% dan inflasi administered price yang mencapai 3,25%.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tengah pekan ini, Gubernur BI, Destry Damanyanti menyebut bahwa BI akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan moneter menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1% dan memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah sejumlah cara.

Pertama dengan mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market.

Kedua, memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Penurunan GWM dimaksud melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diturunkan dari 6% menjadi 5% berlaku mulai 1 Desember 2026.

Rupiah Pangkas Pelemahan, Tutup Perdagangan di Rp18.057/US\$

Jumat, 23 Oktober 2026 15:45 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125586/rupiah-pangkas-pelemahan-tutup-perdagangan-di-rp18-057-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pekan ini dengan memangkas pelemahan hingga tinggal 0,04% ke Rp18.057/US\$, sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang masih tertekan kenaikan harga minyak mentah.

Harga Brent hari ini kembali tinggi, naik 0,7% jadi US\$113,98/barel. Kenaikan harga minyak terjadi akibat serangan terhadap Arab Saudi yang berpotensi memperparah risiko pasokan. Terlebih, pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengisyaratkan kemungkinan serangan baru terhadap Iran dalam waktu dekat.

Tekanan biaya energi itu membuat mata uang kawasan kembali tertekan. Sore ini, yen Jepang melemah 0,15% paling tajam di antara mata uang lainnya. Diikuti peso Filipina dan rupee India masing-masing 0,13%.

Sementara, dolar Singapura, Hong Kong, ringgit Malaysia dan rupiah melemah lebih terbatas. Sedangkan, dari zona hijau hanya yuan China berhasil menguat, itu pun sangat terbatas.

Sepanjang pekan ini, pergerakan mata uang Asia cukup beragam. Peso melemah paling tajam sebesar 0,99%, diikuti baht Thailand 0,67%, dolar Taiwan 0,52%, rupiah 0,25%, dan ringgit Malaysia 0,12%. Sementara, mata uang seperti yen Jepang justru unggul bersama won Korea Selatan dengan penguatan masing-masing 0,68% hingga 0,61%. Selanjutnya, yuan China juga berhasil menguat 0,24%.

Meredanya tekanan dari pasar uang Amerika Serikat (AS) dengan terpangkasnya yield US Treasury tenor 10 tahun ke bawah 5% kembali membuka ruang penguatan bagi mata uang kawasan.

Pekan depan, bank sentral AS kembali menggelar rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 27-28 Oktober. Berdasarkan Fedwatch, bank sentral AS diperkirakan menahan suku bunga acuan dalam pertemuan tersebut lantaran sejumlah data ekonomi masih mendukung langkah hawkish hold.

Namun, jika harga minyak mentah terus menanjak secara persisten dan menggiring inflasi naik, The Fed diperkirakan akan mengerek Fed Fund Rate (FFR), setidaknya 25 basis poin (bps).

Dari pasar obligasi negeri, aksi jual terjadi di sebagian tenor pendek, menengah hingga panjang dan memperberat langkah rupiah hari ini. Yield surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun kembali naik jadi 7,43%, diikuti kenaikan tenor pendek seperti 1 tahun yang kembali menyentuh 6,8%.

Di pasar offshore, langkah Bank Indonesia (BI) mengintervensi terlihat dari gerak rupiah Non-Deliverable Forward (NDF) yang tertahan di Rp18.111/US\$ pada 15:15 WIB. Pekan depan, pergerakan rupiah akan dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, pergerakan harga minyak mentah, serta sinyal kebijakan The Fed.

Apabila harga minyak kembali melonjak dan pasokan kembali terganggu, maka tekanan terhadap mata uang Asia, termasuk rupiah bisa berlanjut. Lonjakan harga minyak bisa menambah beban impor energi dan bisa memperbesar tantangan pemerintah yang saat ini menjaga harga bahan bakar minyak tidak naik, menggunakan skema subsidi.

Terlebih, baru-baru ini pemerintah sedang mengkaji opsi penambahan kuota Peralite. Jika konsumsi BBM Peralite yang mengandung subsidi itu meningkat, maka kebutuhan kompensasi ikut naik dan menekan fiskal dan menambah tekanan sentimen yang memperberat gerak rupiah.

Catatan Swasembada Pangan: Melimpah, tapi Harga Belum Terjangkau

Jumat, 23 Oktober 2026 15:40 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125564/catatan-swasembada-pangan-melimpah-tapi-harga-belum-terjangkau/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) menilai kebijakan pangan era Presiden Prabowo Subianto belum optimal dari sisi keterjangkauan Harga, meski produk pangan, khususnya beras cukup menguat.

Peneliti CORE Eliza Mardian mengatakan selama ini komoditas seperti beras, cabai, telur, daging ayam, jagung, dan bawang merah memang secara agregat tahunan hampir selalu surplus produksinya.

Namun secara bersamaan, masih ada persoalan yang belum benar-benar dibenahi, yang justru berada di hilir dan di sepanjang rantai pasok yang menyebabkan ketersediaan tidak merata: fluktuasi harga yang tajam, hingga disparitas harga antar daerah yang lebar.

"..serta asimetris informasi antara petani, pedagang, dan konsumen. Surplus agregat tidak otomatis menjadi ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah," ujar Eliza dalam catatannya, Jumat (23/10/2026).

Apabila dilihat dari indikator produksi nasional semata, kata dia, Indonesia sebenarnya sudah swasembada pada komoditas-komoditas tersebut. Namun lagi-lagi, kata dia, keterjangkauan harga di tingkat konsumen masih lemah.

Berdasarkan catatannya, dia mencontohkan salah satunya adalah harga beras medium nasional yang masih berada di kisaran Rp14.600–15.000/kilogram (kg), dengan kenaikan di lebih dari seratus kabupaten/kota.

"Surplus produksi secara agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit karena bottleneck distribusi antarpulau dan rantai pasok yang panjang," kata dia.

Dari sisi ekonomi politik pangan, menurutnya, kebijakan saat ini lebih kuat melindungi kepentingan hulu melalui HPP dan serapan negara. Namun, struktur industri penggilingan tetap sangat terkonsentrasi.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total serapan gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 unit penggilingan skala besar (kapasitas 20 ton per jam) menguasai 40 persen pasokan gabah atau sekitar 25 juta ton.

Jumlah tersebut setara dengan yang diserap oleh 161.401 unit penggilingan kecil, sementara penggilingan skala sedang menyerap sekitar 20%. Konsentrasi ini dinilai membuat pelaku besar memiliki daya tawar tinggi dalam memperebutkan bahan baku.

Persaingan Bulog dan Swasta

Eliza menilai ada persaingan antara Perum Bulog dan pihak swasta yang justru menjadi salah satu sumber tekana harga gabah.

Dia mencontohkan, ketika Bulog aktif menyerap dalam jumlah besar dengan HPP yang relatif tinggi, swasta besar ikut bersaing sehingga harga gabah di tingkat petani sering naik di atas HPP, terutama di luar musim panen.

"Kondisi ini menguntungkan petani di satu sisi, tetapi membuat biaya bahan baku penggilingan melonjak," tutur Eliza.

Hal ini mengakibatkan penggilingan kecil yang tidak memiliki modal besar atau jaringan pasokan yang kuat semakin sulit mendapatkan gabah dan banyak yang akhirnya hanya bisa beroperasi terbatas.

Berbeda dengan pelaku penggilingan besar yang memiliki kapasitas penyimpanan, modal, dan jaringan distribusi, sementara pelaku kecil tersingkir secara bertahap.

"Selama pangsa pasar Bulog masih terbatas (sekitar 15%) dan struktur industri penggilingan tetap terkonsentrasi, persaingan justru menaikkan harga gabah dan menekan penggilingan kecil, sementara harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi."

Hal ini menurutnya sekaligus menjadi refleksi dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran khusus sektor kebijakan ketahanan pangan.

Memasuki tahun ketiga, dia meminta pemerintah untuk menggeser prioritas kebijakan, yang lebih diarahkan ke sustainability, equality, dan resiliensi.

Fokus utamanya adalah penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, dan perbaikan asimetris informasi.

Kemudian, pengelolaan cadangan yang lebih sesuai kebutuhan daerah, serta upaya lebih sistematis untuk menyeimbangkan peran negara dan swasta agar penggilingan kecil tetap punya ruang dan harga konsumen tidak terus tertekan oleh persaingan bahan baku di hulu.

"Tanpa pembenahan pada ketersediaan, fluktuasi, dan disparitas harga, surplus produksi nasional akan tetap bersifat agregat dan tidak sepenuhnya dirasakan sebagai keterjangkauan oleh sebagian besar masyarakat," pungkasnya.

Uang Beredar Meningkat pada September 2026, Belum Cerminkan Penguatan Sektor Riil

Jumat, 23 Oktober 2026 19:41 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/uang-beredar-meningkat-pada-september-2026-belum-cerminkan-penguatan-sektor-riil>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2026 mencapai Rp 10.587,9 triliun. Pertumbuhan M2 tersebut mencapai 8,3% year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 8,2% YoY.

Direktur Riset (Research Director) di Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai, meski meningkat, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada September 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi riil.

Pasalnya, kenaikan M2 justru diikuti perlambatan pertumbuhan uang primer atau M0, yang mengindikasikan peran sektor riil belum menjadi pendorong utama ekspansi likuiditas. Uang Primer (M0) adjusted pada September 2026 tercatat sebesar Rp2. 353,1 triliun atau tumbuh 9,3% yoy, namun lebih rendah dari pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 16,3 % yoy.

Andri mengatakan, pertumbuhan M2 yang lebih tinggi pada dasarnya dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian. Namun, perkembangan tersebut perlu dicermati dengan melihat pergerakan M0 yang lebih erat kaitannya dengan uang primer dalam sistem perekonomian.

“Bisa jadi indikasi baik andai M0 juga naik lebih baik dari sebelumnya. Karena M0 ini yang benar-benar berputar di perekonomian riil,” ujar Andri kepada Kontan, Jumat (23/10/2026).

Di sisi lain, pertumbuhan M2 justru meningkat. Perbedaan arah pertumbuhan kedua indikator tersebut dinilai menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas belum tentu berasal dari aktivitas ekonomi sektor swasta secara langsung.

Andri melihat, salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong utama kenaikan M2 adalah peningkatan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Pada September 2026, komponen tersebut tumbuh 24,4% yoy, berbalik dari kontraksi sebesar 7% yoy pada Agustus 2026.

Perubahan signifikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan uang beredar. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah percepatan belanja pemerintah atau pencairan stimulus pada September 2026.

“Artinya, ini bisa disebabkan karena terjadi belanja pemerintah (pencairan anggaran/stimulus) yang masif di September,” jelasnya.

Ia menambahkan, belanja pemerintah yang disalurkan ke masyarakat dapat meningkatkan saldo rekening dan tabungan sehingga mendorong pertumbuhan M2. Dengan demikian, kenaikan uang beredar dalam periode tersebut diduga lebih banyak ditopang oleh ekspansi fiskal ketimbang aktivitas sektor riil swasta.

Andri juga menyoroti kondisi likuiditas perbankan yang perlu dicermati di tengah perlambatan pertumbuhan M0. Menurutnya, perbedaan perkembangan M2 dan M0 menunjukkan bahwa peningkatan uang beredar perlu dilihat lebih jauh berdasarkan sumber pertumbuhannya, bukan hanya dari besaran kenaikannya.

Antisipasi Inflasi Jelang Nataru, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan

Jumat, 23 Oktober 2026 14:30 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/antisipasi-inflasi-jelang-nataru-pemerintah-perkuat-rantai-pasok-pangan>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan. Pemerintah terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan. Upaya tersebut juga dilakukan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah risiko perubahan iklim.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membeberkan, upaya tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah.

“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ungkap Dradjad dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai. Inflasi pangan tercatat mencapai 5,03% dengan kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8%, cabai merah keriting sebesar 22%, dan cabai rawit sebesar 5,07%.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pasokan pangan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan, sekaligus mengatasi gangguan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga meskipun stok tersedia.

Untuk merespons tantangan tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan 5 arahan, yakni optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, memitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.

Lebih lanjut, upaya menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Program magang menjangkau 150 ribu peserta, sedangkan bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program tersebut menjadi penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Kemudian, penguatan rantai pasok menjadi semakin penting bagi Sulampua yang menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% (yoy), sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy).

Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan untuk menekan kehilangan hasil, mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal.

Guna mendukung potensi ekonomi kawasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.

Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, guna memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.

Melalui kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID, setiap kerja sama antardaerah diarahkan memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur. Penguatan konektivitas dan akses pasar diharapkan dapat menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Dengan demikian, ketahanan pangan Sulampua semakin kuat menghadapi risiko iklim dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” pungkas Dradjad.

Kredit Rakyat Jadi Rp 400 Triliun, Pembiayaan UMKM Ditarget Rp 2.000 Triliun di 2027

Jumat, 23 Oktober 2026 12:58 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/kredit-rakyat-jadi-rp-400-triliun-pembiayaan-umkm-ditargetkan-rp-200-triliun-di-2027>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memastikan kuota Kredit Rakyat akan ditambah hingga Rp 400 triliun di tahun depan. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 332 triliun.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan penambahan plafon kredit rakyat turut akan mengerek alokasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM.

Dengan tambahan ini menurutnya pembiayaan UMKM baik melalui KUR maupun non KUR secara nasional akan meningkat hingga Rp 1900 triliun hingga 2.000 triliun.

"Kemarin pembicaraannya (Kredit Rakyat) antara Rp 400 hingga Rp 500 triliun. Nah kalau sekarang total pembiayaan UMKM (KUR dan Non KUR) sekitar Rp 1.500 triliun, artinya 2027 kita targetkan Rp 1900 hingga Rp 2000 triliun," kata Maman di Kantornya, Jum'at (23/10/2026).

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penambahan plafon kredit rakyat sebesar Rp 400 triliun ini tidak akan menambah beban APBN.

Maman menjelaskan perluasan plafon kredit perbankan berbeda dengan anggaran pemerintah. Menurutnya, tambahan akses pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh sumber pendanaan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

"Ini enggak ada anggaran, ini plafon kredit. Jadi, ini plafon alokasi kredit perbankan, jadi enggak ada hubungannya dengan APBN," kata Maman.

Namun, Maman juga menjelaskan, apabila kuota KUR mengalami peningkatan, pemerintah perlu memperhitungkan penyesuaian subsidi bunga yang berpotensi memengaruhi kebutuhan anggaran negara. Namun, besaran penyesuaian tersebut masih menunggu keputusan mengenai kebijakan KUR tahun depan.

"Yang mungkin berpotensi ada APBN itu terkait KUR-nya. Nanti kalau plafonnya naik tentu akan ada penyesuaian subsidi bunga, berapa jumlahnya, tunggu tanggal mainnya," ujar Maman.

Meski begitu, pemerintah masih perlu membahas besaran kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2027. Maman menyebut, penentuan kuota KUR akan dibahas secara terpisah bersama komite pembiayaan UMKM sehingga belum ada angka final yang dapat disampaikan saat ini.

Ia memperkirakan pembahasan mengenai kuota KUR biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, sekitar November hingga Desember.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat hingga Rp 400 triliun pada 2027. Program ini diproyeksikan menjangkau sekitar 28 juta keluarga, dengan prioritas petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Prabowo bilang penyaluran kredit tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat bawah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud. Saya ingin menyalurkan 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan mereka yang berpenghasilan rendah," kata Prabowo dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menjelaskan, target pembiayaan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang, jumlah penerima manfaat program ini berpotensi mencapai sekitar 100 juta orang.

"Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga. Kalau dengan istri dan anak, itu berarti dikali empat. Kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang," ujar Prabowo.

Uang Beredar (M2) Naik Jadi Rp 10.587,9 Triliun per September 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 11:14 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/uang-beredar-m2-naik-jadi-rp-105879-triliun-per-september-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2026 mencapai Rp 10.587,9 triliun .

Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, pertumbuhan M2 tersebut mencapai 8,3% year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 8,2% YoY.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 9,0% YoY dan uang kuasi sebesar 7,3% YoY,” tutur Denny dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Adapun perkembangan M1 dengan pangsa 56,9% dari M2, pada September 2026 tercatat Rp 6.029,3 triliun atau tumbuh stabil sebesar 9,0% YoY dibandingkan pertumbuhan bulan Agustus 2026 . Perkembangan M1 dipengaruhi oleh giro rupiah sebesar 8,4 % YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 7,1% YoY.

Selanjutnya, uang kuasi dengan pangsa 42,5% dari M2 pada September 2026 tercatat tumbuh positif sebesar 7,3 % YoY menjadi Rp 4.498 ,8 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5% YoY.

Peningkatan tersebut didukung oleh giro valas dan simpanan berjangka yang masing -masing tumbuh positif sebesar 13,9% YoY dan 5,2% YoY, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,8% YoY dan 4,6% YoY.

Sementara itu, tabungan lainnya tumbuh melambat sebesar 12,1% YoY dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 13,9% YoY. Selain itu, surat berharga selain saham tumbuh melambat sebesar 19,0 % YoY, melanjutkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 26,5 % YoY.

Lebih lanjut, Denny membeberkan, perkembangan M2 pada September 2026 dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus), aktiva luar negeri bersih, dan penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 24,4% YoY, setelah mengalami kontraksi sebesar 7,0% YoY pada Agustus 2026.

Aktiva luar negeri bersih pada September 2026 tumbuh sebesar 1,0% YoY, setelah mengalami kontraksi pada Agustus 2026 sebesar 6,6% YoY. Demikian pula, penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,7% YoY, melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,3% YoY.

Warga Sambut Baik Gerakan Pangan Murah di Sragen

Jumat, 23 Oktober 2026

Penulis : Kufita/ Yuli_DiskominfoSragen, Editor : UI, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/warga-sambut-baik-gerakan-pangan-murah-di-sragen/>

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46, di Pendopo Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Rabu (21/10/2026). Dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, kegiatan tersebut merupakan bagian dari GPM serentak di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Linda Sigit mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Melalui gerakan pangan murah ini, kami ingin mendekatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau kepada masyarakat. Mangga, masyarakat bisa membeli sesuai kebutuhan. Semoga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan di lebih banyak tempat, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pangan murah,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP3 Kabupaten Sragen, Tugiono menjelaskan, kegiatan tersebut menyediakan beragam produk pangan dan olahan lokal dengan harga terjangkau, dengan melibatkan berbagai pihak. Peserta yang terlibat antara lain Bulog, Mitra Swalayan, SMK Negeri 1 Kedawung, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Asosiasi Bawang Merah Indonesia, serta pelaku UMKM.

Berbagai komoditas yang disediakan meliputi beras dari Gapoktan dan beras premium Bulog, 300 liter minyak goreng, 300 kilogram gula pasir, 300 kilogram telur ayam, serta masing-masing 100 kilogram bawang putih dan bawang merah. Selain itu, tersedia aneka buah, produk olahan perikanan, dan produk UMKM lokal.

“Seluruh produk pangan dan olahan UMKM telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Antusiasme warga juga sangat baik. Kami berterima kasih kepada semua pihak, yang telah mendukung terselenggaranya Gerakan Pangan Murah ini,” kata Tugiono.

Warga yang berbelanja, Sutarno, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Dia mengetahui informasi pasar murah, dan datang untuk membeli kebutuhan dengan harga yang dinilai lebih terjangkau dibandingkan pasar maupun toko lainnya.

“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kami berterima kasih kepada Pemkab Sragen yang telah mengadakan pasar murah,” ungkapnya.

Jateng optimistis capaian investasi 2026 tembus Rp110 triliun

Jumat, 23 Oktober 2026 22:35 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/650167/jateng-optimistis-capaian-investasi-2026-tembus-rp110-triliun>

Batang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan optimistis capaian investasi hingga akhir 2026 mampu menembus Rp110 triliun seiring dengan meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di daerah ini.

"Kita optimistis sebentar lagi ada perusahaan dari Vietnam akan masuk. Kita optimistis bahwa 2026 nanti bisa menyamai capaian tahun lalu yaitu Rp110 triliun," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat.

Berdasarkan data, investasi di Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 menembus sebesar Rp23 triliun dan terus meningkat selama triwulan II 2026 membukukan Rp59,94 triliun, serta selanjutnya di triwulan III 2026 sudah mencapai Rp72,54 triliun.

Ia mengatakan kinerja tersebut merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait dalam upaya menarik para investor asing dan dalam negeri untuk menanamkan investasi di Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan baik melalui forum bisnis dan investasi, kerja sama antar-daerah, maupun sister province dan sister city dengan negara sahabat.

"Forum-forum bisnis dan investasi seperti ini dapat mempertemukan dunia usaha, kawasan industri, serta pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Salah satu contoh, kami punya Central Java Investment Business Forum (CJIBF) yang sehari bisa menghasilkan investasi sampai Rp19 triliun," katanya.

Pencapaian investasi tersebut juga karena didukung oleh peran kepala daerah yang bertindak sebagai manajer marketing termasuk menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru di Jawa Tengah.

Saat ini kawasan industri eksisting di Jawa Tengah ada sekitar tujuh tempat seperti di Kota Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes, serta sekitar 12 kawasan baru yang sedang disiapkan di berbagai daerah untuk menumbuhkan perekonomian baru.

"Kawasan industri penting untuk pertumbuhan ekonomi baru. Di Jawa Tengah sekarang pertumbuhan ekonomi sudah 5,80 persen atau di atas rata-rata nasional," katanya.

Ia berharap Jawa Tengah terus menjadi tujuan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berkat kinerja investasi yang positif tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori Figur Akselerator Kamajuan untuk kategori Investasi dan Penguatan Program Strategis Nasional.

Bulog Banyumas menyalurkan 31.904,3 ton beras SPHP sepanjang 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 16:28 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650099/bulog-banyumas-menyalurkan-319043-ton-beras-sphp-sepanjang-2026>

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Jawa Tengah, telah menyalurkan 31.904,3 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2026 untuk menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat siang, mengatakan penyaluran beras SPHP merupakan salah satu upaya Bulog dalam mengendalikan harga beras di tingkat konsumen.

"Memang salah satu tugas Bulog itu stabilisasi harga beras di tingkat konsumen, dan itu salah satunya melalui beras SPHP," katanya pula.

Ia menyatakan realisasi penyaluran beras SPHP pada tahun anggaran 2026 telah melampaui target awal yang sebesar 13.448,7 ton dan terealisasi 17.369,735 ton.

Pada tahun anggaran 2026, kata dia lagi, Bulog Cabang Banyumas memperoleh tambahan target penyaluran sebanyak 1.605,645 ton dengan realisasi mencapai 1.899,97 ton.

"Penyaluran pada Januari-Februari 2026 masih menggunakan alokasi tahun anggaran 2025 dengan realisasi sebanyak 11.634,595 ton," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, dia menegaskan pengendalian harga beras dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pihaknya juga rutin memantau harga beras di pasar-pasar tradisional maupun pasar yang masuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta memasok beras SPHP ke pasar, toko pedagang, dan Rumah Pangan Kita (RPK).

Menurut dia, upaya stabilisasi tersebut juga dilakukan melalui operasi pasar dan kegiatan penjualan pangan di sejumlah kecamatan.

"Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk mengadakan kegiatan yang tidak hanya di pasar, juga di titik-titik desa agar langsung bersentuhan dengan konsumen," katanya.

Terkait peluncuran identitas baru beras SPHP menjadi Beras Kita Medium pada 20 Oktober 2026, dia mengharapkan pembaruan tersebut dapat meningkatkan daya tarik produk di tengah masyarakat.

Di samping itu, kata dia lagi, kemasan yang lebih menarik diharapkan membuat beras SPHP semakin mudah diterima konsumen, tanpa mengubah tujuan utama program untuk menyediakan beras berkualitas medium dengan harga terjangkau.

Ia menegaskan beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasaran.

Prawoko juga memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Cabang Banyumas dalam kondisi aman, dengan jumlah sekitar 61.000 ton yang siap mendukung berbagai penugasan, termasuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan pantauan, harga beras medium nonkemasan (curah) di Kabupaten Banyumas saat sekarang mencapai kisaran Rp15.000-Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras premium kemasan pabrikan yang dijual dengan harga Rp14.900/kg saat sekarang jarang ditemukan di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan kenaikan harga beras medium nonkemasan dipengaruhi minimnya pasokan dari petani.

“Sebagian petani saat sekarang enggan menjual stok gabah mereka karena digunakan untuk kebutuhan sendiri di masa paceklik, sehingga berdampak pada kenaikan harga beras medium nonkemasan,” katanya pula.

Inflasi Gerus Sentimen Konsumen AS ke Level Terendah 5 Bulan

Sabtu, 24 Oktober 2026 07:30 WIB

Maria Paula Mijares Torres dan Jeffrey Sparshott

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125610/inflasi-gerus-sentimen-konsumen-as-ke-level-terendah-5-bulan/2>

Bloomberg, Sentimen konsumen Amerika Serikat (AS) merosot ke level terendah dalam lima bulan terakhir pada bulan Oktober seiring tingginya harga barang dan tren kenaikan suku bunga.

Indeks sentimen final dari University of Michigan melandai ke angka 48 dari 48,1 pada bulan September, menurut hasil survei yang dirilis Jumat (23/10). Kendati demikian, angka tersebut membaik dari pembacaan awal dan berhasil melampaui semua perkiraan dalam survei para ekonom yang dihimpun Bloomberg.

Konsumen memperkirakan harga-harga akan melonjak 4,7% selama setahun ke depan, naik dari proyeksi 4,6% pada bulan sebelumnya. Mereka juga memproyeksikan biaya hidup akan merangkak naik dengan laju tahunan sebesar 3,5% selama lima hingga 10 tahun ke depan. Kedua proyeksi tersebut merupakan level tertinggi sejak Mei lalu.

"Setelah lima tahun mengalami inflasi di atas target, ekspektasi inflasi jangka pendek maupun jangka panjang kembali merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memunculkan risiko bahwa ekspektasi inflasi yang tinggi ini bisa menjadi lebih mengakar," jelas Joanne Hsu, Direktur Survei tersebut, dalam sebuah pernyataan.

Sentimen konsumen terus memburuk pada Oktober di tengah inflasi yang masih bertahan tinggi, perekrutan tenaga kerja yang lesu, serta tingginya suku bunga KPR. Harga bensin di SPBU yang masih bertahan jauh di atas US\$4 per galon kian memperparah rasa frustrasi masyarakat yang telah lama terbebani oleh tingginya biaya hidup.

Dalam beberapa bulan terakhir, lonjakan harga telah melampaui kenaikan upah, sehingga semakin menekan anggaran rumah tangga. Data yang dirilis pekan lalu menunjukkan bahwa harga konsumen pada bulan September melonjak dengan laju tercepat dalam lima bulan terakhir.

Isu-isu ekonomi seperti lonjakan biaya hidup tetap menjadi sorotan utama bagi warga Amerika di fase-fase akhir masa kampanye pemilu paruh waktu (midterm elections).

Prospek Pemilu

"Konsumen dari berbagai latar belakang pandangan politik sepakat bahwa inflasi secara meyakinkan merupakan risiko yang jauh lebih besar bagi perekonomian pada tahun mendatang ketimbang masalah pengangguran," tambah Hsu.

Sentimen di kalangan pendukung Partai Demokrat dan Republik sedikit membaik pada Oktober, sementara sentimen di kalangan pemilih independen justru merosot selama tiga bulan berturut-turut.

Indikator kondisi pembelian barang tahan lama (durable goods) anjlok ke rekor terendah pada Oktober. Laporan tersebut menyoroti tingginya suku bunga dan meningkatnya kekhawatiran terkait daya beli sebagai pemicu utamanya. Hampir 70% konsumen memperkirakan suku bunga akan kembali naik pada tahun mendatang, yang merupakan angka tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Indikator kondisi ekonomi saat ini terperosok ke level terendah kedua sepanjang sejarah pencatatan, sementara indeks ekspektasi konsumen justru membaik untuk pertama kalinya sejak Juli.

Adapun periode survei ini mencakup tanggapan yang dikumpulkan sejak 22 September hingga 19 Oktober.

Saat Kepentingan Ekonomi Uni Eropa Berhadapan dengan Isu HAM Vietnam

Sabtu, 24 Oktober 2026 19:01 WIB

Deutsche Welle (DW)

Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri, Editor: Rizki Nugraha

<https://news.detik.com/dw/d-8722437/saat-kepentingan-ekonomi-uni-eropa-berhadapan-dengan-isu-ham-vietnam>

Brussels - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden Vietnam, To Lam, tiba di Brussel pada Rabu (21/10), untuk melakukan kunjungan resmi ke Uni Eropa dan Belgia. Kunjungan ini berlangsung beberapa hari setelah Vietnam menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA), yang beranggotakan Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein.

Hubungan dagang Vietnam dan UE semakin erat sejak Perjanjian Perdagangan Bebas UE–Vietnam (EU-Vietnam Free Trade Agreement/EVFTA) mulai berlaku pada Agustus 2020.

Di tengah perang tarif global, kerja sama ini menjadi contoh pentingnya keterbukaan pasar, kata Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada DW.

Menurutnya, Vietnam menawarkan basis manufaktur dan akses ke rantai pasok Asia bagi Eropa. Sebaliknya, Eropa menyediakan modal, teknologi, dan pasar yang membantu Vietnam mengurangi ketergantungan pada permintaan AS dan bahan baku industri dari Cina.

Hubungan strategis Vietnam dan Uni Eropa kian erat

Vietnam kini menjadi mitra dagang terbesar UE di Asia Tenggara untuk perdagangan barang dan terbesar ke-14 secara global. Sementara itu, UE merupakan mitra dagang terbesar keempat Vietnam sekaligus salah satu sumber utama investasi asing.

Pada Januari, kedua pihak meningkatkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, yang pertama antara UE dan negara Asia Tenggara.

Vietnam juga menjadi mitra strategis penting bagi UE di kawasan Indo-Pasifik, kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina.

Kerja sama tersebut mendukung upaya UE memperkuat keamanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Cina, terutama melalui diversifikasi rantai pasok.

Sejumlah negara anggota UE telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Vietnam. Pada Rabu (21/10), Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung untuk membahas peningkatan kerja sama keamanan, termasuk di Laut Cina Selatan, tempat Vietnam dan Cina bersengketa wilayah.

Kerja sama ekonomi di tengah persoalan HAM

Di balik hubungan yang semakin erat, catatan HAM Vietnam tetap menjadi persoalan. Kelompok-kelompok HAM menilai pemerintah semakin represif di bawah kepemimpinan To Lam, yang sebelumnya mengepalai kementerian keamanan publik.

Vietnam masih menerapkan sistem satu partai dan membatasi oposisi politik, jurnalisme independen, serta aktivitas masyarakat sipil.

Dalam surat terbuka kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, 12 organisasi HAM internasional menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya tindakan represif pemerintah Vietnam. Mereka mendesak para pemimpin UE menuntut reformasi nyata.

Saat merundingkan EVFTA, Vietnam telah berkomitmen memperbaiki perlindungan HAM, hak pekerja, dan standar lingkungan. Hanoi juga berjanji mereformasi aturan ketenagakerjaan agar pekerja dapat membentuk organisasi independen serta menyelaraskan peraturan nasional dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Namun, kelompok HAM menilai komitmen tersebut belum dipenuhi. Vietnam belum meratifikasi konvensi ILO tentang kebebasan berserikat, sementara serikat pekerja independen masih dilarang.

"Uni Eropa tidak mengambil tindakan atas pelanggaran berulang Vietnam terhadap kewajiban dan komitmennya dalam EVFTA. Sebaliknya, pada Januari, UE justru meningkatkan status hubungan bilateral kedua pihak," demikian isi surat tersebut.

Manfaat perdagangan belum merata

Manfaat perjanjian perdagangan bebas juga belum dirasakan secara merata di Vietnam.

Perusahaan manufaktur besar yang didanai investor asing dan eksportir mapan dinilai lebih mampu memanfaatkan penurunan tarif dibandingkan usaha domestik kecil. Perusahaan-perusahaan kecil kerap kesulitan memenuhi persyaratan impor Eropa yang kompleks.

Eksportir Vietnam juga menghadapi aturan UE yang semakin ketat, termasuk Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) dan regulasi deforestasi. Kebijakan ini menuntut perusahaan di sektor terkait memberikan informasi lebih terperinci mengenai proses produksi dan rantai pasok.

"Manfaat EVFTA jelas belum dirasakan secara merata oleh berbagai sektor, perusahaan, dan kelompok masyarakat," kata Hai Thiem Bui, peneliti di Stockholm Center for Global Asia, Universitas Stockholm, kepada DW.

Menurutnya, keberlanjutan hubungan perdagangan selanjutnya akan bergantung pada kemampuan Vietnam memenuhi standar UE yang semakin ketat terkait hak pekerja, keberlanjutan, dan tata kelola regulasi.

Defisit perdagangan jadi tantangan bagi Eropa

Persoalan lainnya adalah ketimpangan perdagangan. Meski EVFTA memperkuat hubungan dagang kedua pihak, perjanjian tersebut sejauh ini lebih berhasil meningkatkan ekspor Vietnam ke Eropa daripada ekspor UE ke Vietnam.

Pada 2025, defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam mencapai 51,7 miliar euro (sekitar Rp1.000 triliun), meningkat dari sekitar 24 miliar euro (Rp480 triliun) pada 2019.

Ketimpangan ini menjadi perhatian ketika Brussels berupaya memperkuat keamanan ekonomi dan membuka peluang ekspor baru bagi industri Eropa.

Perlindungan investasi juga masih menjadi kendala. Perjanjian Perlindungan Investasi UE–Vietnam yang ditandatangani pada 2019 belum berlaku karena proses ratifikasi di sejumlah negara anggota belum selesai.

Jerman meratifikasinya pada Februari dan Polandia pada April. Sementara itu, Prancis, Belanda, dan beberapa negara lainnya masih belum menyelesaikan proses tersebut.

Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis UE–ASEAN, mengatakan investasi perusahaan Eropa di Vietnam tetap meningkat meskipun perjanjian perlindungan investasi belum berlaku.

Dengan pemerintahan baru Vietnam yang menjalankan agenda legislasi ambisius dan berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Humphrey memperkirakan perdagangan kedua pihak akan terus berkembang. Namun, perusahaan Eropa masih mencermati reformasi yang akan dijalankan pemerintah.

Bagi Brussel, tantangannya adalah memastikan perusahaan Eropa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi Vietnam, tanpa mengabaikan komitmen terhadap HAM dan perdagangan berkelanjutan.

Indonesia-Australia Lanjutkan Kerja Sama Ekonomi, Ini Fokusnya

Sabtu, 24 Oktober 2026 10.30 WIB

Aurora K. M. Simanjuntak, Editor : Dian Kurniati

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823542/indonesia-australia-lanjutkan-kerja-sama-ekonomi-ini-fokusnya>

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia dan Australia melanjutkan kerja sama ekonomi melalui Australia–Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) fase II guna mendukung reformasi kelembagaan, mempercepat akses Indonesia ke OECD dan CPTPP, serta mengembangkan ekonomi digital dan hubungan bilateral.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kemitraan strategis Prospera fase II dengan Australia ini diperpanjang untuk periode 2026-2030.

"Saya mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat aktif serta menerjemahkan berbagai formulasi kebijakan menjadi hasil-hasil yang konkret bagi masyarakat," ujarnya, dikutip pada Sabtu (24/10/2026).

Airlangga menyampaikan Prospera fase II berfokus mendukung dua agenda reformasi utama, termasuk proses akses Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Proses akses menjadi negara OECD ditargetkan rampung pada 2028. Saat ini, Indonesia telah menyelesaikan 20 dari 25 bagian initial memorandum atau prosesnya sudah mencapai 80%.

Agenda reformasi lainnya, mempercepat akses Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) segera disepakati. Indonesia diharapkan dapat memperoleh persetujuan seluruh negara anggota dalam pertemuan yang dijadwalkan pada November 2026.

Airlangga mengatakan Prospera juga mendukung pengembangan ekonomi digital. Kerja sama ini diharapkan membantu penyiapan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dukungan tersebut sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat ekonomi digital, serta mempersiapkan penandatanganan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN di Manila, Filipina, pada November 2026.

Airlangga menambahkan kerja sama pariwisata dan konektivitas udara akan diperluas. Pemerintah mendorong penambahan penerbangan langsung antara kota-kota di Indonesia dan Australia.

"Keberhasilan Prospera fase II tidak hanya diukur dari kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari perbaikan berkelanjutan pada kualitas kelembagaan ekonomi Indonesia serta manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Perekonomian dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia bersiap menggelar Prospera Advisory Board Meeting. Pertemuan itu dimaksudkan untuk meninjau arah strategis dan memfinalisasi rencana kerja strategis serta rencana kerja tahunan agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Secara umum, berbagai kegiatan dalam kemitraan ini bertujuan mendukung pemerintah Indonesia untuk merancang dan menerapkan kebijakan serta memperkuat kelembagaan guna memajukan kerja sama dan pembangunan ekonomi.

Adapun target output dari kemitraan ini adalah terciptanya kelembagaan ekonomi Indonesia yang kuat untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan. Selain itu, kemitraan ini diharapkan dapat berkontribusi pada transformasi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

Kerja sama kedua negara mencakup perencanaan yang bersifat konsultatif (consultative planning), keterlibatan bersama dalam menentukan prioritas dan kerangka kerja (responsive and prioritised engagement), serta kolaborasi dengan mitra-mitra di Indonesia melalui pendekatan yang fleksibel (locally led and adaptive delivery). (dik)

Ekonomi RI Masuk 7 Besar Dunia, Produktivitas dan Kesejahteraan Masih Jadi Tantangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 20:48 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-ri-masuk-7-besar-dunia-produktivitas-dan-kesejahteraan-masih-jadi-tantangan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

Namun, ekonom mengingatkan bahwa besarnya skala ekonomi tersebut belum mencerminkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan PPP mencapai US\$ 5,48 triliun. Posisi ini berada di atas Brasil, Inggris, dan Prancis.

Namun, berdasarkan PDB nominal, Indonesia hanya menempati peringkat ke-17 dunia dengan nilai US\$ 1,48 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perbedaan peringkat tersebut disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda.

PPP memperhitungkan perbedaan harga dan daya beli antarnegara, sedangkan PDB nominal menggunakan nilai ekonomi yang dikonversi ke dolar AS.

“Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang nomor tujuh. Kalau berbasis kepada dolar AS, GDP, G20, kita kan nomor 16-17,” ujar Airlangga, Jumat (23/10/2026).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peringkat ketujuh tersebut lebih mencerminkan besarnya populasi dan pasar domestik daripada produktivitas maupun kemakmuran masyarakat.

Ia merujuk pada PDB per kapita berdasarkan PPP Indonesia yang sekitar US\$ 18.657, dengan peringkat ke-107 dari 192 negara.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5% per tahun dinilai belum cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Menurut Yusuf, pertumbuhan masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga, sedangkan kontribusi manufaktur cenderung menurun. Pekerja informal juga masih mendominasi pasar kerja dan kelas menengah mengalami penyusutan.

Karena itu, pemerintah perlu mempercepat reindustrialisasi, memperkuat industri padat karya, serta mendorong hilirisasi menuju produk bernilai tambah dan berteknologi tinggi.

Perbaikan iklim investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan agar investasi menghasilkan produktivitas dan lapangan kerja formal.

“Persoalannya bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk, tetapi seberapa produktif investasi tersebut bagi perekonomian,” kata Yusuf.

Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurrahman, menilai besarnya ekonomi Indonesia belum

sejalan dengan pendapatan masyarakat. Ia menyebut pendapatan per kapita nominal Indonesia masih berkisar US\$ 5.360.

Rizal mengingatkan, peringkat global tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan daya beli, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan.

Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi bernilai tambah tinggi, memperluas pekerjaan formal, serta mendorong transfer teknologi agar manfaat pertumbuhan lebih merata.

“Tanpa transformasi struktural, Indonesia berisiko menjadi raksasa ekonomi secara agregat, tetapi tetap tertinggal dalam kesejahteraan per kapita,” ujar Rizal.

Keberadaan Kopdes Merah Putih Berisiko Gerus Pasar UMKM dan Warung Rakyat

Sabtu, 24 Oktober 2026 21:32 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-nilai-kopdes-merah-putih-berisiko-gerus-pasar-umkm-dan-warung-rakyat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digadang-gadang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa menghadapi risiko menggeser usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung rakyat yang sudah lebih dulu berjalan.

Pemerintah perlu memastikan koperasi ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, bukan sekadar merebut pasar usaha yang telah ada.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibangun atau mulai beroperasi.

Kelayakan usaha, kesiapan pengelolaan, modal, dan rantai pasok juga harus menjadi perhatian agar koperasi mampu bertahan secara mandiri.

"Kecenderungannya akan merebut pasar aktivitas ekonomi yang sudah ada, khususnya UMKM dan warung rakyat. KDMP adalah investasi dengan negative real return," ujar Wijayanto kepada KONTAN, Sabtu (24/10/2026).

Menurut dia, kesiapan operasional menjadi salah satu persoalan utama program tersebut. Tanpa pengelolaan yang memadai dan model bisnis yang layak, banyak koperasi berisiko kesulitan bertahan setelah mulai beroperasi.

Wijayanto menilai, pemerintah sebaiknya memberi ruang bagi Kopdes Merah Putih untuk berinovasi sekaligus menghadapi risiko kegagalan usaha.

Pemerintah tidak perlu mempertahankan koperasi dengan segala cara apabila kegiatan usahanya tidak berkelanjutan.

Ia mencontohkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai model yang perlu menjadi pembelajaran.

Menurut Wijayanto, Kopdes Merah Putih juga harus diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri, termasuk kemungkinan tutup jika tidak mampu bertahan dalam persaingan usaha.

Risiko lainnya adalah penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar apabila koperasi tidak mampu bertahan. Terlebih, jika keberlangsungan bisnisnya bergantung pada penugasan pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial dan pupuk bersubsidi.

“Risiko utama program ini jika KDMP tidak survive, APBN sudah digelontorkan secara masif, dan kegiatan usaha rakyat serta UMKM menjadi bermasalah akibat KDMP,” kata Wijayanto.

Ia juga mengingatkan bahwa bunga pinjaman yang rendah tidak otomatis menjamin keberhasilan usaha. Peluang pasar, kemampuan pengelolaan, dan jiwa kewirausahaan tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan koperasi.

Sebelumnya, pemerintah mendorong Kopdes Merah Putih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa berbasis UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga sebagai infrastruktur untuk menyalurkan bantuan pemerintah, barang bersubsidi, dan pembiayaan

Selain melalui koperasi desa, pemerintah mendorong UMKM terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah mengarahkan agar pemasok program tersebut melibatkan pelaku usaha kecil sehingga manfaat ekonomi dapat menjangkau lebih banyak usaha di tingkat desa.

Dari sisi pembiayaan, Zulkifli menekankan pentingnya bunga pinjaman yang terjangkau bagi UMKM. Ia mencontohkan bunga program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang sebelumnya mencapai 22%-24%, kini menjadi 8%.

Sementara itu, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6%.

Pemerintah sebelumnya menyebut sebanyak 29.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 koperasi ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap sejak 15 Oktober 2026. Namun, Zulkifli belum merinci jumlah koperasi yang telah beroperasi hingga saat ini.

Uang Beredar Tembus Rp 10.587 Triliun, tapi Aktivitas Sektor Riil Belum Kencang

Sabtu, 24 Oktober 2026 17:56 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/uang-beredar-tembus-rp-10587-triliun-tapi-aktivitas-sektor-riil-belum-kencang>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan uang beredar di Indonesia semakin tinggi, tetapi peningkatan likuiditas ini belum tentu mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi produktif.

Pasalnya, ketika uang beredar dalam arti luas (M2) terus meningkat, pertumbuhan uang primer (M0) justru melambat tajam dan penyaluran kredit mulai kehilangan momentum.

Bank Indonesia (BI) mencatat, M2 mencapai Rp 10.587,9 triliun pada September 2026, tumbuh 8,3% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2026 sebesar 8,2% yoy.

Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai, kenaikan M2 merupakan sinyal positif.

Namun, sumber pertumbuhan likuiditas tersebut perlu dicermati untuk melihat sejauh mana uang benar-benar menggerakkan aktivitas ekonomi sektor swasta.

Menurut Andri, perlambatan pertumbuhan M0 menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan.

Data BI menunjukkan, M0 adjusted mencapai Rp 2.353,1 triliun pada September 2026, tumbuh 9,3% yoy. Angka ini melambat signifikan dibandingkan pertumbuhan Agustus 2026 yang mencapai 16,3% yoy.

"Bisa jadi indikasi baik andai M0 juga naik lebih baik dari sebelumnya," ujar Andri kepada KONTAN, Jumat (23/10/2026).

Andri menduga, peningkatan likuiditas pada September lebih banyak ditopang oleh ekspansi fiskal pemerintah daripada penguatan aktivitas ekonomi sektor swasta.

Indikasinya terlihat dari pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang mencapai 24,4% yoy, berbalik dari kontraksi 7% yoy pada Agustus 2026.

Menurut dia, lonjakan tersebut dapat berkaitan dengan belanja pemerintah, termasuk pencairan anggaran dan stimulus dalam jumlah besar.

Aliran belanja itu kemudian dapat menambah saldo rekening dan simpanan masyarakat sehingga turut mendorong pertumbuhan M2.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pertumbuhan M2 pada September 2026 ditopang oleh peningkatan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi.

M1 tumbuh 9% yoy menjadi Rp 6.029,3 triliun. Adapun uang kuasi meningkat 7,3% yoy menjadi Rp 4.498,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2026 sebesar 6,5% yoy.

Dari sisi eksternal, aktiva luar negeri bersih juga menunjukkan perbaikan. Komponen ini tumbuh 1% yoy pada September 2026, setelah terkontraksi 6,6% yoy pada bulan sebelumnya.

Namun, penyaluran kredit perbankan masih tumbuh 12,7% yoy, melambat dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 13,3% yoy. Perlambatan ini menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati di tengah meningkatnya likuiditas perekonomian.

Andri menegaskan, besarnya uang beredar tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan ekonomi tanpa melihat sumber pertumbuhannya.

Likuiditas yang meningkat perlu diikuti aktivitas produktif sektor riil agar benar-benar mencerminkan penguatan ekonomi, bukan sekadar bertambahnya uang dalam sistem keuangan.

Ekonomi Indonesia Terancam Masuk Zona Krisis pada Semester II-2026

Sabtu, 24 Oktober 2026 14:38 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indonesia-terancam-masuk-zona-krisis-pada-semester-ii-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perekonomian Indonesia menghadapi risiko tekanan yang lebih besar pada semester II-2026 seiring potensi penguatan dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan suku bunga global, dan pelemahan daya beli masyarakat.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David E. Sumual menilai, perubahan kondisi global dapat mendorong Indonesia masuk ke zona ekonomi yang kurang menguntungkan.

David memetakan kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan dua indikator utama, yakni pergerakan harga komoditas dan indeks dolar AS.

Dari kedua indikator tersebut, ia membagi kondisi ekonomi ke dalam empat zona dengan tingkat tekanan yang berbeda.

Zona hijau menjadi kondisi paling menguntungkan bagi Indonesia, yakni ketika pasokan global ketat dan likuiditas melonggar.

Zona biru menggambarkan pasokan yang ketat di tengah pengetatan likuiditas, tetapi masih relatif menguntungkan.

Sementara itu, zona biru tua mencerminkan pasokan yang lebih longgar dan likuiditas yang melonggar, sehingga dampaknya cenderung netral.

Adapun zona merah merupakan kondisi paling berisiko, ketika pasokan global melonggar sementara likuiditas menegat. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan pemetaan David, posisi Indonesia pada September 2025 hingga Agustus 2026 masih berada di zona hijau dan biru.

Namun, ia mewaspadai kemungkinan pergeseran ke zona merah pada paruh kedua tahun ini.

"Perkiraan saya mungkin di kuartal III, kuartal IV ini kita masih beredar di sini, tapi ada probabilitas kita pindah ke merah," ujar David dalam acara Business Outlook 2027, Senin (19/10/2026).

Ia menegaskan, waktu pergeseran tersebut belum dapat dipastikan.

Sebagai gambaran, zona merah mencerminkan periode dengan tekanan eksternal yang tinggi, seperti saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian David adalah peningkatan utang global setelah pandemi.

Saat itu, berbagai negara memperbesar pembiayaan untuk menopang perekonomian, termasuk melalui kebijakan pelonggaran likuiditas.

Di Indonesia, kebijakan burden sharing pada 2020–2022 mencapai nilai kumulatif sekitar Rp 1.600 triliun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pembiayaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Namun, ekspansi likuiditas yang berlebihan berpotensi memicu inflasi. Tekanan inflasi di sejumlah negara kemudian memengaruhi arah kebijakan moneter, termasuk keputusan suku bunga.

David menilai, suku bunga global masih berpotensi meningkat. Jika terjadi, kondisi ini dapat menaikkan biaya pinjaman dan memperketat pembiayaan, termasuk bagi perekonomian Indonesia.

Selain suku bunga, pergerakan harga minyak dan risiko gangguan pasokan energi juga perlu diwaspadai. Perubahan harga energi dapat menambah tekanan terhadap perekonomian, terutama ketika kondisi likuiditas global semakin ketat.

Kombinasi berbagai risiko tersebut membuat prospek ekonomi Indonesia pada semester II-2026 perlu dicermati.

Meski belum memastikan apakah Indonesia akan masuk zona merah, David melihat kemungkinan perubahan kondisi global yang dapat memperbesar tekanan terhadap perekonomian domestik.

Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan, Antisipasi Lonjakan Inflasi Jelang Nataru

Sabtu, 24 Oktober 2026 10:30 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-perkuat-rantai-pasok-pangan-antisipasi-lonjakan-inflasi-jelang-nataru>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah risiko perubahan iklim.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membeberkan, upaya tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah.

“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ungkap Dradjad dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai. Inflasi pangan tercatat mencapai 5,03% dengan kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8%, cabai merah keriting sebesar 22%, dan cabai rawit sebesar 5,07%.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pasokan pangan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan, sekaligus mengatasi gangguan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga meskipun stok tersedia.

Untuk merespons tantangan tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan 5 arahan, yakni optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, memitigasi dampak El Nino melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog.

Lebih lanjut, upaya menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Program magang menjangkau 150.000 peserta, sedangkan bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program tersebut menjadi penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Kemudian, penguatan rantai pasok menjadi semakin penting bagi Sulampua yang menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% (yoy), sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy).

Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan untuk menekan kehilangan hasil, mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal.

Guna mendukung potensi ekonomi kawasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.

Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, guna memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.

Melalui kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID, setiap kerja sama antardaerah diarahkan memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur. Penguatan konektivitas dan akses pasar diharapkan dapat menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Dengan demikian, ketahanan pangan Sulampua semakin kuat menghadapi risiko iklim dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” pungkas Dradjad.

Turunkan GWM, BI: Likuiditas Perlu Diseimbangkan

Sabtu, 24 Oktober 2026 06:30 WIB

Reporter: Lydia Tesaloni, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://keuangan.kontan.co.id/news/turunkan-gwm-bi-likuiditas-perlu-diseimbangkan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih lambat dari pertumbuhan kredit mendorong Bank Indonesia (BI) menyesuaikan kebijakan giro wajib minimum (GWM). Namun, BI menegaskan bahwa ini tak serta-merta berarti likuiditas di pasar sudah menegat.

Hingga September 2026, BI mencatat kredit perbankan tumbuh hingga 13,26% secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat tipis dari pertumbuhan 13,65% yoy pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, DPK hanya tumbuh 8,22% yoy, kian lambat dari pertumbuhan 10,95% yoy pada bulan sebelumnya. Secara umum rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) industri perbankan ada di posisi 88,11% pada kuartal III-2026.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Firman Mochtar menjelaskan, pada dasarnya pertumbuhan kredit yang masif mencerminkan kondisi ekonomi yang meningkat. Untuk menjaga itu, sumber pendanaan perbankan perlu diperkuat.

Mengingat DPK tumbuh lebih lambat dari kredit, BI memperkuat kecukupan likuiditas perbankan dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap total 2% hingga akhir tahun.

Rinciannya, GWM untuk bank konvensional turun dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, lalu lanjut turun menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Adapun GWM untuk bank syariah dalam periode yang sama turun dari 7,5% menjadi 6,5% lalu turun lagi menjadi 5,5%.

Berkurangnya kewajiban penempatan dana di BI ini harapannya memberi ruang gerak bagi perbankan untuk tetap mendorong pertumbuhan kredit.

Pasalnya, di saat yang sama BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility (DF), fasilitas penempatan dana bank di BI, sebesar 25 bps menjadi 5%. Sementara itu, BI-Rate ditahan di level 5,75% dan suku bunga Lending Facility (LF), fasilitas pinjaman dari BI kepada bank, tetap di level 6,5%.

Firman bilang kenaikan deposit facility dimaksudkan untuk menyeimbangkan spread antara BI-Rate dengan deposit facility dan lending facility, agar sama-sama sebesar 75 bps. Sebab, keduanya merupakan batas pergerakan INDONESIA, suku bunga pasar uang antarbank (PUAB). Yang mana, deposit facility menjadi batas bawah dan lending facility menjadi batas atas.

BI memandang spread yang simetris antara BI-Rate dengan batas bawah dan batas atas INDONESIA ini diperlukan untuk memberikan kejelasan arah suku bunga bagi perbankan. Dengan begitu, transmisi kebijakan moneter dapat berjalan maksimal untuk menjaga inflasi.

“Karena kita akan susah bercerita ke pelaku pasar mengenai arah BI-Rate kalau spread ke batas bawah itu lebar sekali tetapi ke batas atas sempit sekali,” jelasnya dalam taklimat media, Jumat (22/10/2026).

Secara teoretis, kenaikan batas bawah INDONESIA berarti memperkecil ruang bank untuk mendapat pendanaan dari PUAB dengan bunga yang lebih murah. Nah dalam kaitannya dengan itu, penyesuaian kebijakan GWM bertujuan mengompensasi kebutuhan likuiditas perbankan yang tak bisa didapat dari PUAB.

Dus, secara umum, keputusan BI menurunkan GWM tak mencerminkan risiko likuiditas, alih-alih sebagai strategi harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan operasi moneter agar stance BI yang tercermin dari BI-Rate dapat selaras dengan kondisi likuiditas dan pergerakan suku bunga pasar uang.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, pertumbuhan kredit yang lebih kencang dari DPK memang berisiko membuat persaingan dana antarbank kian ketat dan mendorong naik suku bunga simpanan. Pada gilirannya, itu bisa membuat biaya dana (cost of fund/CoF) kian mahal.

Dalam pandangan Josua, keputusan BI menurunkan GWM merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat fleksibilitas likuiditas tanpa harus menurunkan BI-Rate. “BI sebenarnya sedang menjalankan pelonggaran likuiditas secara terukur, tetapi tetap mempertahankan sikap moneter yang berhati-hati untuk menjaga stabilitas rupiah,” sebutnya.

Sukses Pacu Ekonomi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Investasi

Sabtu, 24 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/sukses-pacu-ekonomi-jawa-tengah-ahmad-luthfi-raih-penghargaan-investasi/>

BATANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, meraih penghargaan Detik Jateng-Jogja Award 2026 kategori Investasi dan Penguatan Program Strategis Nasional.

Dia dinilai berhasil mengakselerasi investasi, dan mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah.

Penghargaan diserahkan Direktur Utama DetikNetwork, Abdul Aziz, kepada Ahmad Luthfi, dalam acara Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).

“Penghargaan ini sebagai pemicu dan pengingat untuk lebih giat lagi dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, terutama di kawasan industri,” kata Luthfi, se usai menerima penghargaan.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, kinerja investasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa positif. Hingga triwulan III 2026, telah membukukan realisasi investasi sebesar Rp72,54 triliun. Realisasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang, dengan capaian 82.420 proyek.

Capaian Rp72,54 triliun tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp31,77 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp40,77 triliun.

Sementara, lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Temanggung Rp5,05 triliun, dan Demak Rp4,29 triliun.

Luthfi optimistis target realisasi investasi tahun ini akan tercapai hingga akhir Desember 2026.

Adapun, DetikJateng-Jogja Awards merupakan forum penghargaan bagi tokoh-tokoh yang berkontribusi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejumlah tokoh, mulai dari kepala daerah, pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pengusaha yang berperan dalam pembangunan Jawa Tengah, menerima penghargaan.

Tahun ini, kegiatan mengangkat tema “Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”. Tak hanya pemberian penghargaan, acara ini juga menghadirkan Forum Investasi Jawa Tengah. Banyak data yang dibuka terkait peluang investasi di Jawa Tengah.

Pemimpin Redaksi Detikcom, Ardhi Suryadhi, mengatakan, investasi ataupun industri menjadi bagian penting untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Jawa Tengah punya modal yang sangat besar, apalagi Gubernur Ahmad Luthfi juga terbilang aktif untuk mendorong investasi, mulai dari energi terbarukan, pariwisata, dan yang lainnya,” terangnya. (Humas Jateng)*ul

Ahmad Luthfi Optimistis Investasi Jateng Tembus Rp110 triliun pada Akhir 2026

Sabtu, 24 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-optimistis-investasi-jateng-tembus-rp110-triliun-pada-akhir-2026/>

BATANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi optimis capaian investasi di wilayahnya bisa mencapai Rp110 triliun hingga akhir 2026. Sampai triwulan III tahun 2026, tercatat investasi sudah sekitar Rp72,54 triliun.

Hal itu disampaikan saat acara Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).

“Sebentar lagi ada perusahaan dari Vietnam akan masuk. Kita optimis bahwa 2026 nanti bisa menyamai capaian tahun lalu, yaitu Rp110 triliun,” kata Luthfi.

Optimisme tersebut bukan isapan jempol belaka. Berdasarkan data, investasi di Jawa Tengah pada triwulan I 2026 sebesar Rp23 triliun. Jumlah tersebut bertambah selama triwulan II 2026 sehingga pada akhir semester I 2026 sudah membukukan Rp59,94 triliun. Selanjutnya triwulan III 2026 sudah mencapai Rp72,54 triliun.

Kinerja tersebut, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait, dalam upaya menarik para investor asing dan dalam negeri untuk menanamkan investasi di Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan baik melalui forum bisnis dan investasi, kerja sama antardaerah, maupun sister province dan sister city dengan negara sahabat.

“Forum-forum bisnis dan investasi seperti ini dapat mempertemukan dunia usaha, kawasan industri, serta pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Salah satu contoh, kami punya Central Java Investment Business Forum (CJIBF), yang sehari bisa menghasilkan investasi sampai Rp19 triliun,” jelas Luthfi.

Hal itu juga didukung oleh peran kepala daerah yang bertindak sebagai manajer marketing, termasuk menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru di Jawa Tengah. Saat ini kawasan industri eksisting di Jawa Tengah ada sekitar tujuh tempat. Tersebar di Kota Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes. Kemudian sekitar 12 kawasan baru sedang disiapkan di berbagai daerah untuk menumbuhkan perekonomian baru.

“Kawasan industri penting untuk pertumbuhan ekonomi baru. Di Jawa Tengah sekarang pertumbuhan ekonomi sudah 5,80%, atau di atas rata-rata nasional,” ujar dia.

Karenanya, gubernur berharap Jawa Tengah terus menjadi tujuan investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berkat kinerja investasi yang positif tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori Figur Akselerator Kamajuan untuk kategori Investasi dan Penguatan Program Strategis Nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh detikcom, di tengah acara Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026.

Penghargaan itu, lanjut Luthfi, menjadi pemicu untuk lebih giat lagi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.

Dalam forum tersebut, Pangdam IV/Diponegoro Sudaryanto dan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan keamanan dan kondusivitas wilayah.

Sebab, kondusivitas wilayah dan jaminan kepastian hukum, menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investor. (Humas Jateng)*ul

Tarik Investor ke Kawasan Industri Jateng, Ahmad Lutfi Siap jadi Marketing Investasi

Sabtu, 24 Oktober 2026, 08:10 WIB

Redaktur: Untung S, Oleh: Mc Kab Batang

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/994400/tarik-investor-ke-kawasan-industri-jateng-ahmad-lutfi-siap-jadi-marketing-investasi>

Batang, InfoPublik - Provinsi Jawa Tengah secara intensif meningkatkan angka investasi dalam membangun daerah, hal ini dikarenakan besaran APBD maupun PAD di Kabupaten/Kota hanya berkisar 18 pesen. Maka dalam Forum Investasi Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Detik.com, dimanfaatkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, untuk menarik investor menanamkan modalnya di sejumlah kawasan ekonomi khusus yang tersebar di beberapa titik.

Ahmad Lutfi memastikan, keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas, agar para investor berkenaan untuk berinvestasi di Jawa Tengah.

“Kami bersama para bupati dan walikota siap menjadi marketing untuk menarik investor ke Jawa Tengah dengan memberi kepastian hukum dan rasa aman,” katanya, saat menjadi pemateri dalam Forum Investasi Jawa Tengah, di KEK Industropolis Batang, Kabupaten Batang, Jumat (23/10/2026).

Kunci utamanya yakni tidak adanya premanisme maupun perizinan yang dipermudah, sehingga investor makin mudah dan nyaman berinvestasi di KEK. Dari sisi pengupahan, Provinsi Jawa Tengah selalu bersaing dengan melengkapi sarana prasarana penunjang.

“Sarana transportasi pun kami permudah, akses makin dekat dan nyaman. Itulah yang menjadi kunci kenyamanan investor apabila menanamkan modalnya ke kawasan industri di Jawa Tengah,” tegasnya.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan mengupayakan agar 70 persen warga Batang yang menjadi tenaga kerja yang tersebar di perusahaan-perusahaan di KEK Industropolis. Di samping itu, tidak hanya menjadi tenaga kerja, namun lebih dari itu, harus ada transfer teknologi, bagi masyarakat setempat.

“Yang tidak kalah pentingnya, kami juga mengupayakan agar pelaku UMKM pun terdampak secara langsung dengan keberadaan KEK Industropolis melalui perusahaan-perusahaannya. Jadi semuanya terdampak secara langsung dari sisi perekonomian,” ungkapnya.

Dari sisi keamanan dan kenyamanan, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Sudaryanto memastikan kondusivitas wilayah agar terjamin, sehingga lingkungan aman terkendali. Investor dipastikan memiliki kepastian keamanan selama menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Tengah. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)

Sukses Pacu Ekonomi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Investasi

Sabtu, 24 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/sukses-pacu-ekonomi-jawa-tengah-ahmad-luthfi-raih-penghargaan-investasi/>

BATANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, meraih penghargaan Detik Jateng-Jogja Award 2026 kategori Investasi dan Penguatan Program Strategis Nasional.

Dia dinilai berhasil mengakselerasi investasi, dan mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah.

Penghargaan diserahkan Direktur Utama DetikNetwork, Abdul Aziz, kepada Ahmad Luthfi, dalam acara Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).

“Penghargaan ini sebagai pemicu dan pengingat untuk lebih giat lagi dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, terutama di kawasan industri,” kata Luthfi, se usai menerima penghargaan.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, kinerja investasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa positif. Hingga triwulan III 2026, telah membukukan realisasi investasi sebesar Rp72,54 triliun. Realisasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang, dengan capaian 82.420 proyek.

Capaian Rp72,54 triliun tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp31,77 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp40,77 triliun.

Sementara, lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Temanggung Rp5,05 triliun, dan Demak Rp4,29 triliun.

Luthfi optimistis target realisasi investasi tahun ini akan tercapai hingga akhir Desember 2026.

Adapun, DetikJateng-Jogja Awards merupakan forum penghargaan bagi tokoh-tokoh yang berkontribusi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejumlah tokoh, mulai dari kepala daerah, pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pengusaha yang berperan dalam pembangunan Jawa Tengah, menerima penghargaan.

Tahun ini, kegiatan mengangkat tema “Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”. Tak hanya pemberian penghargaan, acara ini juga menghadirkan Forum Investasi Jawa Tengah. Banyak data yang dibuka terkait peluang investasi di Jawa Tengah.

Pemimpin Redaksi Detikcom, Ardhi Suryadhi, mengatakan, investasi ataupun industri menjadi bagian penting untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Jawa Tengah punya modal yang sangat besar, apalagi Gubernur Ahmad Luthfi juga terbilang aktif untuk mendorong investasi, mulai dari energi terbarukan, pariwisata, dan yang lainnya,” terangnya. (Humas Jateng)*ul

Dua Tahun Prabowo-Gibran Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jateng

Sabtu, 24 Oktober 2026 21:36 WIB

Aditya Fachril Bayu

<https://www.indonesians.id/nasional/amp/1803146169/dua-tahun-prabowo-gibran-pertumbuhan-ekonomi-545-persen-dan-penyerapan-tenaga-kerja-di-jateng>

INDONESIANS.ID - Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,45% pada Semester I 2026, tertinggi dalam 13 tahun terakhir, di tengah pelaksanaan agenda perubahan struktural dan kebijakan kerakyatan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut disertai penurunan angka kemiskinan serta pengangguran secara nasional.

Pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap penciptaan pekerjaan dan kualitas hidup masyarakat menjadi pembahasan dalam diskusi yang diselenggarakan Karya Milenial Serasi di Semarang. Forum itu mengangkat tema "Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng".

Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pro-buruh Muhammad Raehan hadir untuk mengulas hubungan antara kebijakan nasional dan kondisi masyarakat di daerah. Pembahasan mencakup peran proyek hilirisasi, penjagaan harga kebutuhan pokok, serta pelibatan petani dan pekerja lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pemaparannya, Yusuf menilai dampak kestabilan ekonomi makro Indonesia telah dirasakan di tingkat daerah. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan tersebut melalui capaian pertumbuhan ekonominya.

Sepanjang Semester I 2026, ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif tumbuh 5,80%. Pada triwulan I 2026, pertumbuhannya mencapai 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara tahunan, melampaui rata-rata nasional sekaligus menjadi capaian tertinggi provinsi itu sejak 2011.

Perbaikan kondisi ekonomi juga berjalan bersamaan dengan membaiknya sejumlah ukuran kesejahteraan masyarakat. Penurunan kemiskinan dan pengangguran menjadi bagian dari perkembangan tersebut.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin secara nasional turun menjadi 8,07%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 berkurang menjadi 4,68%.

Untuk Jawa Tengah, TPT pada Februari 2026 tercatat turun hingga 4,24%. Angka tersebut menempatkan tingkat pengangguran terbuka provinsi ini di bawah tingkat nasional pada periode yang sama.

Peningkatan efisiensi dan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut mendukung percepatan ekonomi. Peran perusahaan negara di daerah antara lain terlihat melalui pelaksanaan proyek hilirisasi strategis.

Di Jawa Tengah, salah satu proyek tersebut adalah pembangunan kilang baru Pertamina di Cilacap. Pekerjaan yang dimulai sejak April 2026 itu ditujukan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

Di tengah gejolak yang berlangsung, pemerintah juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Penjagaan harga menjadi bagian dari kebijakan yang menyertai pertumbuhan ekonomi.

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipertahankan pada Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk Solar. Harga LPG ukuran 3 kilogram serta tarif listrik juga tetap dijaga.

Dukungan terhadap stabilitas kebutuhan pokok turut berasal dari persediaan beras pemerintah di Bulog. Per Oktober 2026, cadangan tersebut berada pada posisi 4,5 juta ton.

Pada sisi hulu pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 131 pada 2026, level tertinggi selama 34 tahun terakhir. Perkembangan sektor ini juga mencakup upaya menjaga kestabilan harga pupuk.

Raehan menjelaskan bahwa penempatan petani lokal sebagai pemasok utama MBG memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian mereka. Dengan peran tersebut, kebutuhan program terhubung dengan pasokan dari petani setempat.

Pelaksanaan MBG di Jawa Tengah juga berkaitan dengan penyerapan pekerja lokal. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb), sebanyak 3.826 SPPG sudah beroperasi hingga Maret 2026.

Operasional SPPG tersebut menyerap lebih dari 164.000 tenaga kerja dari wilayah setempat. Kegiatan ini sekaligus menggerakkan aktivitas dapur dan jaringan logistik di desa.

Selama dua tahun pemerintahan berjalan, kesejahteraan dan perlindungan pekerja turut ditempatkan sebagai bagian penting kebijakan. Langkah yang ditempuh melalui sejumlah regulasi mencakup kenaikan upah, penguatan kepastian aturan ketenagakerjaan, serta kebijakan pendukung lainnya.

Kim Jong Un Sambangi Perbatasan China, Ada Misi Ekonomi di Balik Jembatan Baru

Minggu, 25 Oktober 2026 06:20 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/kim-jong-un-sambangi-perbatasan-china-ada-misi-ekonomi-di-balik-jembatan-baru>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali ke negaranya melalui jalur darat pada Minggu setelah mengunjungi monumen bersejarah Perang Korea di Kota Dandong, China, yang berbatasan dengan Korea Utara. Kunjungan tersebut menandai upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan.

Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan Kim mengunjungi Dandong pada Sabtu dan melintasi jembatan baru yang menghubungkan Korea Utara dengan China, mitra dagang terbesarnya.

Pembukaan jembatan tersebut dipandang sebagai simbol dorongan Beijing dan Pyongyang untuk memperluas hubungan perdagangan bilateral.

Media pemerintah Korea Utara menekankan nilai historis kunjungan tersebut dengan menggambarkan hubungan kedua negara sebagai ikatan yang tidak terputus, yang terbentuk selama Perang Korea pada 1950–1953.

Dalam kunjungannya, Kim mengatakan rakyat Korea Utara akan selalu mengenang masa-masa perjuangan bersama rakyat China. Ia juga menegaskan bahwa rasa terima kasih kepada rakyat China yang membantu revolusi Korea Utara dengan pengorbanan darah akan diwariskan dari generasi ke generasi, menurut KCNA.

Kunjungan Kim dipandang sebagai upaya baru untuk memperkuat hubungan ekonomi Korea Utara dan China menjelang rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke kawasan tersebut pada bulan depan.

Langkah ini juga mencerminkan upaya diplomatik Pyongyang untuk menjaga hubungan dengan Beijing, di tengah semakin eratnya kerja sama militer Korea Utara dengan Rusia dalam dua tahun terakhir.

Kim terakhir kali mengunjungi Beijing pada September 2025 untuk menghadiri parade militer. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Korea Utara pada Juni lalu.

Dalam laporan KCNA, Kim menyampaikan harapan agar jembatan yang baru diresmikan tersebut dapat menjalankan misi historisnya untuk menghubungkan kedua negara sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya infrastruktur lintas batas dalam mendukung hubungan bilateral, terutama perdagangan dan konektivitas ekonomi antara kedua negara.

Hubungan Korea Utara dan China memiliki akar sejarah yang kuat sejak Perang Korea pada 1950–1953. China memberikan dukungan militer kepada Korea Utara selama konflik tersebut.

Perang Korea berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Karena itu, secara teknis, kedua Korea masih berada dalam kondisi perang.

Dalam konteks tersebut, penekanan Kim terhadap sejarah perjuangan bersama China menunjukkan bahwa warisan Perang Korea tetap menjadi bagian penting dari narasi hubungan bilateral kedua negara.

Kunjungan ke Dandong dan peninjauan jembatan baru itu berlangsung ketika dinamika geopolitik kawasan terus berkembang, dengan Korea Utara mempererat hubungan militernya dengan Rusia, sementara China tetap menjadi mitra ekonomi utama Pyongyang.

Pekan Sibuk Bank Sentral Dunia, The Fed hingga BOJ Jadi Sorotan

Minggu, 25 Oktober 2026, 08:14 WIB

Penulis : Nur Jamal Shaid

<https://money.kompas.com/read/2026/10/25/081417426/pekan-sibuk-bank-sentral-dunia-the-fed-hingga-boj-jadi-sorotan?page=all>

KOMPAS.com - Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank Sentral Jepang (BOJ) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan pada pekan ini.

Namun, ketiganya masih menghadapi risiko inflasi yang dapat membuka peluang kenaikan suku bunga pada akhir 2026.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (25/10/2026), keputusan tiga bank sentral negara anggota Kelompok Tujuh (G7) tersebut diperkirakan mencerminkan sikap moneter yang masih ketat, tetapi dengan pendekatan bertahap dalam menentukan kebijakan berikutnya.

Para pembuat kebijakan menghadapi sejumlah tekanan inflasi, mulai dari kenaikan harga energi hingga pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Keputusan kebijakan moneter di Amerika Serikat akan dimulai pada Rabu (28/10/2026), disusul keputusan ECB pada Kamis (29/10/2026) dan BOJ pada Jumat (30/10/2026).

Di luar ketiga bank sentral tersebut, sejumlah negara diperkirakan mengambil langkah berbeda.

Bank Sentral Selandia Baru diperkirakan menaikkan suku bunga, sementara sebagian ekonom melihat peluang kenaikan suku bunga pertama Bank Sentral Kanada dalam tiga tahun terakhir.

The Fed diperkirakan menahan suku bunga hingga akhir tahun

The Fed diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pertemuan pekan ini meskipun inflasi Amerika Serikat menunjukkan tekanan lebih tinggi sejak bank sentral menaikkan suku bunga pada September 2026.

Kenaikan pada September tersebut merupakan yang pertama sejak 2023. Saat itu, The Fed juga mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan sebelum akhir tahun.

Meski demikian, ekonom dan investor memperkirakan kenaikan berikutnya baru dilakukan pada pertemuan terakhir The Fed pada Desember 2026.

Ketua The Fed Kevin Warsh diperkirakan menghadapi tantangan saat menyampaikan konferensi pers setelah pertemuan kebijakan.

Warsh selama ini menghindari pemberian petunjuk terperinci mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya.

The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga hingga akhir tahun.

"Kami masih melihat The Fed menahan suku bunga hingga akhir tahun. Biaya pinjaman yang lebih tinggi masih merambat ke seluruh perekonomian, dan ada risiko koreksi pasar terkait AI di sekitar pemilihan paruh waktu yang dapat memperketat kondisi keuangan secara tiba-tiba," tulis ekonom Bloomberg Economics, Anna Wong.

Sementara itu, koreksi pasar mengacu pada penurunan harga aset setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Investor juga akan mencermati pernyataan pejabat bank sentral AS lainnya setelah pertemuan untuk mendapatkan petunjuk tambahan mengenai prospek kebijakan moneter.

ECB dan BOJ masih menghadapi tekanan inflasi

ECB diperkirakan mempertahankan suku bunga pada Kamis, tetapi keputusannya dapat memberikan petunjuk mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah persoalan pasar obligasi Perancis yang turut menjadi perhatian pelaku pasar.

Pada Jumat, BOJ juga diperkirakan mempertahankan suku bunga. Meski demikian, bank sentral Jepang diperkirakan tetap membuka peluang perubahan kebijakan pada akhir tahun.

Tekanan inflasi masih menjadi tantangan bagi sejumlah negara. Harga minyak bertahan di sekitar 100 dollar AS per barrel sepanjang pekan sebelumnya di tengah kekhawatiran pasokan dari Timur Tengah.

Selain itu, fenomena iklim El Nino semakin intensif dan telah mengganggu kondisi cuaca di berbagai wilayah Asia. Kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap harga pangan dan inflasi.

Data ekonomi AS dan Kanada menjadi perhatian

Sehari setelah keputusan The Fed, pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 serta data inflasi yang menjadi acuan utama bank sentral.

Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat selama periode Juli-September, didukung investasi bisnis yang kuat dan belanja konsumen yang tetap bertahan.

Model GDPNow milik Federal Reserve Bank of Atlanta memperkirakan ekonomi AS tumbuh 3,5 persen secara tahunan atau annualized pada kuartal III. Jika terealisasi, angka tersebut akan menjadi pertumbuhan terkuat dalam setahun.

Laporan produk domestik bruto (PDB) AS pada Kamis juga diperkirakan menunjukkan penguatan permintaan domestik yang mendasari pertumbuhan ekonomi.

Indikator penjualan akhir kepada pembeli domestik swasta, yang tidak memasukkan komponen ekspor neto, persediaan, dan belanja pemerintah, diperkirakan mencatat dua kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan terkuat dalam lima tahun.

Data inflasi juga akan menjadi sorotan. Selain mencakup indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures (PCE), laporan tersebut akan disertai data bulanan yang diperkirakan menunjukkan percepatan kenaikan harga pada September.

Indeks PCE merupakan salah satu indikator inflasi utama yang digunakan The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga.

Sementara itu, ekonomi Kanada diperkirakan tumbuh 0,2 persen pada Agustus. Statistik Kanada juga akan merilis estimasi awal pertumbuhan ekonomi September pada Jumat.

Bank sentral Asia menghadapi tekanan arus modal

Di Asia, bank sentral menghadapi tantangan untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah kenaikan imbal hasil obligasi global, prospek suku bunga negara maju yang lebih tinggi, dan mahal nya harga minyak.

Ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed serta tekanan di pasar obligasi pemerintah AS turut memperlebar kesenjangan imbal hasil antara surat utang AS dan negara berkembang di Asia.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko keluarnya modal asing dan tekanan terhadap nilai tukar mata uang negara-negara berkembang.

Bank Sentral Thailand diperkirakan mempertahankan suku bunga pada Rabu. Sementara itu, Bank Sentral Selandia Baru diperkirakan menaikkan suku bunga pada hari yang sama.

Data inflasi Australia yang dijadwalkan dirilis pada Rabu juga akan menjadi perhatian, termasuk indikator inflasi rata-rata yang telah disesuaikan atau trimmed mean yang dipantau ketat oleh Reserve Bank of Australia.

Inflasi Tokyo akan menyusul pada Jumat, beberapa jam sebelum pengumuman kebijakan BOJ.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Korea Selatan dijadwalkan merilis data PDB kuartal III pada Selasa. China akan mengumumkan indeks manajer pembelian atau purchasing managers' index (PMI) manufaktur, nonmanufaktur, dan komposit pada Sabtu.

Data tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan sektor industri dan konsumsi Asia dalam menghadapi biaya energi yang tinggi, kenaikan biaya pinjaman, serta kondisi keuangan global yang semakin ketat.

Inggris bersiap merilis anggaran pertama pemerintahan Andy Burnham

Di Eropa, perhatian pasar juga tertuju pada anggaran pemerintah Inggris yang akan disampaikan pada Rabu. Anggaran tersebut merupakan yang pertama di bawah Perdana Menteri Andy Burnham.

Menteri Keuangan Inggris John Healey menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan membantu masyarakat menghadapi krisis energi dan menjaga disiplin fiskal demi mempertahankan kepercayaan investor.

Sejumlah data ekonomi kawasan euro juga akan dirilis menjelang keputusan ECB.

Indeks kepercayaan bisnis Ifo Jerman dijadwalkan keluar pada Senin, sedangkan data kepercayaan konsumen Perancis akan dirilis pada Selasa.

Kedua indikator tersebut akan memberikan gambaran mengenai kondisi dunia usaha dan rumah tangga di tengah ketegangan politik di kawasan tersebut.

Pada Jumat, kawasan euro akan merilis estimasi awal pertumbuhan PDB kuartal III. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan melambat menjadi 0,2 persen.

Data inflasi dari empat perekonomian terbesar di kawasan euro juga dijadwalkan dirilis pada hari yang sama.

Di Afrika Selatan, badan statistik akan menerbitkan estimasi PDB yang telah disesuaikan dan diperbarui dengan tahun dasar 2022, menggantikan tahun dasar 2015. Data tersebut dijadwalkan keluar pada Kamis.

Sementara itu, Menteri Keuangan Zambia Situmbeko Musokotwane akan menyampaikan anggaran 2027 pada Jumat.

Investor akan mencermati langkah pemerintah mengantisipasi dampak potensi kekeringan parah ketika negara tersebut masih menunggu persetujuan akhir program dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp102.950/Kg

Minggu, 25 Oktober 2026 10:15 WIB

Merinda Faradiani

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125670/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp102-950-kg/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Harga cabai rawit merah mencapai Rp102.950 per kilogram (kg) berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI).

Mengutip laman PIHPS Nasional pada Minggu (25/10/2026), harga cabai rawit merah turun 0,82% atau Rp850 dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara itu, cabai rawit hijau tercatat Rp79.400/kg, turun 0,44% atau Rp350. Harga cabai merah besar berada di level Rp75.600/kg, naik 0,47% atau Rp350. Adapun cabai merah keriting dibanderol Rp86.100/kg, turun 1,6% atau Rp1.400.

Untuk komoditas bawang, harga bawang merah ukuran sedang tercatat Rp37.100/kg, turun 0,13% atau Rp50. Sementara itu, bawang putih ukuran sedang mencapai Rp38.450/kg, turun 0,13% atau Rp50.

Di kelompok beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp14.900/kg dan beras kualitas bawah II Rp14.750/kg. Beras medium I dijual Rp16.650/kg, sedangkan medium II Rp16.450/kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I mencapai Rp18.000/kg, naik 0,28% atau Rp50. Adapun beras kualitas super II tercatat Rp17.400/kg.

Dari sisi protein hewani, harga daging ayam ras segar berada di level Rp39.950/kg, turun 2,08% atau Rp850. Harga daging sapi kualitas I mencapai Rp152.550/kg, naik 0,07% atau Rp100.

Sedangkan daging sapi kualitas II sebesar Rp143.500/kg, naik 0,03% atau Rp50. Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.550/kg, turun 0,51% atau Rp150.

Adapun harga gula pasir kualitas premium mencapai Rp20.550/kg, tidak berubah. Gula pasir lokal dijual Rp19.400/kg, naik 0,52% atau Rp100.

Di kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.350/liter. Minyak goreng kemasan bermerek I mencapai Rp24.350/liter, sedangkan kemasan bermerek II sebesar Rp23.600/liter.

Belanja Daerah Lambat, Ekonom Prediksi Penyerapan APBD Hanya 87% pada Akhir Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 17:45 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-daerah-lambat-ekonom-prediksi-penyerapan-apbd-hanya-87-pada-akhir-tahun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) hingga akhir Oktober 2026 masih berjalan lambat. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja APBD per 24 Oktober 2026 baru mencapai Rp 737 triliun atau 58,35% dari total pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 1.263,12 triliun.

Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun terakhir. Pada 24 Oktober 2025, realisasi belanja daerah tercatat mencapai 61,64%, sedangkan pada periode yang sama 2024 mencapai 65%.

Dengan demikian, Pemda masih harus merealisasikan sekitar Rp 526 triliun dalam waktu sekitar dua bulan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, lambatnya realisasi belanja daerah berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di luar Jawa yang aktivitas ekonominya relatif lebih bergantung pada belanja APBD.

Menurut Yusuf, belanja barang, jasa, dan modal Pemda merupakan sumber permintaan penting bagi kontraktor lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja di daerah.

"Ketika belanja tertahan, perputaran uang dan kegiatan ekonomi ikut melambat," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (25/10/2026).

Lebih lanjut Yusuf menyebut, persoalan rendahnya realisasi belanja daerah bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan dana atau anggaran. Pasalnya, dana Pemda yang tersimpan di perbankan masih mencapai Rp 195,2 triliun pada akhir Agustus 2026.

Di sisi lain, tekanan terhadap keuangan daerah memang meningkat seiring penurunan transfer ke daerah (TKD). Transfer ke daerah turun dari Rp 919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp 693 triliun pada 2026.

Namun, besarnya simpanan Pemda di perbankan menunjukkan adanya persoalan lain, yakni ketidakpastian transfer dan kemampuan Pemda dalam mengeksekusi anggaran.

Yusuf mengingatkan, percepatan belanja yang baru dilakukan menjelang akhir tahun juga berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program. Proyek berpotensi dikerjakan secara terburu-buru, pengawasan melemah, dan dampak ekonominya tidak langsung dirasakan pada tahun berjalan.

Transfer Daerah Menyusut, Realisasi Belanja Terhambat

Yusuf menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan realisasi belanja daerah berjalan lambat.

Pertama, pemangkasan TKD memaksa Pemda menyusun ulang prioritas dan menyesuaikan APBD. Dana Bagi Hasil (DBH) turun 69,5% menjadi Rp 58,5 triliun, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Rp 154,3 triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sekitar Rp 46 triliun.

Proses penyesuaian anggaran tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program daerah.

Kedua, Pemda cenderung menahan kas sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian jumlah dan waktu penyaluran transfer dari pemerintah pusat.

"Ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu penyaluran transfer membuat daerah membutuhkan bantalan untuk menjamin pembayaran belanja wajib, terutama gaji," jelas Yusuf.

Menurutnya, besarnya simpanan dana daerah di perbankan tidak selalu menunjukkan adanya anggaran yang menganggur. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan upaya Pemda mengantisipasi ketidakpastian arus kas.

Ketiga, terdapat kendala teknis yang berulang setiap tahun, mulai dari perubahan petunjuk pelaksanaan, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga kebiasaan menumpuk realisasi belanja pada akhir tahun.

Kapasitas perencanaan yang belum merata serta kekhawatiran aparaturnya terhadap risiko hukum juga membuat proses pengambilan keputusan pengadaan berjalan lebih hati-hati.

Selain itu, semakin banyak program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat di daerah. Kondisi tersebut membuat sebagian Pemda menunggu kejelasan pembagian kewenangan sebelum merealisasikan anggarannya.

Belanja Daerah Diperkirakan Hanya Terserap 83%-87%

Melihat perkembangan realisasi hingga akhir Oktober, Yusuf memperkirakan penyerapan belanja daerah sepanjang 2026 hanya mencapai sekitar 83%-87% dari pagu anggaran.

Belanja pegawai dan kebutuhan rutin diperkirakan terserap hampir penuh. Sebaliknya, belanja modal berpotensi menjadi komponen dengan realisasi paling rendah.

Yusuf mencatat, dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal hanya mencapai 84,6%. Dengan tekanan anggaran yang lebih besar pada tahun ini, realisasi belanja modal diperkirakan hanya berkisar 75%-80%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan belanja pada sisa tahun anggaran menjadi tantangan bagi Pemda, terutama untuk belanja yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi produktif.

"Solusinya tidak cukup dengan meminta Pemda mempercepat belanja. Pemerintah pusat perlu memberikan kepastian mengenai besaran dan jadwal transfer sejak awal tahun, menyederhanakan petunjuk teknis, serta mendorong lelang dini sebelum tahun anggaran berjalan," ungkap Yusuf.

Selain itu, insentif berbasis kinerja bagi Pemda juga dapat diperkuat untuk mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih efektif. Namun, Yusuf mengingatkan agar upaya tersebut tidak disertai pemotongan transfer secara mendadak.

Menurutnya, kebijakan seperti itu justru berpotensi meningkatkan ketidakpastian arus kas dan mendorong Pemda menahan lebih banyak dana di perbankan.

62% Ekonom Prioritaskan Kredibilitas Kebijakan untuk Jaga Peringkat Utang RI

Minggu, 25 Oktober 2026 14:15 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/62-ekonom-prioritaskan-kredibilitas-kebijakan-untuk-jaga-peringkat-utang-ri>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menilai disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan menjadi aspek penting untuk menjaga peringkat kredit Indonesia. Hal ini terungkap dalam Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Dalam survei terhadap 63 ahli ekonomi yang dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 29 responden atau 46% memilih menjaga kredibilitas defisit fiskal sebagai salah satu prioritas untuk mempertahankan peringkat kredit negara (sovereign credit rating) Indonesia.

Meski demikian, perhatian terbesar responden tertuju pada penguatan kredibilitas institusi dan kebijakan. Aspek ini dipilih oleh 39 responden atau 62%, menjadikannya prioritas yang paling banyak disebut dalam survei.

Selanjutnya, sebanyak 25 responden atau 40% menilai peningkatan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, 24 responden atau 38% memilih penataan ulang program-program prioritas pemerintah.

Upaya menjaga kepercayaan investor dan kepastian arah kebijakan juga masuk dalam daftar prioritas. Sebanyak 21 responden atau 33% memilih aspek tersebut sebagai langkah untuk menjaga peringkat kredit Indonesia.

Adapun 18 responden atau 29% menyoroti pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, penguatan mobilisasi penerimaan dalam negeri dan basis perpajakan dipilih oleh sembilan responden atau 14%.

Survei LPEM FEB UI: 52% Ekonom Nilai Kondisi Ekonomi Memburuk, Inflasi Masih Tinggi

Minggu, 25 Oktober 2026 13:21 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/survei-lpem-feb-ui-52-ekonom-nilai-kondisi-ekonomi-memburuk-inflasi-masih-tinggi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ahli ekonomi atau ekonom memberikan penilaian negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Sebanyak 52% ahli ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

Temuan tersebut tercatat dalam Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Berdasarkan hasil survei terhadap 63 ahli ekonomi, sebanyak 33 responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk.

Rinciannya, 29 responden atau 46% menilai kondisi ekonomi lebih buruk, sedangkan empat responden atau 6% menilai kondisinya jauh lebih buruk.

Di sisi lain, sebanyak 25 responden atau 40% menilai kondisi ekonomi tidak berubah dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

Sementara itu, hanya lima responden atau 8% yang menilai kondisi ekonomi membaik. Tidak ada responden yang menilai kondisi ekonomi jauh lebih baik.

"52% ahli menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan lalu," dikutip dari laporan tersebut, Minggu (25/10/2026).

Dalam laporan tersebut, rata-rata penilaian kondisi ekonomi saat ini tercatat minus 0,51. Angka ini lebih rendah dibandingkan hasil survei Semester I 2026 yang sebesar minus 0,39. Meski demikian, perubahan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Tekanan Inflasi Masih Tinggi

Selain menilai kondisi ekonomi memburuk, mayoritas ahli ekonomi juga menyoroti tekanan inflasi yang masih tinggi.

Sebanyak 49 dari 63 responden atau 78% menilai tekanan inflasi terhadap perekonomian Indonesia saat ini tinggi. Dari jumlah tersebut, 44 responden atau 70% memberikan penilaian tinggi dan lima responden atau 8% menilai sangat tinggi.

Sebanyak 13 responden atau 21% menilai tekanan inflasi berada pada tingkat netral. Sementara itu, satu responden atau 2% menilai tekanan inflasi rendah. Tidak ada responden yang menilai tekanan inflasi sangat rendah.

Ke depan, tekanan inflasi juga masih menjadi perhatian para ahli ekonomi. Sebanyak 38 responden atau 60% memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat dalam satu bulan mendatang.

Penciptaan Lapangan Kerja Dinilai Memburuk

Sorotan lainnya datang dari kondisi pasar tenaga kerja. Sebanyak 46 dari 63 ahli ekonomi atau 73% menilai penciptaan lapangan kerja saat ini lebih rendah dibandingkan enam bulan sebelumnya.

Rinciannya, 30 responden atau 48% menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah, sedangkan 16 responden atau 25% menilai kondisinya jauh lebih rendah.

Sebanyak 15 responden atau 24% menilai penciptaan lapangan kerja tidak berubah. Adapun dua responden atau 3% menilai penciptaan lapangan kerja lebih tinggi.

Di tengah penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi saat ini, mayoritas ahli ekonomi memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga bulan mendatang tidak banyak berubah.

Sebanyak 33 responden atau 52% memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak berubah dari angka terbaru.

Sementara itu, 21 responden atau 33% memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat, termasuk lima responden yang memperkirakan perlambatan signifikan.

Sebaliknya, sembilan responden atau 14% memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melaju. Tidak ada responden yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi melaju secara signifikan.

Adapun, Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 ini dilakukan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform daring.

Survei ini menghimpun pandangan 63 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, serta organisasi dan institusi multinasional.

CGS Sekuritas: Bunga Tetap, Penurunan GWM Bisa Tambah Likuiditas Rp 97 Triliun

Minggu, 25 Oktober 2026 10:40 WIB

Reporter: Avanty Nurdiana, Editor: Avanty Nurdiana

<https://keuangan.kontan.co.id/news/cgs-sekuritas-bunga-tetap-penurunan-gwm-bisa-tambah-likuiditas-rp-97-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75%, meski tekanan terhadap rupiah dan pasar saham domestik meningkat menyusul rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mereklasifikasi Indonesia menjadi standalone market pada Juni 2027.

Di tengah ketidakpastian tersebut, BI memilih mengandalkan kombinasi kebijakan likuiditas dan stabilisasi nilai tukar, alih-alih menaikkan suku bunga acuan.

Analisis CGS Sekuritas Indonesia Wisnu Trihatmojo, dalam riset 21 Oktober 2026, menilai keputusan BI mempertahankan suku bunga sejalan dengan pandangannya. Tapi keputusan tersebut berbeda dari konsensus Bloomberg yang memperkirakan BI akan menaikkan BI-Rate sebesar 25-50 basis poin (bps) untuk meredakan pelemahan rupiah akibat arus keluar modal yang dipicu isu MSCI.

Menurut Wisnu, kenaikan suku bunga acuan belum tentu menyelesaikan persoalan utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni kemudahan investasi (investability) di pasar saham Indonesia. Persoalan

tersebut mencakup transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Sebagai gantinya, BI mengumumkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup kenaikan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5%, penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM), serta tambahan diskon biaya lindung nilai atau hedging untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Untuk kebijakan GWM, BI menurunkan GWM bersih sebesar 1 poin persentase hingga Desember 2026. Langkah ini berasal dari kombinasi pemangkasan GWM perbankan sebesar 2 poin persentase dan pengurangan insentif GWM sebesar 1 poin persentase dalam program Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Sementara itu, tambahan diskon biaya hedging sebesar 15 poin persentase diberikan untuk transaksi DNDF yang berkaitan dengan investasi portofolio, investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI), serta pendanaan perbankan dari luar negeri. Dengan tambahan tersebut, diskon menjadi 40% untuk tenor enam bulan dan 45% untuk tenor 12 bulan.

Wisnu memperkirakan penurunan GWM bersih sebesar 1 poin persentase setara dengan tambahan likuiditas sekitar Rp 97 triliun yang tersedia bagi perbankan untuk disalurkan sebagai kredit. Tambahan likuiditas ini diharapkan menopang penyaluran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi intermediasi, BI menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit masih kuat, mencapai 13,3% secara tahunan pada September 2026. Pertumbuhan tersebut terutama didorong kredit investasi, dengan sektor pertambangan dan manufaktur mencatatkan ekspansi tercepat.

Meski demikian, tantangan stabilitas keuangan belum sepenuhnya mereda. Usulan MSCI untuk mereklasifikasi Indonesia menjadi standalone market pada Juni 2027 telah memicu arus keluar modal dan memperlebar penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi 38,6% sepanjang tahun berjalan.

Tekanan di pasar saham turut meningkatkan persepsi risiko investasi Indonesia. Dampaknya dapat merembet ke kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dan pelemahan nilai tukar rupiah.

CGS Sekuritas sependapat dengan pandangan BI bahwa perkembangan terkait MSCI sejauh ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap rupiah. Hal tersebut tercermin dari kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang masih berada di bawah ambang Rp 18.000 per dolar AS.

Namun, Wisnu menilai langkah stabilisasi yang lebih kuat mungkin diperlukan seiring perkembangan keputusan MSCI pada tahun depan.

Menghadapi ketidakpastian menjelang tenggat keputusan MSCI pada Juni 2027, Wisnu memperkirakan BI akan terus menjaga stabilitas keuangan melalui bauran kebijakan yang lebih terarah.

Strategi tersebut diperkirakan mencakup intervensi pasar valuta asing (valas), peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penambahan insentif untuk mendorong masuknya modal asing, serta perluasan transaksi mata uang lokal.

Menurut Wisnu, pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan BI yang semakin mengandalkan kombinasi instrumen, bukan hanya suku bunga acuan. Dengan demikian, BI dapat berupaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, CGS Sekuritas menekankan bahwa persoalan utama yang disoroti MSCI membutuhkan penyelesaian melalui reformasi sektor keuangan. Peningkatan transparansi kepemilikan saham dan perbaikan tata kelola pasar dinilai lebih relevan untuk memperbaiki persepsi investor terhadap kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pihak-pihak terkait lainnya tengah mempercepat implementasi reformasi yang diperlukan.

Selain menekan pasar saham dan rupiah, perkembangan MSCI juga berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap peringkat kredit sovereign Indonesia apabila nilai tukar, cadangan devisa, dan tata kelola mengalami penurunan signifikan.

Tim strategi CGS Sekuritas memperkirakan potensi arus keluar dana pasif dari pasar saham Indonesia mencapai sekitar US\$ 5 miliar apabila MSCI benar-benar mereklasifikasi Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% cadangan devisa jika BI melakukan intervensi penuh untuk menahan dampaknya terhadap nilai tukar.

Namun, estimasi tersebut belum memperhitungkan potensi arus keluar dari dana aktif, yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dana pasif.

CGS Sekuritas juga menyoroti penilaian Fitch bahwa rasio cakupan cadangan devisa Indonesia masih berada di bawah median negara-negara berperingkat BBB, yakni lima bulan. Pada saat yang sama, indikator Worldwide Governance Indicators yang digunakan sebagai proksi kualitas tata kelola Indonesia juga mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menambah tantangan bagi Indonesia dalam mempertahankan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian arus modal global. Karena itu, CGS Sekuritas menilai stabilitas rupiah dan cadangan devisa perlu berjalan beriringan dengan reformasi struktural di pasar keuangan.

Semester I growth 5,45%, Indonesia gulirkan stimulus untuk kuartal IV

Minggu, 25 Oktober 2026 08.00 WIB

Putri Sekararum, Yayasan Syarif Hidayat

<https://www.idnfinancials.com/id/news/70778/semester-i-growth-5-45-indonesia-gulirkan-stimulus-untuk-kuartal-iv>

JAKARTA - Perekonomian nasional mencatatkan pertumbuhan mencapai 5,45 persen pada paruh pertama tahun 2026 dan berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Capaian tersebut, seperti dikutip dari ANTARA (25/10/26), menempatkan posisi Indonesia di jajaran teratas pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara anggota G20 serta kawasan ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan laporan perkembangan makroekonomi secara komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna yang digelar pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Jakarta.

Airlangga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas level 5 persen tersebut jauh melampaui rata-rata global yang berada di kisaran 3 persen.

Stabilitas internal ekonomi domestik turut ditopang oleh sejumlah indikator positif, termasuk Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di level ekspansif 52,4.

Selain itu, neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus yang kuat di angka 7,25 disertai tingkat kepercayaan konsumen yang stabil pada level 118,1.

Sektor ketenagakerjaan dan pemerataan ekonomi juga menunjukkan perbaikan fundamental yang signifikan dengan turunnya tingkat pengangguran ke level 4,65 persen atau posisi terendah sejak tahun 1994, serta perbaikan rasio Gini menjadi 0,368.

Kesehatan fiskal dan moneter terpelihara dengan baik melalui defisit APBN yang dipertahankan sebesar 1,24 persen serta cadangan devisa mencapai US\$146,3 miliar.

Posisi cadangan devisa tersebut dinilai sangat kuat karena mampu membiayai kebutuhan impor nasional hingga 6,5 bulan ke depan, sementara penyaluran kredit perbankan tumbuh dua digit di angka 13,65 persen.

Subsidi Upah Rp 300.000

Guna menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum ekspansi hingga pengujung tahun, pemerintah resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi kuartal IV yang komprehensif.

Paket stimulus tersebut mencakup penerapan program khusus satu orang satu rekening dengan dukungan anggaran senilai Rp1,28 triliun atau setara US\$71,11 juta.

Pemerintah juga memperkuat jaring pengaman sosial melalui program bantuan pangan berupa pasokan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat.

Alokasi anggaran untuk program bantuan pangan tersebut mencapai Rp17,54 triliun atau setara US\$974,44 juta guna memastikan ketahanan pangan masyarakat bawah.

Di samping itu, pemerintah menggelontorkan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan total anggaran mencapai Rp11,97 triliun.

Sektor transportasi publik menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru turut mendapatkan alokasi stimulus sebesar Rp883,4 miliar atau US\$49,08 juta bagi 6,6 juta pelaku perjalanan.

Insentif transportasi tersebut diwujudkan melalui diskon tiket perjalanan dan penyeberangan sebesar 30 persen, tarif khusus pelabuhan ASDP, serta PPN ditanggung pemerintah untuk penerbangan domestik.

Menyongsong bulan Januari 2027, Presiden Prabowo telah memberikan arahan strategis untuk menyiapkan program lanjutan guna memperkuat sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja.

Inisiatif prioritas tersebut meliputi penyelenggaraan program magang nasional bagi 150.000 peserta serta pelatihan vokasi profesional untuk 300.000 tenaga kerja.

Pemerintah juga memperluas cakupan fasilitas pajak penghasilan orang pribadi bagi pekerja dengan tingkat penghasilan hingga Rp10 juta atau US\$555,56 per bulan.

Kebijakan pendukung lainnya mencakup evaluasi batas penghasilan tidak kena pajak serta perpanjangan insentif PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan komersial.

Insentif perumahan tersebut menyasar hunian dengan rentang harga antara Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, disandingkan dengan penguatan skema perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berbagai rangkaian kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas makroekonomi serta memastikan keberlanjutan daya saing Indonesia di kancah global. (SA)

KEK Diandalkan Tarik Investasi Data Center dan Semikonduktor

Minggu, 25 Oktober 2026 14.00 WIB

Aurora K. M. Simanjuntak, Editor : Ringkang Gumiwang

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823560/kek-diandalkan-tarik-investasi-data-center-dan-semikonduktor>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), infrastruktur digital, dan ekonomi kreatif untuk menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu membangun ekosistem yang mendukung investasi di bidang teknologi, seperti melalui penguatan industri dan pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya ini juga dilakukan melalui kerja sama dengan India.

"Saya berharap melalui kolaborasi ini, sektor kreativitas dapat tumbuh hingga dua digit," ujarnya, dikutip pada Minggu (25/10/2026).

Airlangga menjelaskan sektor ekonomi kreatif yang didukung kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia-India akan diarahkan untuk memperkuat kolaborasi digital.

Kolaborasi digital mencakup pengembangan desain cip (chip design), industri semikonduktor, serta teknologi digital seperti AI, Internet of Things (IoT), machine learning, dan quantum computing.

"Evolusi teknologi yang bergerak cepat ini menuntut penyiapan infrastruktur digital yang solid. Lonjakan pemanfaatan teknologi tersebut juga mendorong pesatnya kebutuhan pusat data (data center) global dan industri semikonduktor," kata Airlangga.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kebutuhan terhadap pusat data, cip, energi, dan jaringan komunikasi yang andal juga semakin meningkat.

Mengingat pengembangan pusat data membutuhkan lahan, pasokan listrik yang memadai, dan jaringan serat optik, Airlangga menyebut 3 kawasan yang dapat mendukung masuknya investasi tersebut, yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau, kawasan di Tangerang Selatan, dan kawasan Karawang.

"Perkembangan pesat ini mendorong kebutuhan pusat data (data center) dan semikonduktor, yang kini terus kita dorong pengembangannya di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus," tutur Airlangga.

Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi KEK berbasis teknologi dan kreativitas, seperti KEK Singhasari, agar berkembang menjadi pusat riset, inovasi, dan komersialisasi karya kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif yang didukung pusat data dan infrastruktur digital di KEK diharapkan dapat menciptakan dampak pengganda (multiplier effect) serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif hingga mencapai dobel digit.

"AI bukan sekadar pengganti pekerjaan, melainkan juga sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan keterampilan baru. Itu sebabnya kita memerlukan dukungan dari Kawasan Ekonomi Khusus seperti Singhasari," kata Airlangga. (rig)

Kondisi Ekonomi Stabil Di Tengah Tekanan Global Investasi Meningkat, Ekspor Digenjot, Daya Beli Diperkuat

Minggu, 25 Oktober 2026 06:45 WIB

Reporter : Novalliandy, Editor : Fazry

<https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/331463/kondisi-ekonomi-stabil-di-tengah-tekanan-global-investasi-meningkat-ekspor-digenjot-daya-beli-diperkuat>

RM.id Rakyat Merdeka - Perekonomian Indonesia dinilai tetap tangguh di tengah tekanan global. Karena itu, Pemerintah memperkuat investasi, ekspor dan daya beli masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi perekonomian nasional masih stabil menjelang akhir 2026.

Hal itu disampaikan dalam laporan perkembangan ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus evaluasi dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sampaikan kondisi ekonomi stabil,” ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah membahas sejumlah indikator makroekonomi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi perbankan, hingga perkembangan investasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan ekspor nasional di tengah dinamika perdagangan internasional.

Airlangga mengatakan, peningkatan ekspor akan dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi seluruh sektor. Terutama industri manufaktur yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

Pemerintah juga akan mengatasi berbagai hambatan ekspor melalui Satuan Tugas (Satgas) terkait.

“Ekspor kita pacu dari seluruh sektor. Termasuk manufaktur. Berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor akan kami atasi melalui Satgas,” katanya.

Ketahanan ekonomi Indonesia berlangsung di tengah perlambatan ekonomi global. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam publikasi World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen pada 2026, melambat dibandingkan 3,3 persen pada 2025.

Sementara, inflasi global diperkirakan mencapai 4,7 persen pada 2026 sebelum turun menjadi 4,1 persen pada 2027. Kondisi itu menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi tekanan. Terutama akibat ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga energi.

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah indikator domestik masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang positif. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 mencatat inflasi sebesar 3,28 persen secara tahunan.

Aktivitas manufaktur juga berada dalam fase ekspansi. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mencapai 52,4 pada September 2026.

Dari segi investasi, realisasi penanaman modal pada semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Capaian tersebut setara dengan 49,5 persen dari target investasi sepanjang 2026,” ujar mantan Menteri Perindustrian itu.

Kinerja perdagangan turut menopang ketahanan ekonomi nasional. Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 3,55 miliar dolar AS atau sekitar Rp 63,9 triliun.

Kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dari keputusan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 yang mempertahankan peringkat kredit berdaulat Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.

Airlangga mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah memperkuat sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor dan membuka sumber pertumbuhan baru.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan mandatori Biodiesel 50 (B50) sejak 1 Juli 2026. Program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp 170 triliun, sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik dan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit.

Pemerintah juga mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekosistem ekonomi hijau melalui proyek transisi energi, penguatan investasi energi bersih, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

Di segi iklim usaha, Pemerintah memperkuat reformasi regulasi melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat perizinan, menyelesaikan hambatan investasi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan.

Airlangga menjelaskan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang, berkurang 430.000 orang dibandingkan September 2025. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, terendah sepanjang sejarah pencatatan.

Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Penyerapan tenaga kerja bertambah 522.000 orang sepanjang Februari-Mei 2026, sementara jumlah pengangguran berkurang 24.000 orang menjadi 7,22 juta orang.

Meski demikian, stabilitas ekonomi nasional perlu diikuti penguatan kepercayaan investor, khususnya di tengah tekanan pasar keuangan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, stabilitas ekonomi Indonesia perlu diperkuat melalui perbaikan tata kelola pasar keuangan dan komunikasi kebijakan yang transparan.

“Meski indikator ekonomi riil dan fiskal masih menunjukkan kondisi relatif terjaga, tekanan di pasar modal dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sinyal penting bagi Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka, Jumat (23/10/2026). NOV

Jateng & Jatim Sinergi Perkuat Kerja Sama, Siap Bangun Ekonomi Baru

Sabtu, 25 Oktober 2025 09:57 WIB

Inkana Putri

<https://news.detik.com/bangun-indonesia/d-8177498/jateng-jatim-sinergi-perkuat-kerja-sama-siap-bangun-ekonomi-baru>

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan penandatanganan 10 nota kesepahaman terkait peningkatan perekonomian kedua daerah. Kerja sama tersebut bertujuan dalam rangka membangun ekonomi baru di kedua wilayah.

"Kerja sama ini untuk meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).

Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan penandatangan nota kesepahaman yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/5) malam.

Luthfi menjelaskan terdapat sejumlah kerja sama yang dibangun kedua daerah. Hal ini meliputi, Dinas Ketahanan Pangan Jateng-Jatim terkait pembangunan dan pengembangan ketahanan pangan; Dinas Koperasi dan UMKM Jateng-Jatim terkait pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng-Jatim tentang fasilitasi pengembangan bidang industri dan perdagangan.

Kemudian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jateng-Jatim tentang fasilitasi pengembangan SDM industri produk tekstil dan alas kaki; Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim tentang pengelolaan perlindungan tanaman; dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng-Jatim tentang fasilitasi pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, BUMD kedua provinsi juga menjalin kerja sama, antara lain PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dengan PT Petrogas Jatim Utama; PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan PT Jatim Grha Utama (Perseroda); PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan dengan PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim; Kadin Jateng dengan Kadin Jatim; dan Hipmi Jateng dengan Hipmi Jatim.

"MoU (nota kesepahaman) ini akan segera kita tindaklanjuti, tidak hanya dengan antar OPD-nya (Organisasi Perangkat daerah) tetapi juga dengan beberapa BUMD, Kadin, dan Hipmi. Sehingga di dua provinsi ini akan timbul ekonomi baru di beberapa sektor," papar Luthfi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kerja sama kedua provinsi tersebut merupakan salah satu bentuk collaborative government (pemerintahan kolaboratif). Ia berharap kerja sama ini mampu memperkuat ekonomi di kedua provinsi tersebut.

Luthfi menambahkan, terdapat sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikolaborasikan. Salah satunya, pemenuhan kebutuhan susu di Jawa Tengah yang diambil dari Jawa Timur. Kemudian, gula kristal yang banyak diproduksi di Banyumas Jawa Tengah sangat dibutuhkan oleh Jawa Timur.

"Kerja sama dan kolaborasi ini dalam rangka memperkuat posisi Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka mendukung kebijakan Presiden, serta memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyatakan Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan pusatnya (punjere) nusantara. "Dhawuh Mbah Kiai Maimoen Zubair, Jawa Timur dan Jawa Tengah harus nyawiji

(bersatu). Jadi kalau Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) bilang puser, beliau bilang Jawa Timur dan Jawa Tengah itu punjere Indonesia," ucapnya.

Menurut Khofifah, kerja sama dan kolaborasi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan hal penting. Ia berharap seluruh elemen strategis di kedua provinsi tidak hanya tersambung secara institusional, tetapi juga dari sisi kemajuan bersama. Salah satunya dalam bidang perekonomian, di mana dua provinsi tersebut termasuk yang terbesar dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tentu, harapan kita adalah sinergi, sinergi, sinergi. Kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Banyak sektor-sektor yang potensinya besar di Jawa Tengah dan kita membutuhkan. Sebaliknya ada sektor yang Jawa Tengah masih membutuhkan dari Jawa Timur, ini bentuk sinergi dan kolaborasi," tutupnya.

Perusahaan Vietnam Bakal Masuk Jateng, Gubernur Luthfi Yakin Investasi Bisa Tembus Rp110 Triliun

Minggu, 25 Oktober 2026

Ika Tamara Dewi

<https://lingkartv.com/perusahaan-vietnam-bakal-masuk-jateng/>

BATANG, LINGKAR TV – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi optimis capaian investasi di wilayahnya bisa mencapai Rp110 triliun hingga akhir 2026. Sampai triwulan III tahun 2026, tercatat investasi sudah sekitar Rp72,54 triliun. Hal itu disampaikan saat acara Forum Investasi Jawa Tengah, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

“Sebentar lagi ada perusahaan dari Vietnam akan masuk. Kita optimis bahwa 2026 nanti bisa menyamai capaian tahun lalu, yaitu Rp110 triliun,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Optimisme tersebut bukan isapan jempol belaka. Berdasarkan data, investasi di Jawa Tengah pada triwulan I 2026 sebesar Rp23 triliun. Jumlah tersebut bertambah selama triwulan II 2026 sehingga pada akhir semester I 2026 sudah membukukan Rp59,94 triliun. Selanjutnya triwulan III 2026 sudah mencapai Rp72,54 triliun.

Kinerja tersebut, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait, dalam upaya menarik para investor asing dan dalam negeri untuk menanamkan investasi di Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan baik melalui forum bisnis dan investasi, kerja sama antardaerah, maupun sister province dan sister city dengan negara sahabat.

“Forum-forum bisnis dan investasi seperti ini dapat mempertemukan dunia usaha, kawasan industri, serta pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Salah satu contoh, kami punya Central Java Investment Business Forum (CJIBF), yang sehari bisa menghasilkan investasi sampai Rp19 triliun,” jelas Luthfi.

Jateng Siapkan 12 Kawasan Eksisting Baru

Hal itu juga didukung oleh peran kepala daerah yang bertindak sebagai manajer marketing, termasuk menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru di Jawa Tengah. Saat ini kawasan industri eksisting di Jateng ada sekitar tujuh tempat. Tersebar di Kota Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes. Kemudian sekitar 12 kawasan baru sedang disiapkan di berbagai daerah untuk menumbuhkan perekonomian baru.

“Kawasan industri penting untuk pertumbuhan ekonomi baru. Di Jawa Tengah sekarang pertumbuhan ekonomi sudah 5,80 persen, atau di atas rata-rata nasional,” ujar dia.

Maka dari itu, Gubernur Luthfi berharap Jawa Tengah terus menjadi tujuan investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berkat kinerja investasi yang positif tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori Figur Akselerator Kamajuan untuk kategori Investasi dan Penguatan Program Strategis Nasional. Penghargaan tersebut diberikan di tengah acara Forum Investasi Jawa Tengah.

Penghargaan itu, lanjut Luthfi, menjadi pemicu untuk lebih giat lagi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya. Dalam forum tersebut, Pangdam IV/Diponegoro Sudaryanto dan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan keamanan dan kondusivitas wilayah. Sebab, kondusivitas wilayah dan jaminan kepastian hukum, menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investor. (Hms/Rizky Syahrul – Lingkartv.com)

The Fed Diperkirakan Tahan Suku Bunga, Namun Peluang Kenaikan Masih Terbuka

Senin, 26 Oktober 2026 18:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/the-fed-diperkirakan-tahan-suku-bunga-namun-peluang-kenaikan-masih-terbuka>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan 27–28 Oktober 2026. Namun, meningkatnya tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang solid membuat pelaku pasar menilai jeda kenaikan suku bunga tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung lama.

Mengutip Reuters, Senin (26/10/2026), para pejabat The Fed telah memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan kembali menaikkan biaya pinjaman jangka pendek pada pertemuan pekan ini. Suku bunga diperkirakan tetap berada di kisaran 3,75%–4,00%.

Meski demikian, data ekonomi yang akan dirilis sehari setelah keputusan The Fed diperkirakan memperkuat alasan untuk kembali menaikkan suku bunga. Inflasi AS meningkat pada bulan lalu dan tekanan harga meluas, tidak hanya berasal dari kenaikan harga bahan bakar.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat pada kuartal terakhir. Penguatan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang solid serta lonjakan investasi bisnis seiring meningkatnya permintaan terhadap teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Di sisi lain, pasar tenaga kerja AS masih menunjukkan stabilitas. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,2% pada bulan lalu, sedangkan klaim tunjangan pengangguran mingguan berada pada level terendah sepanjang masa hidup Ketua The Fed Kevin Warsh.

Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, menilai data ekonomi sebenarnya telah mendukung kenaikan suku bunga.

"Menurut saya, data yang ada memang mendukung kenaikan suku bunga," ujar Bostjancic.

Ia menambahkan, data sejak pertemuan terakhir The Fed menunjukkan kondisi ekonomi dan konsumsi yang kuat, pasar tenaga kerja yang solid, serta inflasi yang memburuk.

"Ekonomi kuat, konsumen kuat, pasar tenaga kerja kuat, dan inflasi memburuk, arahnya justru bergerak ke arah yang salah," katanya.

Imbal Hasil Obligasi AS Jadi Pertimbangan The Fed

Menurut Bostjancic, kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury dalam beberapa pekan setelah kenaikan suku bunga pada September membuat para pejabat The Fed lebih berhati-hati.

Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun sempat mendekati level tertinggi dalam hampir 25 tahun. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperketat kondisi keuangan dan memperlambat perekonomian lebih besar daripada yang diinginkan bank sentral.

Kenaikan imbal hasil itu mendorong sejumlah pejabat The Fed, termasuk Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams dan Wakil Ketua The Fed Philip Jefferson, memberi sinyal bahwa bank sentral dapat menunggu data ekonomi tambahan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sinyal tersebut kemudian mengubah ekspektasi pasar keuangan. Berdasarkan perdagangan kontrak berjangka suku bunga hingga Jumat, pasar memperkirakan peluang The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan 27–28 Oktober mencapai 90%.

Ketua The Fed Dihadapkan pada Tekanan Politik

Keputusan suku bunga kali ini juga berlangsung menjelang pemilihan umum pada 3 November 2026, yang akan menentukan apakah Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump mampu mempertahankan kendali atas kedua kamar Kongres AS.

Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi Warsh. Ia perlu memastikan bahwa keputusan bank sentral tidak menimbulkan kesan dipengaruhi kepentingan politik.

Kepala Ekonom EY-Parthenon, Gregory Daco, mengatakan Warsh harus menjelaskan alasan di balik keputusan mempertahankan suku bunga tanpa mengurangi kredibilitas The Fed dalam mengendalikan inflasi.

"Ketua Warsh harus menghilangkan kesan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan politik dalam bentuk apa pun," kata Daco.

Menurut dia, keputusan The Fed berpotensi dianggap menguntungkan salah satu kubu politik oleh pihak lainnya. Isu keterjangkauan biaya hidup juga menjadi perhatian utama pemilih AS di tengah ketidakpuasan terhadap penanganan ekonomi oleh pemerintahan Trump.

Inflasi yang masih berlangsung dan kenaikan suku bunga turut berkontribusi terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Daco menilai Warsh juga perlu mempertahankan ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga berikutnya masih mungkin dilakukan.

"Jika Ketua Warsh tidak memberikan petunjuk apa pun atau pada dasarnya mengatakan bahwa The Fed sedang menunggu bukti lebih lanjut mengenai penurunan inflasi, hal itu akan menjadi sinyal bahwa The Fed tidak kredibel. Kondisi tersebut kemungkinan memicu lonjakan imbal hasil obligasi yang dampaknya terhadap perekonomian justru lebih besar daripada kenaikan suku bunga itu sendiri," ujarnya.

"Ia harus menjelaskan mengapa suku bunga ditahan pada Oktober, tetapi menyampaikannya dengan cara yang tidak merusak kredibilitas The Fed dalam memerangi inflasi," tambah Daco.

Namun, Warsh dikenal kurang menyukai pemberian panduan kebijakan moneter ke depan atau forward guidance. Karena itu, pelaku pasar memperkirakan pernyataannya akan tetap terbatas.

Investor akan mencermati pernyataan resmi The Fed setelah rapat maupun konferensi pers Warsh. Perhatian terutama tertuju pada penilaiannya terhadap kondisi keuangan dan risiko inflasi yang telah berada di atas target bank sentral selama lebih dari lima tahun.

Peluang Kenaikan Suku Bunga Masih Terbuka

Pergerakan imbal hasil obligasi AS yang mereda pada akhir pekan lalu turut mempersulit pengambilan keputusan The Fed. Penurunan tersebut terjadi di tengah aksi jual saham yang dipicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan permintaan teknologi AI.

Warsh sebelumnya beberapa kali menyoroti pengetatan kondisi keuangan sebagai faktor yang dapat mengurangi kebutuhan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan.

Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang dapat mendukung keputusan untuk menahan suku bunga. Salah satunya adalah pertumbuhan upah per jam yang selama enam bulan terakhir berada di bawah inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak memberikan tambahan tekanan inflasi yang signifikan.

Notulen rapat The Fed pada September juga menunjukkan bahwa sejumlah pejabat memandang kenaikan suku bunga saat itu sebagai langkah antisipasi terhadap risiko inflasi yang meningkat. Risiko tersebut berpotensi mereda, terutama apabila konflik di Timur Tengah dapat diselesaikan.

Meski demikian, Kepala Ekonom AS BMO, Scott Anderson, menilai keputusan The Fed pada Oktober masih cukup berimbang.

"Saya menilai keputusan pada pertemuan Oktober akan jauh lebih ketat daripada yang diperkirakan pasar," kata Anderson.

Ia memperkirakan setidaknya satu pejabat akan menyatakan perbedaan pendapat terhadap keputusan mayoritas yang menahan suku bunga. Salah satu yang berpotensi mengambil sikap tersebut adalah Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, yang dikenal memiliki pandangan lebih hawkish atau cenderung mendukung kebijakan moneter ketat.

Anderson sendiri memperkirakan The Fed masih akan menaikkan suku bunga sebanyak dua kali lagi untuk menekan inflasi.

The Fed menargetkan inflasi sebesar 2% berdasarkan perubahan tahunan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures (PCE).

Data inflasi PCE September dijadwalkan terbit pada Kamis. Para ekonom memperkirakan inflasi meningkat menjadi 3,6% secara tahunan, dari 3,4% pada Agustus.

Kenaikan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh harga bensin yang meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Namun, tekanan harga juga meluas ke sejumlah komponen lain, termasuk tiket pesawat, biaya sewa tempat tinggal, dan komputer.

Anderson menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan The Fed dalam mengendalikan inflasi belum selesai.

"Saya menilai ada alasan yang cukup kuat bahwa mereka masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan," ujarnya.

Ekspor Thailand Melonjak 24% pada September 2026, Lampau Ekspektasi Pasar

Senin, 26 Oktober 2026 11:31 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-thailand-melonjak-24-pada-september-2026-lampaui-ekspektasi-pasar>

KONTAN.CO.ID - Ekspor Thailand tumbuh 24% secara tahunan pada September 2026, melampaui perkiraan pasar.

Kenaikan ini ditopang permintaan global terhadap produk elektronik, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta peningkatan pengiriman komoditas pertanian dan makanan.

Kementerian Perdagangan Thailand pada Senin (26/10/2026) melaporkan, nilai ekspor yang telah melewati proses kepabeanan meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi analis dalam jajak pendapat Reuters sebesar 17,85%.

Meski demikian, laju pertumbuhan ekspor sedikit melambat dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 24,3%. Dengan capaian September, ekspor Thailand telah tumbuh selama 27 bulan berturut-turut.

Secara kumulatif, ekspor Thailand pada Januari–September 2026 meningkat 19,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kementerian Perdagangan Thailand juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekspor sepanjang 2026 menjadi 19%, dari perkiraan sebelumnya sebesar 15%.

Kepala Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan Kementerian Perdagangan Thailand, Nantapong Chiralerspong, mengatakan ekspor negara tersebut pada 2027 diperkirakan tumbuh lebih moderat, yakni sekitar 2%–4%.

Dari sisi negara tujuan, ekspor Thailand ke Amerika Serikat (AS), pasar terbesar negara tersebut, melonjak 50,1% secara tahunan pada September. Sementara itu, pengiriman barang ke China meningkat 18,4%.

Namun, pertumbuhan ekspor yang kuat juga diikuti lonjakan impor. Impor Thailand mencatatkan kenaikan tahunan sebesar 50,4% pada September, menjadi pertumbuhan tertinggi yang tercatat dalam data tersebut. Angka ini jauh melampaui perkiraan analis sebesar 31,25%.

Lonjakan impor tersebut turut memperlebar defisit perdagangan Thailand menjadi US\$ 5,86 miliar pada September. Angka itu lebih besar dibandingkan perkiraan defisit sebesar US\$ 1,83 miliar.

Kinerja perdagangan Thailand pada September menunjukkan kuatnya permintaan terhadap produk ekspor, terutama elektronik dan komoditas pertanian.

Namun, peningkatan impor yang lebih tinggi juga menjadi perhatian karena berkontribusi terhadap pelebaran defisit perdagangan negara tersebut.

Dolar AS Melemah Senin (26/10), Pasar Menanti Keputusan Lima Bank Sentral Pekan Ini

Senin, 26 Oktober 2026 09:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-melemah-senin-2610-pasar-menanti-keputusan-lima-bank-sentral-pekan-ini>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang utama dunia cenderung terbatas pada perdagangan Senin (26/10/2026), menjelang pekan yang padat dengan keputusan kebijakan bank sentral dan laporan kinerja perusahaan.

Pelemahan harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) turut menekan dolar AS.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent terkoreksi lebih dari 1% ke kisaran US\$ 115 per barel setelah mencapai level tertinggi dalam enam bulan pada pekan lalu.

Koreksi terjadi setelah muncul laporan bahwa mediator Qatar berada di Teheran pada Minggu untuk mengupayakan penurunan ketegangan regional melalui koordinasi dengan AS.

Di pasar obligasi, US Treasury masih mempertahankan sebagian besar penguatan yang terjadi dalam reli aset aman sebelumnya.

Kekhawatiran inflasi akibat tingginya harga minyak masih membayangi pasar, sementara aksi jual saham teknologi yang dipicu kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun ke 4,974%, sedangkan tenor 30 tahun berada di 5,299%. Keduanya bertahan di sekitar level terendah dalam satu bulan.

Kepala strategi valuta asing National Australia Bank, Ray Attrill, menilai pergerakan pasar obligasi AS kini menjadi faktor penting yang menentukan arah dolar.

Menurut dia, penurunan imbal hasil US Treasury dan menyempitnya selisih imbal hasil antara obligasi AS dan negara-negara utama kelompok G10 telah mengurangi daya tarik dolar AS.

Di pasar valuta asing, euro menguat 0,16% terhadap dolar AS menjadi US\$ 1,122. Penguatan euro turut ditopang kelegaan pasar setelah Prancis terhindar dari penurunan peringkat kredit oleh Moody's meskipun menghadapi gejolak sosial.

Pound sterling juga naik 0,1% menjadi US\$ 1,3385. Sebaliknya, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama melemah tipis ke 101,64.

Dolar Australia turun 0,04% menjadi US\$ 0,7030, sementara dolar Selandia Baru menguat 0,06% menjadi US\$ 0,572. Yen Jepang relatif stabil di level 156,920 per dolar AS.

Keputusan Lima Bank Sentral Jadi Sorotan

Perhatian investor selanjutnya tertuju pada keputusan lima bank sentral utama dunia yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Federal Reserve (The Fed), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank of Japan (BOJ) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan.

Sementara itu, pasar memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of Canada dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).

Kepala riset Pepperstone Chris Weston menilai, arahan kebijakan atau forward guidance dari bank sentral berpotensi lebih menentukan pergerakan pasar dibandingkan keputusan suku bunga itu sendiri.

Menurut dia, keputusan bank sentral sebagian besar telah diperhitungkan oleh pasar. Karena itu, investor akan mencermati sinyal mengenai kebijakan pada pertemuan berikutnya dan kemungkinan perubahan ekspektasi suku bunga jangka pendek.

Dari AS, sejumlah data ekonomi juga akan menjadi perhatian, termasuk indeks kepercayaan konsumen Oktober, indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE), dan klaim pengangguran. Data tersebut berpotensi memberikan petunjuk tambahan mengenai arah kebijakan The Fed.

Di pasar komoditas, harga emas spot turun tipis menjadi US\$ 3.986,16 per ons troy. Sementara itu, di pasar kripto, Bitcoin melemah 0,6% menjadi US\$ 79.925,84 dan Ether turun 1,1% ke US\$ 2.317,33.

Rupiah dan Peso Filipina Jadi Mata Uang Asia Paling Loyo terhadap Dolar AS

Senin, 26 Oktober 2026 09:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-dan-peso-filipina-jadi-mata-uang-asia-paling-loyo-terhadap-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar rupiah dan peso Filipina menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terdalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (26/10/2026), di tengah pergerakan mata uang kawasan yang cenderung terbatas.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.11 GMT, rupiah berada di level Rp 18.087 per dolar AS, melemah 0,26% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 18.040 per dolar AS.

Sementara itu, peso Filipina turun 0,36% ke level 63,788 per dolar AS dari posisi sebelumnya 63,561 per dolar AS. Pelemahan kedua mata uang tersebut menjadi yang terdalam di antara sejumlah mata uang Asia yang tercantum dalam data Reuters.

Secara kumulatif sepanjang 2026, rupiah telah melemah 7,83% dibandingkan posisi akhir 2025 di level Rp 16.670 per dolar AS.

Angka tersebut sedikit lebih besar dibandingkan depresiasi peso Filipina yang mencapai 7,82% dari level 58,800 per dolar AS pada akhir tahun lalu.

Sejumlah mata uang Asia lainnya juga bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Baht Thailand melemah 0,12% ke level 33,780 per dolar AS, sedangkan won Korea Selatan turun tipis 0,01% menjadi 1.323,7 per dolar AS.

Sebaliknya, yen Jepang menguat 0,09% ke level 156,720 per dolar AS. Dolar Singapura turun tipis 0,01% ke 1,278 per dolar AS, sementara ringgit Malaysia menguat 0,02% menjadi 4,082 per dolar AS.

Yuan China juga menguat tipis 0,01% ke level 6,670 per dolar AS. Adapun dolar Taiwan tercatat di level 32,508 per dolar AS, sedangkan rupee India relatif stabil di 94,940 per dolar AS.

Secara tahunan, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan, yakni 8,82% terhadap dolar AS. Yuan China juga menguat 4,77%, sementara dolar Singapura naik 0,59%.

Di sisi lain, depresiasi rupiah dan peso Filipina sepanjang tahun ini masing-masing mencapai 7,83% dan 7,82%. Baht Thailand melemah 6,90%, sedangkan rupee India turun 5,34% dibandingkan posisi akhir 2025.

Destry Beber Alasan Defisit Neraca Pembayaran & Pelemahan Rupiah

Senin, 26 Oktober 2026 18:40 WIB

Lisa Listiani

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125792/destry-beber-alasan-defisit-neraca-pembayaran-pelemahan-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia membeberkan alasan neraca pembayaran Indonesia yang masih mengalami defisit dan juga rupiah yang terus mencatatkan pelemahan.

Menurutnya salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia berasal dari sektor eksternal yang menyebabkan defisit transaksi neraca berjalan yang mencapai di atas 3%.

“Bahkan di kuartal kedua kemarin defisit untuk transaksi perjalanan kita, CAD defisit kita mencapai di atas 3%. Nah ini yang menjadi challenge yaitu bagaimana ekspor tadi bisa tentu diperkuat,” kata Destry dalam Danantara Technology Investment Forum, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, impor energi yang cukup besar membuat defisit neraca pembayaran menjadi semakin membengkak. Hal inilah yang memberikan efek domino terutama pada pelemahan rupiah.

“Sehingga ujung-ujungnya kemana? Kenanya ke currency kita,” kata Destry.

Sehingga, menurut Destry, strategi import substitution (alternatif barang impor) dan export promotion (promosi ekspor) menjadi kunci untuk memperkecil defisit neraca pembayaran, bahkan mengubahnya menjadi surplus.

“Nah dalam hal ini kami juga di Bank Indonesia berusaha untuk mendiversifikasi penggunaan export untuk transaksi, perdagangan dan investasi kita,” katanya.

Menurut Destry, BI menggunakan kebijakan ataupun mekanisme local currency transaction (LCT) yang saat ini sudah diterapkan dengan 6-7 negara dengan mata uang lokal masing-masing.

Menurut Destry, hal ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Dolar. Saat ini, total transaksi LCT telah meningkat menjadi US\$55 miliar dari sebelumnya US\$25 miliar.

“Mainly adalah dari China. China itu sangat besar. Nah dengan adanya diversifikasi dari penggunaan mata uang untuk transaksi ekspor, impor ataupun investasi tentu nantinya ini akan mengurangi penggunaan juga US\$ sehingga juga nilai tukar kita juga akan bisa lebih balance,” kata Destry.

BI mengumumkan NPI tercatat defisit US\$ 0,9 miliar pada kuartal II-2026. Jauh lebih sedikit ketimbang kuartal sebelumnya yang minus US\$ 9.1 miliar.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa NPI sudah berada di zona negatif selama tiga kuartal berturut-turut.

Berdasarkan komponen pembentuknya, transaksi berjalan tercatat defisit US\$ 12,5 miliar atau 3,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh melebar ketimbang defisit kuartal sebelumnya yakni US\$ 3,6 miliar (1% PDB).

"Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan non-migas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia.

Restrukturisasi BUMN, Impairment Tembus Rp135 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 17:00 WIB

Muhammad Fikri

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125781/restrukturisasi-bumn-impairment-tembus-rp135-triliun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan nilai penurunan nilai aset atau impairment dalam proses pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menembus Rp135 triliun.

Besaran impairment tersebut berpotensi bertambah seiring dengan berlanjutnya restrukturisasi perusahaan pelat merah.

Dalam proses pembenahan tersebut, Danantara masih harus menyelesaikan penataan sejumlah perusahaan, terutama BUMN Karya.

"Rp135 triliun yang kita impair akibat pembukuan yang tidak benar dilakukan selama ini," kata Dony kepada awak media, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Dony mengatakan, perusahaan-perusahaan yang belum dalam kondisi baik akan dikonsultasikan dan diperbaiki sebelum dilakukan konsolidasi lebih lanjut.

"Masih ada lagi ke depannya yang belum. Karya-karya kan belum, karya baru akan dikonsolidasikan," ujar Dony.

Menurut dia, transformasi BUMN dilakukan secara fundamental, tidak hanya melalui konsolidasi perusahaan, tetapi juga perbaikan tata kelola (governance).

Danantara turut melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam upaya pembenahan tersebut.

Dony mengatakan, perbaikan tata kelola juga dilakukan melalui pendekatan pencegahan, termasuk penyusunan aturan untuk mencegah persoalan serupa terulang pada masa mendatang.

Impairment merupakan penurunan nilai tercatat aset ketika nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut lebih rendah dibandingkan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu menyesuaikan nilai asetnya agar mencerminkan nilai yang dapat dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset.

Mengacu pada standar akuntansi internasional IAS 36 tentang Impairment of Assets, nilai yang dapat dipulihkan (recoverable amount) ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset.

Nilai pakai dihitung berdasarkan estimasi arus kas masa depan yang dihasilkan aset tersebut.

Dengan demikian, impairment tidak selalu berarti perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar nilai penurunan aset.

Penyesuaian tersebut merupakan pengakuan akuntansi atas berkurangnya nilai aset yang dapat dipulihkan dan dapat memengaruhi laba rugi perusahaan pada periode pengakuannya.

Dalam konteks restrukturisasi BUMN, impairment menjadi bagian dari upaya membersihkan dan menyesuaikan pembukuan agar kondisi keuangan perusahaan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.

Penyesuaian tersebut juga dapat mengungkap persoalan investasi yang tidak menghasilkan imbal hasil sesuai harapan maupun aset yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis sebagaimana sebelumnya.

Dia menegaskan, perbaikan perusahaan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggabungkan entitas usaha. Perusahaan perlu disehatkan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap konsolidasi.

“Karena kalau dimergerkan kondisinya belum betul-betul baik, nanti jadi debat. Jadi kita perbaiki dulu,” katanya.

Selain penataan keuangan, Danantara juga akan melanjutkan penyederhanaan jumlah perusahaan BUMN.

Perusahaan yang dipertahankan diharapkan menjadi entitas yang lebih kuat dan mampu menjadi motor pembangunan ke depan.

Menkeu: Penerbitan SBN Masih Sesuai Target Meski Defisit Melebar

Senin, 26 Oktober 2026 16:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125775/menkeu-penerbitan-sbn-masih-sesuai-target-meski-defisit-melebar>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga akhir tahun masih akan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Sesuai target kita menuju kan sudah kita umumkan, target defisit kita, di 2,85% dari PDB itu udah ada angka penerbitannya kan, kita bekerja dengan target segitu,” kata Suahasil ditemui seusai Danantara Technology Investment Forum, Senin (26/10/2026).

Pernyataan ini disampaikan di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang makin melebar.

Mengingatkan saja, defisit APBN pada bulan September 2026 mencapai Rp319 triliun atau sebesar 1,24% dari PDB. Angka tersebut melonjak dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,9% terhadap PDB.

Sementara, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 59,4% dari target pembiayaan utang bersih tahun ini sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika pembiayaan utang mencapai Rp502,9 triliun.

Pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, berbanding terbalik dengan target pembiayaan pinjaman netto sebesar Rp32,7 triliun.

Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun.

Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.

Rupiah Tutup Pasar Spot di Level Rp18.124/US\$

Senin, 26 Oktober 2026 15:57 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125778/rupiah-tutup-pasar-spot-di-level-rp18-124-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Senin (26/10/2026) melemah 0,37% ke posisi Rp18.124/US\$, sejalan dengan tekanan yang terjadi pada mata uang Asia. Sentimen soal penurunan klasifikasi pasar saham RI menjadi biang keladi. Aksi jual tak tertahankan di semua aset, pasar surat utang dan saham.

Di pasar surat utang, sebagian besar tenor mencatat kenaikan yield. Tenor 1 tahun naik 1,4 bps jadi 6,79%, disusul tenor 2 tahun naik 2,8 bps jadi 6,92%. Sementara tenor 3 tahun naik 1,5 bps jadi 7,09%. Begitu juga tenor 10 tahun naik 1,3 bps jadi 7,46%. Bahkan yield tenor 9 tahun berada di 7,5% setelah naik 2,4 bps, jadi lebih tinggi daripada yield tenor 10 tahun.

Investor asing juga tercatat telah melepas surat utang Indonesia senilai bersih US\$203 juta pada 21 Oktober, berdasarkan data Kementerian Keuangan.

“Kinerja surat utang pemerintah RI dalam jangka pendek akan bergantung pada stabilitas rupiah, arus dana asing, dan perkembangan suku bunga global,” ujar Handy Yunianto, Kepala Riset Fixed-Income Mandiri Sekuritas, dalam catatannya seperti dikutip Bloomberg News.

Di sisi lain, arus keluar modal di pasar saham juga masih terjadi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sekitar 1% di tengah berlanjutnya aksi jual investor asing, sempat menyentuh posisi 5.384 kala penutupan perdagangan Sesi I hari ini. Data bursa juga menunjukkan investor global mencatatkan penjualan bersih saham sebesar US\$71 juta di hari Jumat lalu.

Sumber tekanan rupiah tak cuma datang dari ketidakpastian rencana MSCI yang berencana menurunkan klasifikasi pasar saham RI jadi Standalone Market, tapi juga kenaikan harga minyak mentah yang kembali berada di kisaran US\$115/barel.

Harga minyak yang bertahan tinggi jadi risiko tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia, sebab inflasi impor menjadi hal yang tak terhindarkan.

Memang, data inflasi terakhir masih terjaga di kisaran target Bank Indonesia (BI), namun posisi 3,28% berada di rentang atas kisaran target itu sendiri 1,5%-3,5%. Di sisi lain, gerak rupiah ke depan masih akan diliputi oleh keputusan suku bunga acuan Federal Reserve dan perkembangan inflasi AS.

Investor agaknya cenderung berhati-hati jelang rapat Federal Open Market Committee (FOMC). Jika The Fed mempertahankan suku bunga dengan nada hawkish, yield aset berdenominasi dolar AS diperkirakan akan tetap tinggi sehingga daya tarik aset negara berkembang, termasuk Indonesia bisa jadi makin terbatas.

Di tengah tekanan ini, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menilai volatilitas yang terjadi masih tergolong biasa. Ia mengatakan BI akan terus memonitor pergerakan penawaran dan permintaan nilai tukar.

Sementara itu, di pasar Asia pergerakan mata uang Asia cukup beragam dengan kecenderungan melemah. Hanya won Korea Selatan dan yuan offshore dan yuan China yang bertahan di zona hijau tertopang oleh kekuatan struktur ekonomi domestiknya.

Pergerakan mata uang Asia hari ini tertekan harga minyak yang berpotensi mengerek inflasi global. Bloomberg Economics menilai inflasi 2026 diperkirakan menyentuh 4,4%, jika harga minyak bertahan di atas level US\$100/barel.

Di tengah kondisi ini, bank sentral negara-negara di Asia diperkirakan menghadapi tekanan. Antara menekan laju inflasi yang kian membandel, dengan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah iklim yang tidak sepenuhnya kondusif.

Mayoritas Harga Pangan Turun, tapi Cabai-Beras Masih Tinggi

Senin, 26 Oktober 2026 09:10 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125726/mayoritas-harga-pangan-turun-tapi-cabai-beras-masih-tinggi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan nasional hari ini, Senin (26/10/2026) mengalami penurunan, tapi, harganya masih tinggi dan di atas patokan pemerintah.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 8.20 WIB, harga cabai merah keriting turun 1,43% atau Rp1.250 menjadi Rp86.100/kg dan cabai rawit hijau turun 0,44% atau Rp350 menjadi Rp79.400/kg. Namun, harga keduanya masih cukup jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yang dipatok masing-masing sebesar Rp55.000/kg.

Kemudian, harga cabai rawit merah turun 0,96% atau Rp1.000 menjadi Rp102.950/kg. Namun, harga juga masih terpampang jauh di atas HET pemerintah yang dipatok sebesar Rp57.000/kg. Sementara itu, harga cabai merah besar naik 0,73% atau Rp550 menjadi Rp75.600/kg.

Harga beras kualitas bawah I tidak berubah atau bertahan di Rp14.900/kg. Beras kualitas bawah II bertahan di Rp14.750/kg, serta beras kualitas medium I bertahan di Rp16.650/kg. Beras kualitas medium II juga tetap di Rp16.450/kg.

Hanya beras kualitas super I yang mengalami kenaikan 0,28% atau Rp50 menjadi Rp18.000/kg. Seluruh jenis beras tersebut masih berada di atas HET pemerintah yang di patok Rp12.500 untuk kualitas bawah/SPHP, Rp13.500/kg untuk medum, dan Rp14.900/kg untuk premium.

Lalu, harga daging ayam ras segar turun 1,6% atau Rp650 menjadi Rp39.950/kg. Daging sapi kualitas 1 juga turun 0,03% atau Rp50 menjadi Rp152.550/kg, serta daging sapi kualitas 2 turun 0,07% atau Rp100 menjadi Rp143.500/kg.

Harga telur ayam ras segar turun 0,34% atau Rp100 menjadi Rp29.550/kg.

Harga minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,2% atau Rp50 menjadi Rp24.350/kg, dan harga minyak goreng kemasan bermerek 2 bertahan di Rp23.600/kg. Namun, minyak goreng curah naik 0,25% atau Rp50 menjadi Rp20.350/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 0,13% atau Rp50 menjadi Rp37.100/kg. Bawang putih ukuran sedang juga turun 0,13% atau Rp50 menjadi Rp38.450/kg.

Harga gula pasir kualitas premium bertahan di Rp20.550/kg. Sementara, harga gula pasir lokal naik 0,26% atau Rp50 menjadi Rp19.400/kg.

Harga Cabai Tembus Rp 100.000 per Kg, Bapanas Genjot Distribusi Antar Daerah

Senin, 26 Oktober 2026 18:05 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/harga-cabai-tembus-rp-100000-per-kg-bapanas-genjot-distribusi-antar-daerah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah memperkuat distribusi cabai rawit merah dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pasalnya, harga cabai rawit merah masih menembus Rp 100.000 per kilogram (kg) di sejumlah pasar, meski rata-rata nasional turun 0,62% menjadi Rp 92.111 per kg pada pekan ketiga Oktober 2026 dari Rp 92.685 per kg pada pekan sebelumnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan mengatakan, harga cabai rawit merah di sejumlah daerah masih menjadi perhatian pemerintah karena harga setempat dapat lebih tinggi daripada rata-rata nasional. “Penurunan ini belum membuat harganya ideal, sehingga cabai rawit tetap menjadi prioritas pengendalian kami,” ujar Hermawan kepada KONTAN, Senin (26/10/2026).

Selain cabai rawit merah, pergerakan harga sejumlah komoditas pangan pada pekan ketiga Oktober juga bervariasi. Harga cabai merah keriting turun 0,34% menjadi Rp 78.665 per kg dari sekitar Rp 78.933 per kg pada pekan sebelumnya.

Harga daging ayam ras turun 1,13% menjadi Rp 39.986 per kg dari sekitar Rp 40.443 per kg, sedangkan telur ayam ras turun 0,29% menjadi Rp 28.371 per kg dari sekitar Rp 28.454 per kg.

Penurunan juga terjadi pada harga bawang putih bonggol sebesar 0,25% menjadi Rp 36.504 per kg dari sekitar Rp 36.596 per kg. Harga gula konsumsi turun 0,70% menjadi Rp 18.844 per kg dari sekitar Rp 18.977 per kg, sementara Minyakita turun 0,01% menjadi Rp 16.866 per liter.

Sebaliknya, harga cabai merah besar naik 4,87% menjadi Rp 65.637 per kg dari sekitar Rp 62.589 per kg. Harga bawang merah meningkat 0,34% menjadi Rp 34.367 per kg dari sekitar Rp 34.251 per kg. Adapun harga daging sapi murni relatif stabil di Rp 145.743 per kg, naik 0,03% dari sekitar Rp 145.699 per kg.

Pemerintah mendorong distribusi cabai dari daerah surplus ke wilayah berharga tinggi melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan kerja sama antardaerah. Hermawan menyebut kesinambungan panen dan pemerataan distribusi menjadi tantangan dalam menjaga harga cabai dan bawang.

“Pasokan pangan nasional dalam kondisi terjaga. Untuk cabai dan bawang, tantangan utamanya adalah menjaga kesinambungan panen dan pemerataan distribusi antardaerah,” ungkap Hermawan.

Selain distribusi antardaerah, Bapanas menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Hingga 23 Oktober 2026, GPM telah terlaksana sebanyak 11.822 kali di

38 provinsi. Pada 25–31 Oktober 2026, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di 140 lokasi, terutama di daerah dengan harga pangan relatif tinggi.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dari target tambahan 200.000 ton, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 103.000 ton dan diupayakan tuntas pada 20 November 2026. Selain itu, pemerintah menyalurkan jagung SPHP bagi peternak untuk membantu menjaga biaya pakan.

Hermawan menegaskan, pengendalian harga pangan tidak cukup hanya dengan menjaga ketersediaan stok, tetapi juga perlu memastikan distribusi berjalan merata dan harga tetap terjangkau.

“Pengendalian inflasi pangan bukan hanya soal stok yang cukup. Pangan juga harus tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan harga terjangkau bagi masyarakat, dan tetap memberi keuntungan yang layak bagi petani dan peternak,” pungkasnya.

Kemenkeu Naikkan Batas Utang Pemerintah Daerah Jadi 0,18% PDB pada 2027

Senin, 26 Oktober 2026 17:05 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-naikkan-batas-utang-pemerintah-daerah-jadi-018-pdb-pada-2027>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menaikkan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang pemerintah daerah menjadi 0,18% dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) pada Tahun Anggaran 2027.

Ketentuan ini meningkat dibandingkan dengan batas yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026 sebesar 0,11% dari proyeksi PDB.

Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027.

Dalam Pasal 5 beleid tersebut, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 0,18% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027.

Pembiayaan utang daerah ini juga mencakup pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

Sebagai perbandingan, PMK Nomor 101 Tahun 2025 menetapkan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar 0,11% dari proyeksi PDB.

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 0,07 poin persentase dalam batas kumulatif pembiayaan utang daerah pada 2027.

Batas Defisit APBD Tetap 2,5%

Meski batas kumulatif pembiayaan utang daerah meningkat, pemerintah tetap mempertahankan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah.

Batas ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah juga tetap menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah sebesar 0,18% dari proyeksi PDB pada 2027.

Pemda Harus Penuhi Syarat Jika Defisit Melampaui Batas

Beleid ini juga mengatur persyaratan bagi pemerintah daerah yang merencanakan defisit APBD melebihi batas maksimal yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 7, pelampauan batas maksimal defisit APBD harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah ketentuan, termasuk batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang daerah yang tidak terlampaui.

Selain itu, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah harus paling sedikit 2,5.

Jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pembiayaan utang yang akan ditarik juga tidak boleh melampaui 75% dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Persyaratan lainnya berkaitan dengan jenis pembiayaan utang yang digunakan, sisa masa jabatan kepala daerah, serta pertimbangan sesuai kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan membayar dan kapasitas fiskal daerah.

Peraturan baru tersebut juga mengatur dokumen yang harus disampaikan kepala daerah apabila mengajukan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD.

Dalam Pasal 8, pemerintah daerah wajib menyampaikan sejumlah dokumen, termasuk laporan realisasi anggaran, rancangan peraturan daerah tentang APBD, rencana penarikan pembiayaan utang, serta laporan posisi kumulatif pembiayaan utang dan kewajiban pembayaran kembali.

Dibandingkan dengan aturan sebelumnya, PMK Nomor 76 Tahun 2026 secara eksplisit menambahkan rancangan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD beserta Lampiran I sampai dengan akun subbrincian level 6 sebagai salah satu dokumen permohonan.

Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan batas maksimal defisit paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pemerintah daerah juga tetap diwajibkan melaporkan posisi kumulatif pembiayaan utang daerah dan kewajiban pembayaran kembali setiap semester.

Berdasarkan Pasal 12, laporan semester I Tahun 2027 disampaikan paling lambat 31 Juli 2027. Sementara itu, laporan semester II Tahun 2027 wajib disampaikan paling lambat 31 Januari 2028.

Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan hingga batas waktu tersebut dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menkeu Suahasil Nazara Buka Peluang Defisit APBD 2027 Bisa Lampaui Batas

Senin, 26 Oktober 2026 15:36 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-suahasil-nazara-buka-peluang-defisit-apbd-2027-bisa-lampaui-batas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah daerah (pemda) dapat menganggarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 lebih dari 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah.

Namun, rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu). Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada 8 Oktober 2026 oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027.

Dalam Pasal 3, pemerintah menetapkan batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2027 sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah pada tahun yang sama.

Ketentuan ini menjadi pedoman bagi pemda dalam menetapkan APBD 2027 sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

"Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2027," bunyi Pasal 3 beleid tersebut, dikutip Senin (26/10).

Meski demikian, Pasal 7 mengatur bahwa pemda yang merencanakan defisit APBD melampaui batas tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah persyaratan.

Pertama, batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah tidak boleh melampaui 0,18% dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027.

Kedua, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah juga tidak boleh melampaui 0,18% dari proyeksi PDB.

Ketiga, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit sebesar 2,5.

Keempat, jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak boleh melampaui 75% dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Selain itu, rencana pembiayaan utang daerah harus memenuhi ketentuan pertimbangan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan jenis pembiayaan dan jangka waktunya.

Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan membayar dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam Pasal 8, kepala daerah yang merencanakan defisit APBD melampaui batas maksimal harus menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan peraturan daerah

mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen, antara lain laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 dan 2026, rancangan APBD 2027, rencana penarikan pembiayaan utang daerah beserta jadwal pembayaran kembali, serta laporan posisi kumulatif utang dan kewajiban pembayaran kembali.

Berdasarkan Pasal 9, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 14 hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Apabila permohonan ditolak, kepala daerah masih dapat mengajukan kembali permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD, sepanjang rancangan peraturan daerah mengenai APBD belum dievaluasi.

Persetujuan atau penolakan Menteri Keuangan tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur.

Danantara Ungkap 52% BUMN Merugi, Total Kerugian Rp 20 Triliun Per Tahun

Senin, 26 Oktober 2026 15:06 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/danantara-ungkap-52-bumn-merugi-total-kerugian-rp-20-triliun-per-tahun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Chief Operating Officer (COO) Danantara Donny Oskaria blak-blakan terkait kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum dilakukan restrukturisasi.

Donny menyebut sebanyak 52% dari 1.074 perusahaan pelat merah mengalami kerugian di setiap tahun. Angka kerugiannya mencapai Rp 20 triliun per tahun.

"Kami menemukan bahwa 52% dari 1.074 perusahaan tersebut mengalami kerugian. Total kerugiannya mencapai Rp 20 triliun per tahun atau setara US\$ 1,5 miliar setiap tahun," kata Donny dalam Danantara TIIF 2026, Senin (26/10/2026).

Selain itu, Danantara juga menemukan kerugian sekitar US\$ 2 miliar setiap tahun karena inefisiensi yang ditimbulkan oleh transaksi perusahaan berlapis.

"Artinya, secara keseluruhan terdapat potensi penghematan sekitar US\$ 3,5 miliar per tahun apabila perusahaan-perusahaan yang merugi dan struktur transaksi yang tidak efisien tersebut dapat ditangani," jelas Donny.

Danantara juga menemukan adanya kumulasi utang yang tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan pelat merah.

Danantara mencatat ada lebih dari 1.000 perusahaan tersebut memiliki berbagai klaim dan kewajiban satu sama lain.

"Kami juga menemukan lebih dari 500 perkara di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan, di Telkom saja, pada saat itu terdapat 157 perkara," urai Donny.

Untuk itu, Danantara berupaya melakukan transformasi besar-besaran terhadap perusahaan negara, melalui berbagai kebijakan salah satunya restrukturisasi BUMN.

Menurut Donny, Danantara akan berfokus kepada perusahaan-perusahaan negara yang memberikan imbal hasil maksimal kepada negara.

"Saya ingin menegaskan bahwa Danantara Indonesia hanya akan bertahan apabila kami mampu mengelola BUMN dengan baik. Jika kami gagal mengelola BUMN, keberlangsungan Danantara Indonesia juga akan terancam," tandas Donny.

Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur BI: Bappenas Perlu Susun Rencana Jangka Panjang

Senin, 26 Oktober 2026 14:48 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/pacu-pertumbuhan-ekonomi-gubernur-bi-bappenas-perlu-susun-rencana-jangka-panjang>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Menurut Destry, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Asia. Namun, potensi tersebut perlu ditopang perencanaan pembangunan yang terarah dan tidak terfragmentasi.

“Jadi kita harus mempunyai memang suatu rencana, mungkin Pak Rachmat, Pak Menteri PPN/Bappenas, bisa membuat rencana yang jangka panjang. Jadi rencana itu tidak sepotong-potong untuk mencapai suatu sustainable growth,” ujar Destry dalam agenda Technology Innovation Investment Forkum Danantara 2026, Senin (26/10/2026).

Destry mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya manusia dan kekayaan alam yang menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah juga perlu mengantisipasi perubahan lanskap perdagangan dan investasi akibat dinamika geopolitik serta perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Destry menekankan, perubahan tersebut turut memengaruhi daya saing antarnegara. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonominya agar mampu menjaga pertumbuhan dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan peran BI. Meskipun BI memiliki mandat menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, penciptaan pertumbuhan sektor riil serta lapangan kerja membutuhkan kontribusi seluruh pemangku kepentingan.

“Yang di belakang ini kan bukan tugas Bank Indonesia sendiri, tugas negara keseluruhan. Nah oleh karena itu, itu baru akan bisa tercapai kalau kita punya rencana jangka menengah, jangka panjang yang gede, itu kuncinya,” katanya.

Selain perencanaan jangka panjang, Destry juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Dalam hal ini, ia berharap, Danantara dapat berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi baru dan mendorong keterlibatan sektor swasta.

Destry menilai, Danantara memiliki peran strategis untuk membuka peluang proyek-proyek potensial sekaligus meningkatkan kepercayaan sektor swasta agar bersedia berinvestasi bersama.

“Danantara ini akan memainkan peran yang sangat penting untuk bisa membuka, unlock proyek-proyek, kemudian beri private sector itu juga kesempatan dan confidence untuk melakukan investasi bersama,” ujarnya.

Destry berharap Indonesia kembali memperkuat industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Menurutnya, proses industrialisasi Indonesia sempat berkembang sejak akhir 1980-an hingga awal 1990-an, tetapi kemudian kembali bergantung pada komoditas.

Karena itu, penguatan hilirisasi dan pembangunan basis manufaktur yang lebih kompetitif perlu menjadi agenda penting pembangunan ekonomi nasional.

Destry menambahkan, Indonesia perlu memperdalam rantai pasok industri agar tidak hanya mengekspor bahan mentah atau produk yang baru melalui sebagian tahapan pengolahan. Dengan begitu, potensi sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.

Selain itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja terampil, serta pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk membangun industri dengan nilai tambah tinggi.

Menurut Destry, berbagai agenda tersebut membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan serta tahapan implementasi yang jelas, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Adapun BI, lanjutnya, akan berkontribusi melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi dan penciptaan iklim yang kondusif agar Indonesia memiliki ruang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Realisasi Investasi Jateng Tembus Rp72,54 Triliun, Serap 340 Ribu Pekerja

Senin, 26 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/realisasi-investasi-jateng-tembus-rp7254-triliun-serap-340-ribu-pekerja/>

SEMARANG — Realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 340.334 orang. Capaian tersebut tumbuh 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Johan Hadiyanto mengatakan, capaian tersebut merupakan akumulasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

“Secara kumulatif Januari sampai dengan September 2026 itu capaian realisasi investasi di Jawa Tengah. Itu Rp72,54 triliun,” kata Johan, saat menyampaikan paparan capaian Realiasi Investasi Triwulan III tahun 2026, di Kantor DPMPTSP Jawa Tengah, Semarang, Senin (26/10/2026).

Ditambahkan, berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi tersebut terdiri atas PMDN sebesar Rp31,77 triliun dan PMA Rp40,77 triliun. Nilai itu mencapai 73,21 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

“Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) benar kalau target (capaian investasi bisa mencapai Rp110 triliun). Tapi kalau secara resmi target dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Rp99,09 triliun. Adapun tahun kemarin memang capaian kita Rp110 triliun itu sudah ditambah dengan capaian realisasi UMK, dan itu belum kita masukkan,” bebernya.

Kinerja investasi, terang Johan, juga terlihat pada triwulan III 2026 yang mencapai Rp24 triliun. Nilai tersebut meningkat 16,78 persen dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp20,55 triliun. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi sepanjang Januari-September 2026 menghasilkan 340.334 kesempatan kerja dari 82.420 jumlah proyek, meningkat 4,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Johan menjelaskan, industri barang dari kulit dan alas kaki menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, yakni 77.330 orang. Posisi berikutnya ditempati industri tekstil dengan 69.422 pekerja, disusul industri lainnya sebanyak 30.132 pekerja.

Johan mengatakan, capaian investasi tersebut didukung upaya pemerintah daerah menjaga iklim usaha dan mengawal pelayanan perizinan bagi investor, mulai dari tahap peninjauan hingga realisasi penanaman modal.

“Kemarin Pak Gubernur, Pak Kapolda (Irjen Pol Roy Hardi Siahaan) dan Pangdam (Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sudaryanto) bersepakat berkomitmen menjaga kondusivitas Provinsi Jawa Tengah, sehingga investor atau calon investor nyaman dan akan senang hati masuk ke Jawa Tengah,” ujarnya.

Selain menjaga kondusivitas daerah, Pemprov Jateng mendorong pengembangan kawasan industri. Saat ini, Jawa Tengah memiliki 12 kawasan industri, termasuk dua kawasan ekonomi khusus di Kendal dan Batang. Pemerintah juga merencanakan penambahan 12 kawasan industri baru di sejumlah kabupaten/kota.

Johan menambahkan, ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu modal yang ditawarkan kepada investor. Jawa Tengah memiliki 1.557 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan swasta dengan jumlah siswa lebih dari 800.000 orang, serta lembaga pelatihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, peluang investasi baru juga terus dijajaki. Johan mengungkapkan, calon investor dari Uni Emirat Arab tengah menjajaki investasi di Jawa Tengah, termasuk rencana pembangunan fasilitas kilang mikro di sekitar Jepara.

Dari sisi negara asal investasi asing, katanya, Hong Kong menempati posisi pertama dengan nilai Rp11,02 triliun atau 27,04 persen. Singapura menyusul dengan Rp9,59 triliun, kemudian Tiongkok Rp6,74 triliun, Thailand Rp3 triliun, dan Jepang Rp2,41 triliun. (Ak/UI, Diskomdigi Jateng)

Jateng Perkuat Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

Senin, 26 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-perkuat-regulasi-pajak-dan-retribusi-daerah/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat menyepakati perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kesepakatan perubahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, Senin (26/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Taj Yasin mengatakan, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perubahan nomenklatur, penggabungan, pemisahan, hingga penambahan unit pelayanan baru.

Salah satu penyesuaian tersebut berkaitan dengan keberadaan rumah sakit mata di Kabupaten Sukoharjo, yang membutuhkan kepastian hukum dalam penerapan retribusi daerah.

“Kita membutuhkan kepastian hukum terkait retribusi pendapatan daerah. Alhamdulillah, hari ini sudah disahkan,” ujar wagub.

Menurutnya, penyesuaian Perda Nomor 12 Tahun 2023 menjadi langkah penting, untuk memastikan setiap pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah penetapan perda tersebut, Pemprov Jawa Tengah akan menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman pelaksanaan teknis.

“Selanjutnya, kita akan membuat peraturan gubernurnya dan aturan pelaksanaannya, supaya pendapatan-pendapatan kita ke depan benar-benar sesuai dengan ketentuan produk-produk hukum, baik undang-undang maupun perda yang sudah kita sepakati,” ujarnya.

Terkait potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gus Yasin, sapaannya menjelaskan, penetapan perda tersebut belum dapat langsung diterjemahkan menjadi persentase kenaikan pendapatan. Pasalnya, pengaturan lebih terperinci mengenai besaran tarif, masih akan ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur.

Dalam rapat itu, juga dilakukan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Pemprov Jawa Tengah berharap perubahan regulasi pajak dan retribusi serta pencabutan perda sumbangan pihak ketiga dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif. (Humas Jateng)*ul

Gubernur: Porprov 2026 menjadi nafas ekonomi baru Jateng

Senin, 26 Oktober 2026 08:20 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650407/gubernur-porprov-2026-menjadi-nafas-ekonomi-baru-jateng>

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XXVII tahun 2026 menjadi nafas ekonomi baru bagi provinsi ini.

"Perputaran ekonomi meningkat. Hotel dan UMKM di Semarang kebanjiran," kata gubernur saat membuka Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang, Minggu malam.

Ia menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah memberikan dukungan, sehingga terselenggara pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Porprov, lanjut dia, juga menjadi ajang konsolidasi persatuan dan kesatuan Jawa Tengah.

"Lewat olahraga, tumbuh kembangkan persatuan dan persaudaraan," katanya.

Ia meminta kepada para atlet untuk menjaga ego sektoral serta saling menghargai satu sama lain.

Menurut dia, Porprov merupakan tontonan yang menarik bagi masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari investasi di dunia olahraga.

Porprov XXVI yang digelar mulai 25 hingga 31 Oktober 2026 diikuti oleh kontingen dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Porprov 2026 diikuti 7.999 atlet yang akan bertanding di 58 cabang olahraga.

Pesta olahraga ini akan digelar di sejumlah gelanggang olahraga yang tersebar di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal.

Meski Ekonomi Global Tak Baik-baik Saja, Jateng Optimis Kantongi Investasi Rp110 Triliun Tahun 2026

Senin, 26 Oktober 2026 16:23 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1270653/meski-ekonomi-global-tak-baik-baik-saja-jateng-optimis-kantongi-investasi-rp110-triliun-tahun-2026>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis mampu merealisasikan target investasi hingga menyentuh angka Rp110 triliun pada akhir tahun 2026.

Mereka tak khawatir adanya gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi global seperti ketidakstabilan wilayah Timur Tengah, Perang Rusia-Ukraina, aktivitas Militer Israel dan lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Johan Hadiyanto menyebut target resmi investasi yang ditetapkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke Jateng di angka sebesar Rp99,09 triliun pada tahun 2026.

Namun, berkaca pada pencapaian tahun lalu yang menembus Rp110 triliun, pihaknya yakin target Rp110 triliun tersebut dapat kembali dicapai pada 2026 ini.

Tentunya capaian investasi itu tidak hanya penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri saja (PMDN), melainkan harus digabung dengan capaian sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pada Semester I 2026 saja, realisasi investasi UMK sudah mencapai Rp11,4 triliun, terdiri dari Usaha Mikro sebesar Rp10,11 triliun dan Usaha Kecil sebesar Rp1,29 triliun.

Sementara, capaian investasi Jateng hingga Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Kedua capaian tersebut baru bisa digabung pada akhir tahun 2026 nanti.

"Kami sangat optimistis mencapai Rp110 triliun, itu target dari Pak Gubernur Jateng Ahmad Luthfi," papar Johan dalam rilis capaian investasi Jateng, Kota Semarang, Senin (26/10/2026).

Siapkan Empat Langkah Strategis Pacu Investasi

Johan mengatakan tolok ukur lainnya yakni soal pertumbuhan ekonomi Jateng pada Semester I 2026 tercatat berada di angka 5,8 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional di saat ekonomi global yang tidak baik-baik saja.

Oleh karena itu, sebagai penutup tahun 2026 nanti, pihaknya yakin mampu mengamankan target investasi tersebut.

Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, pertama yakni berkomitmen menjamin keamanan serta kenyamanan bagi para calon investor maupun pemodal yang telah beroperasi di Jawa Tengah.

"Sudah ada kesepakatan antara Pak Kapolda dan Pangdam, berkomitmen menjaga kondusifitas Provinsi Jawa Tengah sehingga investor atau calon investor nyaman dan akan senang hati masuk ke Jawa Tengah," bebernya.

Kedua, lanjut Johan, pihaknya juga melakukan pengawalan Perizinan End-to-End. Pihaknya mendampingi investor secara intensif, mulai dari tahap kepeminatan hingga realisasi di lapangan.

Melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Jateng tercatat telah menerbitkan sekitar 66.000 izin usaha.

"Kami dampingi mulai dari kepeminatan sampai dengan realisasi," ujarnya.

Langkah ketiga, Johan mengungkapkan, ada rencana penambahan 12 Kawasan Industri Baru.

Sebagai langkah mengatasi keterbatasan lahan pada 12 kawasan industri yang ada atau existing, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Batang, Gubernur Jateng menginisiasi pembentukan 12 Kawasan Industri baru.

Pemprov tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pusat, serta Badan Pengelola Investasi Danantara.

Rencana sebaran kawasan industri baru ini meliputi wilayah Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, hingga Grobogan.

"Sebanyak 12 daerah ini kami proyeksi dan rencana kita untuk penambahan kawasan industri baru," bebernya.

Tawarkan Keunggulan SDM

Selain stabilitas iklim usaha, Johan menyebut langkah keempat Jateng yakni menawarkan keunggulan komparatif berupa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang kompetitif.

Dari dukungan pendidikan Vokasi, Jateng memiliki 1.557 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri maupun swasta dengan total lebih dari 800.000 siswa dari berbagai jurusan.

Pemprov juga menerapkan prinsip link and match untuk menyesuaikan keahlian lulusan dengan kebutuhan spesifik investor.

Sementara dari jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terdapat 2.002 Vocational Training Center atau LPK terdiri dari milik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota) yang siap menjembatani kebutuhan tenaga ahli.

Ia menekankan pula UMK Jateng kompetitif, bukan sekadar murah. Ini juga menjadi kepeminatan tersendiri bagi investor.

"Kami memanfaatkan peluang itu (investasi) membuka kepada asing untuk masuk. Tentunya dengan proses perizinan dan tata ruang serta lingkungan yang sesuai dengan apa yang diregulasikan oleh daerah," tandasnya. (Iwn)

Pertumbuhan Ekonomi Kendal Mendekati 8 Persen, Ibas Dorong Generasi Muda jadi Inovator

Senin, 26 Oktober 2026 16:51 WIB

Penulis: Agus Salim Irsyadullah, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/kendal-handal/1270665/pertumbuhan-ekonomi-kendal-mendekati-8-persen-ibas-dorong-generasi-muda-jadi-inovator>

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang mendekati 8 persen mendapat apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono saat kunjungan ke Pemkab Kendal, Minggu (25/10/2026).

Menurut Ibas sapaan akrabnya, capaian tersebut dinilai menunjukkan potensi Kendal sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.

Selain itu, Ibas juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing daerah termasuk keberadaan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

"KEK Kendal ini memiliki potensi besar menjadi magnet investasi nasional maupun internasional yang diharapkan mampu memperkuat industrialisasi serta mendorong hilirisasi produk," katanya.

Selain sektor industri, Ibas juga menilai sektor pesisir dan agraris serta kemandirian pangan dan energi perlu terus dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah.

Namun, ia mengingatkan agar pembangunan Kendal tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan identitas daerah sebagai kota pesantren juga dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai sosial dan karakter masyarakat.

"Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan keluhuran budi pekerti dan persatuan bangsa," ujarnya.

Di sisi lain, Ibas turut mendorong generasi muda Kendal mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi, terutama di tengah perkembangan teknologi digital.

Menurut dia, anak muda perlu berani membuka lapangan kerja, tidak mudah menyerah, serta mampu memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi digital untuk menciptakan inovasi.

"Generasi muda harus terus merawat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menegaskan kepemimpinan di era digital menuntut generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan mengambil keputusan berdasarkan data.

Ia mengingatkan agar anak muda tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga bertransformasi menjadi kreator dan inovator.

Pemanfaatan media sosial dan platform digital, lanjutnya, perlu diarahkan untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal, mempromosikan pariwisata, serta memperkenalkan seni dan budaya Kendal ke tingkat nasional maupun internasional.

Bupati juga mengajak generasi muda menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi dengan mengedepankan etika serta tanggung jawab di ruang digital.

"Kolaborasi antara dunia pendidikan, komunitas pemuda, dan pelaku usaha diperlukan untuk membentuk ekosistem digital yang inklusif," tandasnya. (ags)

Disokong Kawasan Industri, Kendal dan Batang Kuasai Investasi Asing di Jawa Tengah hingga Rp 19,5 T

Senin, 26 Oktober 2026 19:42 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1270701/disokong-kawasan-industri-kendal-dan-batang-kuasai-investasi-asing-di-jawa-tengah-hingga-rp-195-t>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dua kabupaten saling bertetangga Batang dan Kendal memuncaki lima besar daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi tujuan utama aliran investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Dari Januari-September 2026, dua daerah tersebut telah mengantongi nilai investasi sebesar Rp19,5 triliun atau hampir 27 persen dari total nilai investasi Jateng yang mencapai Rp72,54 triliun.

Baca juga: Meski Ekonomi Global Tak Baik-baik Saja, Jateng Optimis Kantongi Investasi Rp110 Triliun Tahun 2026

Derasnya investasi yang masuk ke dua kabupaten tersebut karena didukung oleh kawasan industri masing-masing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan KEK Industropolis Batang.

"Iya, Kendal dan Batang dua besar daerah penerima PMA. Kendal nomor satu kantong Rp11,65 triliun disusul Batang Rp7,85 triliun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Johan Hadiyanto dalam rilis capaian investasi Jateng, Kota Semarang, Senin (26/10/2026).

Capaian Investasi Sudah 73 Pesen dari Target

Johan menyebut capaian investasi Jateng dari Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Angka ini merealisasikan sekitar 73,2 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp99,09 triliun.

Secara akumulatif, PMA menyumbang porsi terbesar yaitu Rp40,77 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi sebesar Rp31,7 triliun.

Khusus PMA, selain Batang dan Kendal ada kabupaten Demak di posisi ketiga dengan nilai investasi Rp3,7 triliun, Kota Semarang Rp3,1 triliun, dan Kabupaten Pekalongan Rp1,81 triliun.

Di sisi lain, sektor PMDN, posisi puncak dipegang Kota Semarang Rp5,93 triliun, Kabupaten Temanggung Rp5,04 triliun, Kabupaten Kudus Rp3,04 triliun, Kabupaten Semarang Rp2,62 triliun, dan Kabupaten Kendal Rp1,96 triliun.

Jika digabungkan dari dua sumber penanaman modal itu, antara PMA dan PMDN, Kabupaten Kendal tetap nomor satu dengan angka Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,08 triliun, dan Kabupaten Batang Rp8,55 triliun.

"Baru Kabupaten Temanggung nomor empat Rp5,05 triliun disusul Demak Rp4,29 triliun," ucapnya.

Johan mengungkapkan capaian secara kumulatif ini mengalami pertumbuhan 9,7 persen (year-on-year) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp66,13 triliun.

"Pertumbuhan positif ini ditopang oleh kenaikan di kedua sektor modal, baik PMA yang naik 10,62 persen maupun PMDN yang tumbuh 8,53 persen," ujarnya.

Hongkong Paling Gacor Guyur Investasi

Asal negara pemodal asing pada periode Januari–September 2026 didominasi oleh investor asal Asia Timur dan Asia Tenggara.

Johan merinci Hongkong menjadi kontributor PMA terbesar secara kumulatif dengan nilai Rp11,02 triliun disusul oleh Singapura Rp9,6 triliun, Tiongkok Rp6,74 triliun, Thailand Rp3 triliun, dan Jepang Rp2,41 triliun.

Sementara khusus pada Triwulan III (Juli-September) 2026, Singapura sempat memimpin realisasi PMA sebesar Rp3,3 triliun diikuti Hongkong, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan.

"Hongkong, Singapura, Tiongkok, Thailand dan Jepang menjadi lima besar investasi PMA," katanya.

Sektor industri paling memikat PMA, didominasi oleh industri barang dari kulit dan alas kaki (17,99 persen), diikuti industri karet dan plastik, tekstil, mesin elektronik, serta jasa lainnya.

Sebaliknya dari sektor PMDN sektor terbesar adalah industri kayu (14,99 persen), diikuti sektor jasa lainnya, transportasi, industri makanan, dan perdagangan (8,7 persen).

"Sektor unggulan triwulan III, masih pada industri karet dan plastik, tekstil, transportasi gudang dan telekomunikasi, perumahan/kawasan industri/perkantoran, serta industri barang dari kulit & alas kaki," ucapnya.

Serapan Tenaga Kerja 340.334 Orang

Dari nilai investasi itu, Johan mengungkapkan ada aktivitas penyerapan tenaga kerja yang terbukti padat karya. Kota Semarang menjadi daerah penyerap tenaga kerja terbanyak hingga September 2026 dengan 44.459 orang, disusul Kabupaten Kendal (30.668 orang) dan Kabupaten Jepara (30.552 orang).

Dari sisi lapangan usaha, industri barang dari kulit dan alas kaki menjadi penyerap tenaga kerja terbesar yakni mencapai 77.330 orang, diikuti oleh industri tekstil sebanyak 69.422 orang, dan industri lainnya sebanyak 30.132 orang.

"Total serapan Januari hingga September 2026 ini mencapai 340.334 orang," bebernya. (Iwn)

Pertumbuhan Laba Industri di China Naik di Tengah Kesenjangan Ekonomi

Selasa, 27 Oktober 2026 11:27 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-laba-industri-di-china-naik-di-tengah-kesenjangan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Keuntungan industri China tumbuh lebih cepat pada bulan September 2026, meskipun perbedaan yang semakin dalam di seluruh perekonomian membebani pendapatan bisnis.

Laba perusahaan industri naik 14,4% secara tahunan pada bulan September 2026, meningkat dari kenaikan 4,2% pada bulan Agustus, data dari Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan pada hari Selasa (27/10/2026).

Tercatat, laba industrial di China naik 15,5% dalam sembilan bulan pertama 2026, sebagian besar tidak berubah dari kenaikan 15,7% pada periode Januari-Agustus.

Kesenjangan sektoral masih terlihat jelas, dengan keuntungan pada kategori manufaktur komputer, komunikasi dan peralatan elektronik lainnya meningkat lebih dari dua kali lipat selama periode Januari-September 2026. Di sisi lain, keuntungan pada sektor manufaktur furnitur turun lebih dari setengahnya, menjadikannya salah satu sektor dengan kinerja terburuk.

Hal ini juga membayangi keberlanjutan pertumbuhan laba, perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor bersiap menghadapi ketidakpastian yang lebih besar karena meningkatnya surplus perdagangan yang memicu ketegangan dengan mitra dagang, khususnya Eropa.

Namun, kepala ekonom CITIC Bank International di China Ding Meng mengatakan, optimisme mengenai prospek tersebut karena pesatnya pertumbuhan industri terkait AI.

“Hal ini menunjukkan bahwa permintaan domestik dan eksternal yang dihasilkan oleh pengembangan rantai pasokan AI telah menjadi kekuatan utama yang mendukung keuntungan industri,” katanya.

“Kecuali terjadi pembalikan besar dalam ledakan investasi AI global, keuntungan industri diperkirakan akan terus tumbuh dengan pesat.”

Ekspansi PDB pada kuartal ketiga yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 4,5%, menempatkan China dalam jangkauan target pertumbuhan tahunannya sebesar 4,5% hingga 5,0%. Namun, kesenjangan di berbagai bagian perekonomian menunjukkan bahwa pemulihan tersebut masih tidak seimbang, dengan pelemahan yang terus-menerus di beberapa sektor terus mengikis profitabilitas perusahaan.

Tekanan tersebut semakin terlihat di tingkat perusahaan. Pertumbuhan laba bersih pembuat baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, CATL, melambat tajam pada kuartal terakhir, karena persaingan yang ketat di pasar baterai kendaraan listrik menekan margin pada saat penjualan mobil di China sedang mengalami penurunan.

China akan terus memanfaatkan kebijakan makroekonomi untuk mendukung pertumbuhan, memperluas permintaan domestik dan mengoptimalkan pasokan, kata ahli statistik NBS Yu Weining, menggarisbawahi dorongan untuk mengganti pendorong pertumbuhan tradisional dengan yang baru.

Angka keuntungan industri mencakup perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya 20 juta yuan (US\$ 3,0 juta) dari operasi utama.

Ekonomi Korea Selatan Tumbuh Melebihi Proyeksi Berkat Ekspor Semikonduktor

Selasa, 27 Oktober 2026 11:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-korea-selatan-tumbuh-melebihi-proyeksi-berkat-ekspor-semikonduktor>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Ekonomi Korea Selatan tumbuh dahsyat di kuartal ketiga 2026. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan produk domestik bruto (PDB) naik 1.0% di periode tersebut.

Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di kuartal sebelumnya, yang cuma sebesar 0,65. Selain itu, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal III juga lebih baik dari konsensus proyeksi analis, yakni 0,7%.

Capaian ini juga melampaui proyeksi Bank of Korea sebesar 0,3% yang disampaikan pada Agustus. Bank sentral Korea Selatan tersebut semula memprediksi pertumbuhan tahun ini sebesar 3,3%.

Secara tahunan, PDB tumbuh 3,4%, setelah sempat naik 3,7% pada kuartal sebelumnya. Angka ini juga lebih kuat dibandingkan ekspektasi para ekonom yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,0%.

Dengan realisasi terbaru, ekonomi diperkirakan tumbuh 3,7% sepanjang tahun ini. Ini dengan asumsi PDB pada kuartal keempat tetap berada di tingkat yang sama dengan kuartal ketiga.

Reuters melaporkan, mengutip pengumuman Bank of Korea, kenaikan ekspor ini didorong oleh lonjakan global dalam permintaan cip akal imitasi (AI) yang memacu ekspor dan investasi. Permintaan domestik masih lemah.

"Diperkirakan sekitar separuh dari pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor semikonduktor," ujar Lee Dong-won, Direktur Jenderal Departemen Statistik Ekonomi Bank of Korea, seperti dikutip Reuters, Selasa (27/10/2026).

Lee menyatakan, ekspor dan investasi diperkirakan akan tetap kuat pada kuartal keempat. Ia menambahkan, volume produksi cip akan terus meningkat tahun depan, sementara harga diperkirakan tetap naik namun dengan laju yang lebih lambat.

Konsumsi swasta, yang pada kuartal ketiga sempat turun untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun, diperkirakan akan pulih secara bertahap. Pemulihan ini didukung oleh pembagian dividen dari perusahaan cip kepada para pemegang saham pada kuartal keempat, serta pemberian bonus kepada karyawan pada kuartal pertama tahun 2027, yang meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Di tengah lonjakan investasi AI secara global, ekspor Korea Selatan sepanjang Januari hingga September telah melampaui US\$ 800 miliar, lebih tinggi dibanding total capaian ekspor sepanjang tahun lalu.

Ekspor Korsel berpotensi menembus angka US\$1 triliun tahun ini. Bila terwujud, Korea Selatan akan menjadi negara keempat di dunia yang mencapai tonggak sejarah tersebut, setelah Amerika Serikat, China, dan Jerman.

Bank sentral Korsel tetap merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi serta mempertahankan optimisme terhadap momentum ekspor negara tersebut. "Ekspor dan investasi menjadi motor penggerak pertumbuhan, namun sisi negatifnya adalah konsumsi swasta masih lemah dibandingkan dengan momentum pertumbuhan secara keseluruhan," ujar Park Sang-hyun, Ekonom iM Securities.

Karena itu, Park melihat mungkin akan ada dorongan jangka pendek. Akan tetapi sulit untuk mengharapkan momentum pertumbuhan yang kuat mengingat kondisi pasar tenaga kerja dan suku bunga yang restriktif.

Inflasi Jasa Jepang Naik 3,7%, Peluang Kenaikan Suku Bunga BOJ Menguat

Selasa, 27 Oktober 2026 08:04 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-jasa-jepang-naik-37-peluang-kenaikan-suku-bunga-boj-menguat>

KONTAN.CO.ID - Tekanan harga di sektor jasa Jepang semakin meningkat pada September 2026.

Indeks harga produsen jasa atau Services Producer Price Index (SPPI) naik 3,7% secara tahunan (year-on-year/YoY), memperkuat indikasi bahwa Bank of Japan (BOJ) masih berpeluang melanjutkan kenaikan suku bunga acuan.

Mengutip Reuters, Selasa (27/10/2026), kenaikan indeks harga jasa tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 yang telah direvisi menjadi 3,5% YoY.

Data yang dirilis BOJ ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tekanan inflasi di sektor jasa.

SPPI mengukur harga jasa yang dibebankan perusahaan kepada perusahaan lain. Pergerakannya turut menjadi perhatian bank sentral Jepang untuk melihat sejauh mana pelaku usaha meneruskan kenaikan biaya tenaga kerja ke harga jasa.

Kenaikan indeks tersebut mengindikasikan tekanan biaya di sektor jasa masih bertahan. Jika perusahaan terus meneruskan kenaikan biaya tenaga kerja kepada pelanggan, tekanan inflasi berpotensi bertahan lebih lama dan memperkuat alasan bagi BOJ untuk menegatkan kebijakan moneter.

Meski demikian, BOJ diperkirakan mempertahankan suku bunga acuannya di level 1,25% dalam rapat kebijakan moneter selama dua hari yang berakhir pada Jumat (30/10/2026).

Pasar akan mencermati pernyataan BOJ setelah rapat tersebut, terutama petunjuk mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga berikutnya.

Dengan tekanan harga jasa yang meningkat, bank sentral diperkirakan tetap membuka peluang untuk menaikkan biaya pinjaman apabila perkembangan inflasi mendukung langkah tersebut.

Euro Melemah Jelang Rapat Bank Sentral, Real Brasil Anjlok 8,5%

Selasa, 27 Oktober 2026 05:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/euro-melemah-jelang-rapat-bank-sentral-real-brasil-anjlok-85>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar euro melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (26/10/2026), di tengah penantian investor terhadap keputusan sejumlah bank sentral utama dunia pekan ini.

Harga minyak mentah yang masih bertahan di level tinggi turut menekan mata uang kawasan Eropa.

Melansir Reuters, Euro turun 0,21% ke US\$ 1,1179 terhadap dolar AS. Namun, mata uang tunggal Eropa tersebut menguat 0,31% terhadap yen Jepang ke level 176,04 yen.

Pelemahan euro terjadi setelah pekan lalu pasar obligasi pemerintah Prancis mengalami aksi jual.

Kondisi tersebut mendorong premi risiko utang Prancis ke level tertinggi sejak krisis utang negara berdaulat pada 2011, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan kawasan Eropa.

Meski demikian, harga obligasi pemerintah Prancis atau Obligations Assimilables du Trésor (OAT) naik pada Senin.

Pergerakan ini terjadi setelah lembaga pemeringkat Moody's tidak menurunkan peringkat kredit Prancis pada pekan lalu, sehingga sedikit meredakan tekanan terhadap pemerintah yang tengah berupaya memperbaiki kondisi fiskalnya.

Kepala Strategi Valuta Asing Global Societe Generale Kit Juckes mengatakan, fundamental euro belum banyak berubah meskipun selisih imbal hasil obligasi mulai menyempit. "Euro masih rentan saat ini karena prospek pertumbuhan ekonominya tidak baik dan harga energi masih tinggi," ujar Juckes.

Harga minyak menjadi salah satu faktor yang membayangi pergerakan euro. Sebagai kawasan yang bergantung pada impor energi, zona euro rentan terhadap kenaikan harga minyak karena dapat meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan inflasi.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,78% dan ditutup pada US\$ 115,81 per barel. Meski terkoreksi, harga tersebut masih bertahan di dekat level tertinggi dalam enam bulan terakhir.

Di sisi lain, dolar AS memperoleh dukungan dari indikator ekonomi Amerika Serikat yang relatif tangguh, meskipun tekanan inflasi masih membayangi. Namun, mata uang Negeri Paman Sam tersebut sempat tertekan oleh aksi jual di pasar saham berbasis teknologi pada pekan lalu.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, naik 0,31% ke level 102.

Juckes menilai dolar AS menghadapi sejumlah hambatan, tetapi data ekonomi Amerika Serikat yang relatif kuat masih menjadi penopang bagi mata uang tersebut.

Perhatian investor kini tertuju pada keputusan lima bank sentral utama yang dijadwalkan diumumkan sepanjang pekan ini. Federal Reserve AS, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank Sentral Jepang diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan meskipun tekanan inflasi masih berlangsung.

Sementara itu, bank sentral Selandia Baru dan Kanada diperkirakan menaikkan suku bunga. Menjelang keputusan tersebut, yen Jepang melemah 0,43% terhadap dolar AS ke level 157,46 yen per dolar AS.

Real Brasil Anjlok Usai Kemenangan Lula

Di pasar negara berkembang, real Brasil mengalami tekanan tajam setelah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memenangi masa jabatan keempatnya dalam pemilihan presiden pada Minggu (25/10/2026).

Lula mengalahkan, Senator Flavio Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro. Flavio sebelumnya unggul pada putaran pertama pemilihan, tetapi kalah dalam putaran kedua dengan selisih lebih dari 4 juta suara.

Hasil tersebut mengejutkan pasar keuangan Brasil yang sebelumnya bertaruh pada kemenangan Flavio Bolsonaro. Ia menolak mengakui kekalahan dan berjanji mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilu.

Nilai tukar real Brasil anjlok 8,5% ke level 5,4 real per dolar AS.

Analisis Goldman Sachs yang dipimpin Teresa Alves menilai, ketidakpastian akibat potensi sengketa hasil pemilu dapat memperburuk sentimen pasar.

Namun, tekanan terhadap real juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih mendasar mengenai kondisi fiskal Brasil.

Menurut Goldman Sachs, pasar perlu memperhitungkan premi risiko fiskal yang lebih besar pada real dan aset-aset domestik Brasil lainnya, terutama setelah pelonggaran fiskal dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam skenario fiskal yang lebih buruk, Goldman Sachs sebelumnya memperkirakan level 5,40 real per dolar AS mencerminkan premi risiko fiskal seperti pada September 2024.

Sementara itu, level 5,80 real per dolar AS mencerminkan premi risiko yang lebih tinggi, menyerupai kondisi pada Desember 2024.

Pergerakan real Brasil selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan politik pascapemilu serta penilaian investor terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Lula.

Kemenkeu Naikkan Batas Kumulatif Defisit APBD Jadi 0,18% PDB

Selasa, 27 Oktober 2026 18:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125938/kemenkeu-naikkan-batas-kumulatif-defisit-apbd-jadi-0-18-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menetapkan batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027 sebesar 0,18% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Hal ini dituliskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 76 Tahun 2026 yang resmi diundangkan pada 16 Oktober 2026 dan berlaku hingga dicabut.

“Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2027,” sebut pasal 2 beleid tersebut, dikutip pada Selasa (27/10/2026).

Aturan ini lebih longgar dibandingkan dengan beleid yang mengatur batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang tertuang dalam PMK No 101/2025.

“Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2026,” sebut PMK 101/2025 pasal 1.

Sementara itu, Kemenkeu menetapkan batas maksimal defisit anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah yang tertuang pada pasal 3.

"Pelampauan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan menteri," tulis isi PMK tersebut, dikutip Selasa (27/10/2026).

Persetujuan tersebut juga tidak diberikan secara otomatis. Pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memastikan batas kumulatif defisit APBD.

Adapun dalam PMK 76/2026 disebutkan batas kumulatif pembiayaan utang daerah juga ditetapkan sebesar 0,18% dari proyeksi PDB.

Selain itu, daerah yang mengajukan pelampauan batas defisit harus memiliki rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pembiayaan utang paling sedikit 2,5.

Persyaratan lainnya, jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak boleh melampaui 75% dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Sementara itu, dalam Pasal 8 beleid tersebut diterangkan juga bagi kepala daerah yang merencanakan defisit APBD melampaui batas maksimal harus menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan tersebut harus disertai dokumen pendukung, antara lain laporan realisasi anggaran 2025 dan 2026, rancangan APBD 2027, rencana penarikan utang, serta posisi kumulatif pembiayaan utang dan kewajiban pembayaran kembali.

Pelaporan Utang Daerah

Selain membatasi defisit, PMK 76/2026 pemerintah juga mewajibkan pemerintah daerah melaporkan rencana dan realisasi defisit APBD selama tahun anggaran 2027.

Pemda juga harus melaporkan posisi kumulatif pembiayaan utang daerah beserta kewajiban pembayaran kembali setiap semester kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Laporan semester I 2027 wajib disampaikan paling lambat 31 Juli 2027, sedangkan laporan semester II 2027 paling lambat 31 Januari 2028.

Pemda yang tidak menyampaikan laporan posisi utang hingga batas waktu tersebut dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Pemda Respons Aturan Baru Soal Defisit APBD 2027 Bisa Lewati 2,5%

Selasa, 27 Oktober 2026 17:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125936/pemda-respons-aturan-baru-soal-defisit-apbd-2027-bisa-lewati-2-5/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan memberikan pelonggaran kepada pemerintah daerah yang ingin memiliki defisit anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di atas batas maksimal yakni 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah.

Menanggapi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pelebaran batas defisit APBD tersebut.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Ariadi Noor menilai kebijakan nasional tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah.

"Kebijakan nasional tentunya kan pasti mempertimbangkan hal-hal positif bagi daerah. Jadi apa pun yang jadi kebijakan nasional, pada prinsipnya kami di Provinsi Kalsel mendukung dan ini insya Allah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat kita juga di Kalimantan Selatan," tegas Ariadi saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan ketentuan batas defisit APBD 2027 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027.

Dalam aturan tersebut, batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah.

Namun begitu, batas maksimal APBD tersebut bisa melebihi yang ditetapkan yakni 2,5% tapi dengan mendapatkan persetujuan Menteri.

Selain itu, dalam beleid ini diterangkan bahwa bagi kepala daerah yang merencanakan defisit APBD melampaui batas maksimal harus menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan tersebut harus disertai dokumen pendukung, antara lain laporan realisasi anggaran 2025 dan 2026, rancangan APBD 2027, rencana penarikan utang, serta posisi kumulatif pembiayaan utang dan kewajiban pembayaran kembali.

Menteri Keuangan akan memberikan persetujuan maupun penolakan usulan pelampauan defisit tersebut paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari kepala daerah secara lengkap dan benar.

Bila ditolak, kepala daerah masih dapat mengajukan kembali permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD, sepanjang rancangan peraturan daerah mengenai APBD belum dievaluasi.

Rupiah Tutup Perdagangan di Rp18.153/US\$

Selasa, 27 Oktober 2026 15:48 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/125922/rupiah-tutup-perdagangan-di-rp18-153-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Selasa (27/10/2026) dengan depresiasi 0,16% ke Rp18.153/US\$, seiring menguatnya aksi jual di pasar saham dan obligasi.

Data Bloomberg per 15:15 WIB menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) amblas 3,36% ke posisi 5.192,42. Sejalan dengan itu, di pasar obligasi aksi jual meluas kompak di semua tenor.

Yield tenor acuan 10 tahun naik 4,1 basis poin (bps) ke 7,52% dan mengalami inversi yield dengan tenor yang lebih panjang. Di tenor 15 tahun tercatat naik 7,1 bps ke 7,49%, dan tenor 12 tahun naik 4,4 bps ke 7,48%.

Sedangkan tenor 20 tahun naik hanya 1 bps ke 7,47%, lebih rendah ketimbang tenor 10 tahun.

Pelemahan rupiah menjadi keniscayaan, setelah Bank Indonesia (BI), memilih mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di 5,75% saat tekanan eksternal menguat dan sentimen domestik memburuk. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede menyebut, tekanan ini merupakan kombinasi penguatan dolar AS, harga minyak yang kembali berada di sekitar US\$115 per barel, meningkatnya kebutuhan devisa impor.

Selain itu, adanya arus modal keluar yang meluas dari pasar saham ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah pengumuman konsultasi MSCI. Ia memperkirakan rupiah dapat bergerak di rentang Rp18.000-18.500/US\$ sepanjang sisa kuartal IV-2026.

Untuk diketahui, data yang dihimpun Bloomberg mencatat adanya aksi jual di pasar saham kemarin senilai US\$106,2 juta. Disusul dengan pelepasan obligasi pemerintah RI oleh investor global secara mingguan per 23 Oktober senilai US\$300,2 juta.

Jika menggunakan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) di Rp18.139/US\$, maka nilai yang keluar sebesar Rp1,92 triliun di pasar saham dan Rp5,44 triliun di pasar obligasi.

Pasar Mata Uang Asia

Di sisi lain, pergerakan mata uang Asia relatif beragam. Dolar Taiwan melesat kuat 0,23% disusul baht Thailand 0,15%. Sementara yuan China, rupee India, dolar Hong Kong dan ringgit Malaysia menguat lebih terbatas.

Sebaliknya, peso Filipina, melemah paling tajam 0,37%, diikuti rupiah 0,16%, dan yen Jepang 0,15%.

Sebagian mata uang yang menguat ditopang oleh posisi fundamental domestiknya. Mengingat, indeks dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat 0,21% ke 102,18 dan harga minyak masih bertahan tinggi.

Seperti dolar Taiwan menguat usai Goldman Sachs merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Taiwan menjadi 11,7% pada 2026, dari proyeksi sebelumnya 11,4%. Selain itu, Goldman juga optimis terhadap mata uang Taiwan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Optimisme itu didukung oleh revisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi, surplus transaksi berjalan yang masih besar, serta kuatnya ledakan pertumbuhan industri kecerdasan buatan (AI).

Sementara baht yang menyabet posisi runner up sore ini tertopang oleh aksi pembelian obligasi pemerintah Thailand. Data yang dihimpun Bloomberg menunjukkan investor asing membeli obligasi senilai US\$79,2 juta, dan membukukan pembelian bersih saham senilai US\$104,6 juta pada perdagangan kemarin.

Menakar Taji BI Menahan Volatilitas Rupiah

Selasa, 27 Oktober 2026 12:55 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125886/menakar-taji-bi-menahan-volatilitas-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pelemahan rupiah kian tajam setelah Bank Indonesia (BI) memilih menahan suku bunga acuan, alih-alih melakukan pengetatan moneter lebih lanjut. Langkah ini ditempuh BI di tengah tuntutan untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif, terlebih di saat laju penyaluran kredit September masih tumbuh tapi melambat.

Melansir data realtime Bloomberg, siang ini rupiah bertahan di kisaran Rp18.135/US\$, mendekati posisi all time low-nya di awal Juni 2026 yang sempat bertengger di Rp18.178/US\$. Pelemahan rupiah ini terjadi di saat Indeks dolar Amerika Serikat (AS) kembali terkerek ke 102,04, dan aksi jual terjadi di pasar surat utang.

Di tengah pelemahan rupiah yang kian persisten ini, rasanya penting mempertanyakan sikap BI yang memilih mempertahankan BI Rate pada pertemuan dewan gubernur terakhir.

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Oktober, BI lebih memilih kebijakan non-suku bunga dengan memperbesar pengurangi premi lindung nilai Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) menjadi 40% untuk tenor 6 bulan, dan 45% untuk tenor 12 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya

perlindungan risiko kurs bagi pelaku pasar sekaligus mendorong investor asing mempertahankan investasinya di aset domestik.

Namun, efektivitas insentif tersebut belum sepenuhnya bisa menahan gejolak rupiah yang terjadi belakangan ini. Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede, insentif lindung nilai hanya mengurangi salah satu komponen biaya investasi, bukan menghilangkan risiko fundamental maupun ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investor.

Untuk diketahui, keputusan investor untuk masuk, bertahan, atau keluar dari pasar Indonesia juga ditentukan oleh prospek nilai tukar, risiko penurunan harga aset, likuiditas pasar, serta kredibilitas kebijakan ekonomi.

"Ketika investor menghadapi potensi penurunan klasifikasi MSCI, kekhawatiran integritas pasar modal, harga minyak tinggi, dan risiko pelemahan rupiah berkelanjutan, pengurangan biaya lindung nilai belum tentu cukup untuk mendorong mereka mempertahankan investasi," sebut Josua.

Tekanan terhadap rupiah saat ini tidak berdiri sendiri, tapi berkelindan dengan perubahan persepsi risiko terhadap aset Indonesia. Credit Default Swap (CDS) INDON 5 tahun yang menjadi acuan risiko gagal bayar kembali naik ke 108, dari sebelumnya bergerak di kisaran 80-90.

Dalam situasi seperti ini, pengurangan premi DNDF dapat membantu mengurangi biaya transaksi lindung nilai, tapi tidak secara otomatis menghilangkan risiko kerugian akibat depresiasi rupiah maupun penurunan harga saham dan obligasi.

Meskipun terlalu dini menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak efektif, lantaran insentif ini butuh waktu, menurut Josua apabila tekanan rupiah terus berlanjut, BI perlu mengevaluasi apakah besaran insentif yang diberikan telah memadai, atau seberapa besar pemanfaatannya oleh pelaku pasar, serta apakah fasilitas ini benar-benar mendorong peningkatan transaksi lindung nilai.

Insentif Likuiditas

Nasabah menukarkan uang rupiah ke dolar AS di tempat penukaran uang asing di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Tantangan lainnya juga terjadi pada bauran kebijakan moneter BI. Keputusan mempertahankan BI Rate di 5,75%, pada saat yang sama BI menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Penurunan GWM memang mendukung likuiditas perbankan, tetapi tambahan likuiditas tidak otomatis meningkatkan pasokan dolar apabila permintaan valuta asing dan kekhawatiran investor tetap tinggi," kata Josua.

Jika permintaan dolar tetap tinggi, kebutuhan pembayaran impor meningkat, atau investor memilih mengurangi eksposur terhadap aset domestik, tekanan terhadap rupiah bisa terus berlanjut. Karena itu, BI perlu memastikan bahwa pelonggaran likuiditas tidak mengurangi efektivitas upaya stabilisasi rupiah.

Josua menilai, BI perlu menggeser pendekatan dari sekadar memberikan insentif menuju bauran kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan risiko, melalui evaluasi efektivitas transaksi lindung nilai, penguatan operasi moneter, pengelolaan likuiditas yang lebih selektif, serta komunikasi yang menjelaskan kondisi apa yang dapat memicu perubahan kebijakan.

"Apabila tekanan kurs terus berlangsung dan mulai meningkatkan ekspektasi inflasi, penyesuaian BI Rate harus tetap menjadi pilihan yang terbuka," terang Josua.

Di sisi lain, Josua menambahkan, secara paralel pemerintah dan otoritas pasar modal harus menyelesaikan persoalan kredibilitas pasar yang tidak dapat diperbaiki melalui instrumen moneter.

Josua merupakan salah satu dari 17 ekonom yang memperkirakan BI menaikkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6% dalam konsensus yang dihimpun Bloomberg pekan lalu, sebelum pengumuman BI Rate.

Instrumen SRBI

Sejak Gubernur BI, Destry Damayanti menjabat instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mulai dilepas secara perlahan. Yield SRBI yang sebelumnya terus menanjak tinggi hingga sempat menyentuh level tertinggi di 7,74% pada Juni di saat rupiah melemah tajam. Kini, yield SRBI berangsur turun ke level 6,6%.

Meski yield turun, sejatinya BI tidak meninggalkan instrumen SRBI. Pada 23 Oktober lalu, SRBI tetap dilelang. Dari total penawaran masuk sebesar Rp55,91 triliun, BI menyerap sebanyak Rp14 triliun.

Josua menyebut BI perlu menyesuaikan volume penerbitan, imbal hasil dan struktur jatuh tempo agar lebih efektif dalam menarik dana asing. Sebab, sepanjang 2026, SRBI sebenarnya mencatat arus masuk asing yang cukup besar. Hal itu menunjukkan bahwa instrumen SRBI sebenarnya masih punya daya tarik.

"Namun, arus keluar setelah pengumuman MSCI memperlihatkan bahwa investasi berjangka relatif pendek juga rentan terhadap perubahan sentimen," kata Josua.

Untuk itu, Josua menilai BI dapat meningkatkan daya tarik SRBI melalui imbal hasil yang kompetitif secara terukur, terutama setelah memperhitungkan biaya lindung nilai dan risiko kurs. Akan tetapi, kenaikan imbal hasil yang terlalu agresif berpotensi meningkatkan biaya operasi moneter, menyerap likuiditas perbankan secara berlebihan, dan menciptakan persaingan pendanaan dengan SBN maupun kredit sektor riil.

Sehingga, optimalisasi SRBI sebaiknya dipadukan dengan insentif lindung nilai, pengaturan likuiditas pasar uang, serta koordinasi penerbitan SBN agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian arah kebijakan.

Sebagai catatan saja, posisi investor asing masih tumbuh di instrumen ini. Data kepemilikan SRBI dari non-residen naik Rp86,79 triliun dari posisi Oktober 2025 menjadi Rp2948,66 triliun pada Agustus 2026. Tren ini mengindikasikan bahwa SRBI jadi salah satu instrumen yang diminati investor asing.

Dengan begitu, sebenarnya SRBI memang masih bisa jadi instrumen penyangga jangka pendek, tapi bukan solusi permanen. "Strategi yang lebih efektif adalah menjaga keseimbangan antara daya tarik aset Rupiah, kecukupan likuiditas domestik, kredibilitas kebijakan, dan kesiapan penyesuaian suku bunga apabila stabilitas moneter semakin terancam," tandas Josua.

Harga Minyak Tembus US\$116, Suahasil Soroti Risiko Fiskal

Selasa, 27 Oktober 2026 10:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125843/harga-minyak-tembus-us-116-suahasil-soroti-risiko-fiskal/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah harus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terukur di tengah gejolak ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia yang mencapai US\$115–US\$116 per barel.

Di satu sisi, pemerintah berupaya menahan harga sejumlah barang bersubsidi untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut perlu berjalan seiring dengan komitmen menjaga kesehatan fiskal.

Suahasil mengatakan APBN memiliki fungsi stabilisasi untuk meredam fluktuasi ekonomi, terutama ketika tekanan eksternal meningkat.

"Harga minyak hari-hari ini udah US\$115–US\$116, tapi sejumlah produk barang bersubsidi di dalam negeri tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut," ujar Suahasil dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum, Senin (26/10/2026).

Meski demikian, Suahasil menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan kredibilitas fiskal dalam menjalankan fungsi stabilisasi tersebut. Dia menegaskan defisit anggaran harus tetap berada dalam batas yang terukur.

"Boleh defisit, tapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Karena itu komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3% menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan," katanya.

Sebelumnya, Suahasil menuturkan pemerintah telah membayar subsidi dan kompensasi sebesar Rp376,8 triliun hingga September 2026.

Besaran pembayaran itu setara dengan 84,3% dari alokasi subsidi dan kompensasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

Realisasi tersebut juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp244,6 triliun.

Suahasil mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), kini dilakukan secara bulanan.

Realisasi pembayaran itu terdiri dari subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun, tumbuh 54,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp244,6 triliun. Dengan besaran subsidi Rp176 triliun dan kompensasi Rp68,6 triliun.

Kredit Perbankan Melaju, Tapi ke UMKM Masih LesuRedaksi

Selasa, 27 Oktober 2026 11:58 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125865/kredit-perbankan-melaju-tapi-ke-umkm-masih-lesu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Di balik angka pertumbuhan kredit perbankan yang tetap dua digit, tersemat potret pembiayaan di sektor riil yang masih tersengal-sengal.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, penyaluran kredit perbankan pada September 2026 tumbuh 12,7% secara tahunan (year-on-year/yoy). Memang melambat dari pertumbuhan Agustus yang tercatat 13,3%, tetapi masih sesuai target bank sentral di kisaran 8-12%.

Meski begitu, pertumbuhan kredit belum terlihat inklusif. Sebab kredit UMKM hanya tumbuh 2,7% yoy, jauh ketinggalan dari ekspansi kredit secara agregat. Padahal, kredit korporasi tumbuh hingga 20,3% (Rp5.337,3 triliun), dan kredit kepada perorangan bahkan masih tumbuh 3,6% (Rp3.676,6 triliun).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ekspansi kredit belum bisa dinikmati secara merata ke semua kelompok debitur, khususnya UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi domestik. Romantisme soal UMKM jadi tulang punggung ekonomi sepertinya belum dibarengi dengan akses terhadap pembiayaan perbankan, yang justru masih minim.

Kenaikan kredit ke UMKM ditopang oleh kredit usaha mikro yang tumbuh jadi 3,1% yoy pada September dari 2,6% bulan sebelumnya. Kemudian kredit usaha kecil tumbuh jadi 1,6% yoy dari 1% yoy, kredit usaha menengah melambat jadi 3,6% yoy dari 3,8% yoy, kredit investasi stagnan di 14,9% yoy, dan kredit modal kerja UMKM justru berkontraksi 2,6% yoy.

Kesenjangan antara kredit investasi dan modal kerja di sektor UMKM menandakan pembiayaan untuk pengadaan aset saat ini lebih kuat ketimbang pembiayaan untuk kebutuhan operasional sehari-hari.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi berpendapat, kontraksi kredit modal kerja UMKM terjadi kala kredit investasi UMKM tumbuh jadi sinyal bahwa pembiayaan kegiatan rutin menghadapi tekanan.

"Modal kerja membiayai bahan baku, persediaan, upah, dan piutang dagang. Kekurangannya dapat menghentikan produksi meskipun permintaan tersedia," sebut Syafruddin kepada Bloomberg Technoz.

Sementara, kredit investasi biasanya membiayai pembelian mesin, bangunan, atau ekspansi yang memiliki aset pendukung dan tenor lebih panjang. Perbedaan itu mencerminkan bank lebih mudah membiayai aset beragunan, sementara kredit operasional menghadapi risiko arus kas yang lebih besar.

Syafruddin menambahkan, kontraksi modal kerja juga berpotensi terjadi akibat UMKM sengaja mengurangi persediaan atau menggunakan kas internal akibat permintaan melemah.

Daya Beli Tahan Ekspansi Kredit UMKM

Data BI soal kredit juga menunjukkan adanya pelemahan daya beli yang tergambar pada pelemahan kredit konsumsi. Kredit konsumsi pada September tercatat tumbuh 4,7% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan Agustus yang sebesar 5% yoy.

Pelemahan ini dipicu oleh perlambatan pertumbuhan kredit multiguna jadi 6,5% yoy dari 7,2% yoy. Diikuti kredit kendaraan bermotor yang masih berkontraksi 9,7% yoy, meski membaik dari kontraksi bulan sebelumnya di 10,3% yoy. Sementara kredit kepemilikan rumah masih tumbuh sangat terbatas jadi 4,3% yoy dari 4,2% yoy.

Kondisi ini mencerminkan adanya kehati-hatian konsumen, keterbatasan daya beli, harga barang yang tinggi, dan tingginya biaya pembiayaan akibat BI Rate sempat dikerek sebanyak 100 basis poin (bps) tahun ini.

Meski antara kredit konsumsi dan UMKM tidak terkait secara langsung, pelemahan di segmen kredit ini jadi gambaran tertahannya konsumsi masyarakat yang berimbas pada pertumbuhan penjualan UMKM yang mengandalkan konsumsi sebagai motor penggerak.

Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan insentif yang bisa menopang pertumbuhan UMKM, utamanya dari sisi daya beli masyarakat. Seperti insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM serta PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya. Program ini diharapkan bisa menjaga konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat transaksi pada usaha kecil dan menengah.

Tantangan Pembiayaan

Selain insentif tersebut, pemerintah juga memiliki sederet program pembiayaan yang mendukung UMKM. Hingga 23 September, pemerintah mengklaim telah menyalurkan KUR sebesar Rp232,66 triliun dan menjangkau 3,61 juta debitur, sekaligus mendukung sekitar 10,83 juta tenaga kerja.

Menurut Syafruddin, program pemerintah memang memang dapat menjangkau debitur lama, mengganti fasilitas yang telah jatuh tempo, atau memperbaiki persyaratan pinjaman tanpa tambahan saldo kredit yang besar. Namun di sisi lain, sebagian pelaku usaha juga enggan menambah utang ketika pesanan menurun dan biaya operasional meningkat.

Sementara itu, dari sisi penawaran, bank tetap menghadapi infiriasi keuangan yang terbatas, agunan yang kurang memadai, serta biaya melayalin pinjaman kecil yang relatif tinggi.

"Fragmentasi data serta lemahnya pendampingan usaha memperbesar hambatan tersebut," kata Syafruddin.

Ia menilai, perluasan kredit UMKM harus menggabungkan perbaikan informasi, pembagian risiko, serta penguatan permintaan usaha. Pemerintah dapat memperkuat penjaminan parsial yang berbasis risiko, pendampingan pembukuan, serta akses UMKM kepada pengadaan dan rantai pasok perusahaan besar. Insentif kepada bank sebaiknya dikaitkan dengan tambahan debitur produktif dan peningkatan pembiayaan bersih, bukan hanya besarnya portofolio yang diberi label inklusif.

Selain itu, penjaminan wajib disertai pembagian kerugian yang wajar agar bank tetap terdorong memeriksa kualitas kredit. Keberhasilan perlu diukur melalui jumlah peminjam baru, tingkat persetujuan, bunga efektif, pertumbuhan modal kerja, rasio kredit bermasalah, dan keberlanjutan usaha. Evaluasi idealnya juga membandingkan penjualan, produktivitas, serta penyerapan tenaga kerja penerima dan kelompok pembanding.

"Targetnya bukan kredit murah untuk semua pemohon, melainkan akses yang lebih adil bagi UMKM yang layak, disertai risiko perbankan yang terkendali," tandas Syafruddin.

Angka Kemiskinan Turun Jadi 13,12 Persen, Pemkab Wonosobo Raih Mandaya Awards 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 16:30 WIB

<https://jateng.tribunnews.com/wonosobo-hebat/1270788/angka-kemiskinan-turun-jadi-1312-persen-pemkab-wonosobo-raih-mandaya-awards-2026>

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo dalam menekan angka kemiskinan membuahkan hasil.

Pemkab Wonosobo meraih penghargaan Mandaya Awards 2026 kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan, setelah mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin pada 2026.

Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut diserahkan dalam puncak acara Mandaya Awards 2026 di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan data Pemkab Wonosobo, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut turun dari 13,34 persen pada 2025 menjadi 13,12 persen pada 2026.

Penurunan ini diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 1.620 jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 104.670 orang.

Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

Intervensi dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan sosial, peningkatan kualitas tempat tinggal, hingga penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sepanjang 2025, Pemkab Wonosobo merealisasikan perbaikan 1.001 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, sebanyak 663 anak menerima beasiswa, sementara pembangunan sanitasi dilakukan untuk 231 keluarga.

Pemkab Wonosobo juga memberikan bantuan sosial dan perlindungan jaminan kesehatan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Afif, keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari penurunan angka kemiskinan ataupun penghargaan yang diraih. Hal yang lebih penting adalah dampak program terhadap kehidupan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat Wonosobo.

Namun, yang paling penting bukan penghargaan yang kita terima, melainkan bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Afif.

Ia menegaskan, Pemkab Wonosobo akan terus mendorong program yang mampu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan usaha, memperoleh pekerjaan, dan memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan, dari yang semula berorientasi pada pemberian bantuan menjadi upaya membangun pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan, keterlibatan aktif masyarakat, keberlanjutan program, serta hasil yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak sekadar memenuhi formalitas kegiatan.

Sementara itu, Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Abdul Haris, menyampaikan bahwa Mandaya Awards melibatkan 764 kegiatan dan inovasi dengan sekitar 1.600 penggerak.

Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Program yang dijalankan harus mampu meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin berdaya, mandiri, dan memiliki peluang memperbaiki kesejahteraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Wonosobo berkomitmen memperkuat berbagai strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satunya melalui optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung ketepatan sasaran program.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat, disertai perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas peluang ekonomi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, serta membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik.

Penghargaan Mandaya Awards 2026 menjadi dorongan bagi Pemkab Wonosobo untuk menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan.

Pemerintah daerah berharap upaya penurunan kemiskinan dapat terus diperkuat melalui program yang tepat sasaran, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan di Wonosobo tidak hanya berfokus pada penurunan angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri. (ima)

Percepat Realisasi APBD 2026, Bupati Tegal Ischak Tegaskan Kualitas Tetap Prioritas

Selasa, 27 Oktober 2026 10:16 WIB

Penulis: Desta Leila Kartika, Editor: muslimah

<https://jateng.tribunnews.com/inspire-slawi/1270749/percepat-realisasi-apbd-2026-bupati-tegal-ischak-tegaskan-kualitas-tetap-prioritas>

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman meminta perangkat daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III Tahun 2026, di Ruang Rapat Bupati Tegal, Senin (26/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Ischak menyoroti realisasi fisik APBD yang per 30 September 2026 tercatat sekitar 68 persen, sedangkan realisasi keuangan sekitar 61 persen atau setara Rp1,8 triliun.

Capaian keuangan itu masih di bawah target Rencana Kerja Operasional (RKO) yang seharusnya sekitar 75 persen pada akhir Triwulan III.

Selisih antara realisasi fisik dan keuangan juga menjadi perhatian.

Selisih itu menunjukkan ada pekerjaan yang sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam pembayaran atau laporan keuangan.

Atas capaian tersebut, Ischak meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mengevaluasi kegiatan yang belum mencapai target, terutama pekerjaan strategis dan kegiatan beranggaran besar.

Jadwal pelaksanaan, perkembangan fisik, serta proses administrasi dan pembayaran harus dipantau agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Hambatan administratif, teknis, maupun pengadaan diminta segera diidentifikasi, lalu disusul langkah penyelesaian yang konkret.

“Percepatan tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan. Kita harus mengejar target, tetapi kualitas tetap menjadi prioritas,” tegas Bupati Ischak, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (27/10/2026).

Ia menekankan, percepatan harus dilakukan melalui tanggung jawab penuh kepala perangkat daerah, penguatan koordinasi oleh Sekretaris Daerah, dan pengawasan terhadap kualitas hasil pembangunan.

Penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Hasil pekerjaan harus sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di luar soal percepatan, Ischak mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga profesionalisme dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, serta pelaksanaan proyek.

Setiap tahapan harus berjalan transparan, sesuai peraturan perundang-undangan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, serta pungutan liar.

"Data capaian harus disampaikan secara jujur, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar mengevaluasi kinerja, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan," kata Bupati Ischak.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Arief Ardian, menjelaskan evaluasi POK Triwulan III memakai data dengan batas waktu (cut-off) 30 September 2026.

Data itu dihimpun dari laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, termasuk kegiatan strategis daerah, kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Arief, data realisasi fisik dan keuangan digunakan untuk mengidentifikasi deviasi, hambatan, dan kegiatan yang memerlukan tindak lanjut.

Proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun dianalisis dengan basis APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk memperkirakan ruang penyerapan dan menentukan langkah percepatan.

“Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang realistis, memperkuat pengendalian internal, serta melaksanakan pemantauan secara berkala,” jelas Arief.

Langkah itu, menurut dia, dimaksudkan agar seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Arief berharap rapat tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai capaian kinerja Triwulan III, identifikasi permasalahan beserta penyebabnya, dan kesepakatan tindak lanjut yang spesifik, terukur, serta memiliki batas waktu penyelesaian.

"Koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat, khususnya untuk kegiatan strategis yang membutuhkan penanganan bersama," pungkasnya. (dta)

Ruang Fiskal Dinilai Makin Tipis Imbas Lonjakan Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah

Selasa, 27 Oktober 2026 15:47 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ruang-fiskal-dinilai-makin-tipis-imbis-lonjakan-harga-minyak-dan-pelemahan-rupiah>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 semakin meningkat di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah hingga akhir tahun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rexndy Malinet memperkirakan defisit APBN 2026 masih dapat dijaga di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, ruang fiskal yang tersisa semakin terbatas seiring meningkatnya tekanan dari sektor energi.

Menurut Yusuf, outlook defisit APBN 2026 akan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,68% terhadap PDB.

Dengan basis PDB yang sama, batas defisit 3% setara dengan sekitar Rp 773 triliun. Artinya, ruang yang tersisa hanya sekitar Rp 39 triliun.

"Bantalan ini cukup tipis dan mudah tergerus jika tekanan harga energi terus berlanjut," ujar Yusuf kepada KONTAN, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap APBN semakin besar karena asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam outlook pemerintah masih sekitar US\$ 83 per barel.

Sementara itu, ICP pada September 2026 telah mencapai US\$ 112,81 per barel.

Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 18.135 per dolar AS, jauh lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV 2026 sebesar Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun di atas outlook pemerintah.

Perkiraan ini belum memperhitungkan tambahan kuota Peralite dan kemungkinan kenaikan subsidi listrik.

Dengan tekanan tersebut, Yusuf menilai defisit APBN berisiko mendekati batas 3% terhadap PDB. Meski demikian, ia memperkirakan defisit hingga akhir 2026 masih berada di kisaran 2,85%-2,95% terhadap PDB.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penahan, antara lain pertumbuhan pendapatan negara yang masih kuat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target, serta realisasi belanja kuartal IV yang biasanya tidak terserap seluruhnya.

Selain itu, kenaikan harga komoditas dan pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan penerimaan migas dalam denominasi rupiah. Faktor-faktor tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menjaga defisit agar tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan tekanan fiskal tidak lagi sekadar risiko, melainkan mulai terlihat dari konsentrasi pembentukan defisit pada akhir tahun.

Hingga September 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Dengan demikian, lebih dari separuh defisit tahunan berpotensi terbentuk hanya dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Pada saat yang sama, pemerintah masih harus memenuhi kebutuhan pembiayaan di tengah kenaikan imbal hasil atau yield surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun yang telah mencapai sekitar 7,46%.

Yusuf menilai pemerintah perlu mewaspadai risiko penundaan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina dan PT PLN untuk menjaga defisit tetap di bawah 3% terhadap PDB.

Menurut dia, penundaan pembayaran memang dapat menekan defisit secara nominal pada tahun berjalan. Namun, langkah tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah, melainkan menggeser beban fiskal ke tahun berikutnya.

Risiko tersebut perlu diperhatikan karena APBN 2027 masih menggunakan asumsi ICP sebesar US\$ 75 per barel dan nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS.

"Jadi, angka defisit tahun ini bisa tetap terkendali, tetapi kesehatan fiskalnya belum tentu sebaik yang terlihat," jelas Yusuf.

Untuk menjaga kesehatan fiskal hingga akhir tahun, Yusuf menyarankan pemerintah lebih disiplin mengelola belanja pada kuartal IV 2026. Belanja yang kurang mendesak perlu ditahan tanpa mengorbankan perlindungan sosial dan belanja produktif.

Pemerintah juga perlu memastikan tambahan kuota Peralite sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta disertai pembatasan penerima. Dengan demikian, tambahan subsidi tidak membebani APBN secara berlebihan.

Sementara itu, apabila pemerintah menambah subsidi atau memberikan bantuan listrik, kebijakan tersebut sebaiknya difokuskan kepada rumah tangga kecil agar anggaran yang dikeluarkan lebih tepat sasaran.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pinjaman program dengan biaya lebih rendah. Langkah ini dinilai perlu dipertimbangkan di tengah tingginya yield SUN yang berpotensi meningkatkan biaya penerbitan utang baru.

Yusuf juga menekankan pentingnya transparansi mengenai nilai kompensasi energi yang telah dibayarkan pemerintah serta kewajiban yang berpotensi dibawa ke tahun berikutnya.

Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar kondisi fiskal dapat dinilai secara lebih utuh, tidak hanya berdasarkan angka defisit pada tahun berjalan.

"Tanpa transparansi, defisit di bawah 3% hanya menjadi angka formal yang belum menggambarkan seluruh beban fiskal," pungkasnya.

Tingkat Pengangguran RI Turun ke 4,65%, Kemenko Perekonomian: Terendah Sejak 1994

Selasa, 27 Oktober 2026 12:59 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-pengangguran-ri-turun-ke-465-kemenko-perekonomian-terendah-sejak-1994>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang perekonomian membeberkan, perkembangan indikator ketenagakerjaan nasional pada tahun 2026 mencatatkan tren positif yang sejalan dengan penguatan berbagai variabel ekonomi makro Indonesia.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil ditekan hingga menyentuh angka 4,65%. Angka ini menandai capaian terendah pengangguran dan mendekati level stabilitas ketenagakerjaan sejak 1994.

“Pemerintah terus memantau dinamika ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi. Capaian TPT 4,65% ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangannya, Senin (27/10/2026).

Secara metodologi standar internasional (International Labour Organization/ILO) dan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.

Capaian TPT sebesar 4,65% di tahun 2026 menjadi bukti nyata kuatnya daya serap pasar kerja nasional, di mana perekonomian mampu membawa rasio pengangguran kembali menyentuh level yang nyaris serendah tahun 1994 sebesar 4,36%.

Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan efektivitas pemulihan ekonomi nasional yang berjalan secara konsisten.

Haryo menambahkan, capaian ini menjadi kian signifikan mengingat basis angkatan kerja Indonesia di tahun 2026 telah berkembang pesat mencapai 155,41 juta orang, atau hampir dua kali lipat dibanding basis angkatan kerja pada era 1990-an yang berada di kisaran 83,32 juta orang.

Mampu menekan TPT hingga mendekati level terendah di tengah basis angkatan kerja yang melonjak masif menegaskan pesatnya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

Sebagai perbandingan perjalanan historis ketenagakerjaan nasional, indikator TPT sempat mengalami lonjakan signifikan pada periode 2005 yang menyentuh 11,24%, akibat lesunya penyerapan tenaga kerja dan tekanan ekonomi domestik pasca krisis moneter yang belum menunjukkan perbaikannya, serta gejolak pandemi COVID-19 pada 2020 sebesar 7,07%.

Tren penurunan yang konsisten hingga mencapai 4,65% di tahun 2026 menunjukkan efektivitas penanganan ekonomi dan pemulihan daya saing industri nasional.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui program pelatihan vokasi, upskilling, dan peningkatan utilisasi industri. Fokus kita bukan hanya mempertahankan angka pengangguran di tingkat rendah, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” pungkasnya.

Dinas Perdagangan Kudus catat penerimaan pasar capai Rp13,92 miliar

Selasa, 27 Oktober 2026 11:00 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650667/dinas-perdagangan-kudus-catat-penerimaan-pasar-capai-rp1392-miliar>

Kudus (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah (PKD) dan retribusi pasar tradisional hingga 20 Oktober 2026 mencapai Rp13,92 miliar.

"Pemasukan sebesar itu, dari retribusi pelayanan pasar tradisional serta pemakaian kekayaan daerah," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Agus Sumarsono di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan dari target penerimaan sebesar Rp27,86 miliar, meliputi penerimaan dari retribusi pelayanan pasar, serta pemakaian kekayaan daerah (PKD).

Untuk target penerimaan retribusi pasar, baik pelataran, los, dan kios, kata dia, sebesar Rp11,48 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp5,44 miliar atau 47,4 persen.

Sementara itu, ia mengatakan target PKD ditetapkan sebesar Rp16,38 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp8,48 miliar atau 51,93 persen.

Ia mengatakan pemerintah kabupaten mengupayakan realisasi penerimaan daerah hingga akhir tahun bisa mencapai 100 persen.

Dari 25 pasar tradisional di Kabupaten Kudus, kata dia, penyumbang pemasukan daerah terbesar dari Pasar Kliwon hampir separuh dari target, disusul Pasar Bitingan, dan Pasar Jember.

Dalam rangka memenuhi target penerimaan, Dinas Perdagangan Kudus juga menerapkan retribusi elektronik karena tunggakan retribusinya menjadi berkurang. Hanya saja, saat ini baru terlaksana di Pasar Kliwon dan Bitingan, sedangkan pasar lainnya belum diterapkan.

Upaya terbaru, yakni dengan menggabungkan beberapa komponen penarikan retribusi menjadi satu komponen pembayaran, sehingga memudahkan pedagang karena pembayarannya cukup sekali.

Pemkab Magelang membidik investasi yang mampu berdayakan masyarakat

Rabu, 28 Oktober 2026 13:32 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650879/pemkab-magelang-membidik-investasi-yang-mampu-berdayakan-masyarakat>

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berkomitmen mendampingi investor dalam memenuhi persyaratan perizinan sehingga tidak menghambat masuknya investasi yang diharapkan juga mampu berdayakan masyarakat di daerah tersebut.

"Pemkab Magelang tidak akan mempersulit. Kami berharap investasi yang ada merupakan investasi berkelanjutan, dengan arah pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman kami dalam mendampingi para pengusaha dan investor untuk berkolaborasi," kata Bupati Magelang Grengseng Pamuji dalam kegiatan Magelang Growth Investment in Collaboration (MAGiC) 2026 di Magelang, Selasa (27/10).

Ia mengatakan investasi di Kabupaten Magelang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, lebih dari itu harus mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Selain itu, ia mengatakan investasi yang masuk harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

"Pemerintah Kabupaten Magelang tentu berharap investasi yang ada nanti selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Magelang, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat. Kami melihat investasi, pemerintah, dan dunia usaha itu muaranya adalah pemberdayaan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan Kabupaten Magelang memiliki keunggulan komparatif yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan industri mikro diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

Pengembangan Tumpeng Menoreh di Desa Ngargoretno, menurut dia, menjadi salah satu inspirasi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah lain. Kolaborasi dengan investor dan pelaku usaha dinilai penting agar potensi daerah tidak berhenti sebagai keunggulan alam, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

DJPb Jateng sebut ketidakpastian global uji ketahanan fiskal 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 13:27 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650859/djpb-jateng-sebut-ketidakpastian-global-uji-ketahanan-fiskal-2026>

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah menyoroti dinamika ekonomi global dan nasional sebagai tantangan dalam implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sehingga pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara cermat dan akuntabel.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu, mengatakan prospek ekonomi global masih dibayangi perkembangan geopolitik, termasuk konflik yang berlangsung di Timur Tengah dan potensi konflik di Eropa.

"Dinamika tersebut turut memengaruhi volatilitas pasar keuangan dan biaya pengangkutan minyak melalui laut," katanya dalam Kuliah Umum Kebijakan Fiskal bertema "APBN untuk Negeri: Memahami Kebijakan Fiskal, Mengawal Akuntabilitas, dan Mendorong Pembangunan" di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Di sisi lain, kata dia, proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2025.

Menurut dia, fluktuasi harga komoditas juga menjadi perhatian karena pergerakannya dapat memengaruhi pendapatan maupun belanja negara.

Oleh karena itu, pengelolaan APBN perlu mempertimbangkan perkembangan ekonomi global sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran tetap sesuai sasaran.

“Berdasarkan data, realisasi APBN hingga 30 September 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu,” katanya.

Dengan realisasi tersebut, kata dia, APBN mengalami defisit Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp125,5 triliun.

Selain itu, pendapatan negara tumbuh 25,5 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen.

“Perkembangan tersebut menjadi salah satu gambaran pelaksanaan kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah,” katanya.

Di tingkat regional, kata dia, perekonomian Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 5,89 persen.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen.

Sementara itu, inflasi Jawa Tengah pada September 2026 tercatat 3,18 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan Agustus 2026 sebesar 3,08 persen.

Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 mencapai 4,30 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 9,21 persen, turun dibandingkan September 2025 sebesar 9,39 persen.

Menurut Bayu, indikator tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, juga mendukung pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam pengelolaan keuangan negara, Kanwil DJPb Jawa Tengah menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan pelaksanaan anggaran,” katanya .

Ia mengatakan peran tersebut juga mencakup pendampingan satuan kerja dan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan belanja negara mendukung berbagai program prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

“Selain itu, transfer ke daerah perlu dikelola secara efektif untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah,” katanya.

Investasi di Temanggung hingga 26 Oktober 2026 mencapai Rp1,8 triliun

Selasa, 27 Oktober 2026 15:30 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650695/investasi-di-temanggung-hingga-26-oktober-2026-mencapai-rp18-triliun>

Temanggung (ANTARA) - Realisasi investasi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, hingga 26 Oktober 2026 mencapai Rp1,806 triliun atau sekitar 84 persen dari target tahunan sebesar Rp2,15 triliun.

Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja di wilayah setempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Agus Munadi di Temanggung, Selasa, menyampaikan, berdasarkan data hingga 26 Oktober 2026, realisasi investasi tersebut mencakup 8.791 kegiatan usaha atau proyek.

"Dari jumlah usaha tersebut, sebanyak 22.307 tenaga kerja telah terserap," katanya.

Ia mengatakan, capaian investasi tersebut menunjukkan bahwa penanaman modal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain mendorong perkembangan usaha, masuknya investasi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Menurut dia, peningkatan aktivitas investasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, katanya, pengembangan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu upaya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap, Pemkab Temanggung terus mendorong kemudahan pelayanan perizinan dan menciptakan kondisi yang mendukung masuknya investor. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan usaha yang dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Ia mengampakan, hingga akhir 2026 realisasi investasi masih diupayakan untuk mencapai target sebesar Rp2,15 triliun.

Dengan capaian sementara Rp1,806 triliun, masih terdapat selisih sekitar Rp344 miliar yang perlu dikejar agar target investasi tahunan tersebut dapat tercapai.

Siapkan Strategi, DPMPTSP Jateng Optimistis Raih Investasi Rp 110 Triliun di 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 21:47 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/bisnis/1270830/siapkan-strategi-dpmptsp-jateng-optimistis-raih-investasi-rp-110-triliun-di-2026>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, Pemprov Jateng optimistis mampu merealisasikan target investasi mencapai Rp 110 triliun hingga akhir 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Johan Hadiyanto mengatakan, target resmi investasi yang ditetapkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke Jateng di angka sebesar Rp 99,09 triliun pada 2026.

Namun, berkaca pada pencapaian tahun lalu yang menembus Rp 110 triliun, ia yakin angka Rp 110 triliun itu dapat kembali dicapai pada 2026 ini.

Meski demikian, capaian investasi itu tidak hanya dari penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN), melainkan harus digabung dengan capaian sektor UMK.

Pada semester I/2026, realisasi investasi UMK sudah mencapai Rp 11,4 triliun, terdiri dari Usaha Mikro sebesar Rp 10,11 triliun dan Usaha Kecil sebesar Rp 1,29 triliun. Sementara, capaian investasi Jateng hingga Januari-September 2026 mencapai Rp 72,54 triliun.

"Kami sangat optimistis mencapai Rp 110 triliun, itu target dari Pak Gubernur Jateng Ahmad Luthfi," katanya, dalam rilis capaian investasi Jateng, Senin (26/10).

Johan menuturkan, tolok ukur lain yakni soal pertumbuhan ekonomi Jateng pada semester I/2026 yang tercatat berada di angka 5,8 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional di saat ekonomi global yang tidak baik-baik saja.

Ia menyebut, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mencapai target investasi itu. Pertama yakni berkomitmen menjamin keamanan serta kenyamanan bagi para calon investor maupun pemodal yang telah beroperasi di Jateng.

"Sudah ada kesepakatan antara Pak Kapolda dan Pangdam, berkomitmen menjaga kondusivitas Provinsi Jawa Tengah, sehingga investor atau calon investor nyaman dan akan senang hati masuk ke Jawa Tengah," bebernya.

Kedua, dia menambahkan, pihaknya juga melakukan pengawalan perizinan end-to-end. Pihaknya mendampingi investor secara intensif, mulai dari tahap kepeminatan hingga realisasi di lapangan.

Melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Jateng tercatat telah menerbitkan sekitar 66.000 izin usaha. "Kami dampingi mulai dari kepeminatan sampai dengan realisasi," ujarnya.

Tambah 12 KI

Langkah ketiga, Johan mengungkapkan, ada rencana penambahan 12 kawasan industri (KI) baru, sebagai langkah mengatasi keterbatasan lahan pada 12 kawasan industri yang ada atau existing, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Dalam upaya itu, ia berujar, pemprov tengah berkoordinasi dengan pemkab/pemkota, pusat, serta Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menurut dia, rencana sebaran KI baru itu meliputi wilayah Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, hingga Grobogan.

"Sebanyak 12 daerah ini kami proyeksi dan rencana kami untuk penambahan kawasan industri baru," jelasnya.

Selain stabilitas iklim usaha, Johan menyatakan, langkah keempat Jateng yakni menawarkan keunggulan komparatif berupa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang kompetitif.

Dari dukungan pendidikan Vokasi, Jateng memiliki 1.557 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri maupun swasta dengan total lebih dari 800.000 siswa dari berbagai jurusan.

Pemprov juga menerapkan prinsip link and match untuk menyesuaikan keahlian lulusan dengan kebutuhan spesifik investor.

Sementara dari jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), terdapat 2.002 Vocational Training Center atau LPK terdiri dari milik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang siap menjembatani kebutuhan tenaga ahli.

Ia menekankan pula UMK Jateng kompetitif, bukan sekadar murah, sekaligus menjadi poin kepeminatan tersendiri bagi investor.

"Kami memanfaatkan peluang itu, membuka kepada asing untuk masuk. Tentunya dengan proses perizinan dan tata ruang serta lingkungan yang sesuai dengan apa yang diregulasikan oleh daerah," tandasnya. (Iwan Arifianto)

Octofest Jepara 2026 Gandeng UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Selasa, 27 Oktober 2026 20:41 WIB

Penulis: Saiful Ma Sum, Editor: Deni Setiawan

<https://jateng.tribunnews.com/jepara-memesona/1270825/octofest-jepara-2026-gandeng-umkm-dan-pelaku-ekonomi-kreatif>

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengrajin Sentra Patung dan Ukir Mulyoharjo, Simon Handoko menuturkan, Octofest tidak hanya berpusat pada pameran kerajinan mebel dan ukir.

Tidak pula sebatas pameran aneka ragam patung yang dibuat dari berbagai jenis kayu.

Lebih dari itu, pameran ini dikonsep lebih mewah dengan menghadirkan puluhan pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif (Ekraft).

Selama enam hari pameran berlangsung, lanjut dia, 117 galeri produk mebel dan ukir mewarnai sepanjang jalan Sentra Patung Mulyoharjo.

Ada pula 50 stand UMKM yang disiapkan untuk menampilkan beragam karya UMKM dan pelaku Ekraft yang tersebar di Kabupaten Jepara.

Tak hanya itu, disediakan pula stand khusus untuk menampilkan berbagai produk pelaku usaha binaan Dekranasda. Mulai dari Dekranasda Kabupaten Jepara, Pati, Tegal, dan beberapa Dekranasda dari kabupaten/kota lainnya.

"Dari beberapa sudut khusus pameran, ada galeri perajin, stand Dekranasda dan asosiasi lainnya, serta stand UMKM dan Ekraft, di tengahnya ada panggung utama sebagai pusat pameran."

"Tempat beragam pertunjukan dan hiburan ditampilkan," terangnya, Selasa (27/10/2026).

Dia berharap Octofest tahun ini bisa menampilkan beragam potensi yang ada secara all out.

Perajin juga siap melakukan penataan galeri masing-masing agar lebih menarik untuk dikunjungi.

"Untuk masing-masing perajin bisa menampilkan produk kerajinan terbaiknya di galeri sendiri."

"Dari total ada sekira 180 perajin mebel dan ukir di Mulyoharjo, 117 perajin yang dilibatkan sepanjang jalan berlangsungnya festival," ujar dia. (*)

Angka Kemiskinan Turun Jadi 13,12 Persen, Pemkab Wonosobo Raih Mandaya Awards 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 16:30 WIB

<https://jateng.tribunnews.com/wonosobo-hebat/1270788/angka-kemiskinan-turun-jadi-1312-persen-pemkab-wonosobo-raih-mandaya-awards-2026>

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo dalam menekan angka kemiskinan membuahkan hasil.

Pemkab Wonosobo meraih penghargaan Mandaya Awards 2026 kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan, setelah mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin pada 2026.

Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut diserahkan dalam puncak acara Mandaya Awards 2026 di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan data Pemkab Wonosobo, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut turun dari 13,34 persen pada 2025 menjadi 13,12 persen pada 2026.

Penurunan ini diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 1.620 jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 104.670 orang.

Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

Intervensi dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan sosial, peningkatan kualitas tempat tinggal, hingga penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sepanjang 2025, Pemkab Wonosobo merealisasikan perbaikan 1.001 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, sebanyak 663 anak menerima beasiswa, sementara pembangunan sanitasi dilakukan untuk 231 keluarga.

Pemkab Wonosobo juga memberikan bantuan sosial dan perlindungan jaminan kesehatan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Afif, keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari penurunan angka kemiskinan ataupun penghargaan yang diraih. Hal yang lebih penting adalah dampak program terhadap kehidupan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat Wonosobo.

Namun, yang paling penting bukan penghargaan yang kita terima, melainkan bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Afif.

Ia menegaskan, Pemkab Wonosobo akan terus mendorong program yang mampu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan usaha, memperoleh pekerjaan, dan memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan, dari yang semula berorientasi pada pemberian bantuan menjadi upaya membangun pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan, keterlibatan aktif masyarakat, keberlanjutan program, serta hasil yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak sekadar memenuhi formalitas kegiatan.

Sementara itu, Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Abdul Haris, menyampaikan bahwa Mandaya Awards melibatkan 764 kegiatan dan inovasi dengan sekitar 1.600 penggerak.

Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Program yang dijalankan harus mampu meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin berdaya, mandiri, dan memiliki peluang memperbaiki kesejahteraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Wonosobo berkomitmen memperkuat berbagai strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satunya melalui optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung ketepatan sasaran program.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat, disertai perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas peluang ekonomi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, serta membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik.

Penghargaan Mandaya Awards 2026 menjadi dorongan bagi Pemkab Wonosobo untuk menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan.

Pemerintah daerah berharap upaya penurunan kemiskinan dapat terus diperkuat melalui program yang tepat sasaran, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan di Wonosobo tidak hanya berfokus pada penurunan angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri. (ima)

Kejutkan Pasar, Bank Sentral Selandia Baru Tahan Suku Bunga

Rabu, 28 Oktober 2026 12:40 WIB

Tracy Withers

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126014/kejutkan-pasar-bank-sentral-selandia-baru-tahan-suku-bunga/2>

Bloomberg, Bank sentral Selandia Baru secara tak terduga mempertahankan suku bunga acuannya, dengan alasan ketidakpastian global yang membebani permintaan domestik. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara terbelah itu membuat dolar Selandia Baru anjlok.

Komite Kebijakan Moneter Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mempertahankan suku bunga resmi atau Official Cash Rate (OCR) di level 2,75 persen pada Rabu (28/10) di Wellington. Keputusan tersebut sesuai dengan perkiraan hanya dua dari 25 ekonom yang disurvei Bloomberg. Sementara itu, mayoritas ekonom memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase.

“Dalam pertemuan kali ini, kami menilai langkah yang tepat adalah tetap mengikuti komunikasi kami sebelumnya, yakni mempertahankan OCR sembari tetap memberi sinyal bahwa kenaikan OCR lebih lanjut sangat mungkin terjadi dalam pertemuan-pertemuan mendatang,” kata Gubernur RBNZ Anna Breman dalam wawancara dengan Bloomberg Television.

Sebelumnya, RBNZ menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komite sepakat kebijakan moneter yang lebih ketat kemungkinan diperlukan, tetapi keputusan tersebut tetap bergantung pada prospek ekonomi.

Keputusan untuk menahan suku bunga setelah dua kali kenaikan berturut-turut pada kuartal III menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih berhati-hati dalam menentukan seberapa agresif mereka harus mengendalikan inflasi, terutama karena pemulihan ekonomi masih rapuh. Sebagian besar ekonom memperkirakan RBNZ akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, dengan kesempatan berikutnya pada Desember.

RBNZ menjadi bank sentral pertama yang diperkirakan mengambil keputusan mempertahankan suku bunga pekan ini. Federal Reserve (The Fed) serta bank sentral di zona euro dan Jepang kemungkinan juga akan menahan suku bunga, sembari menunggu waktu yang tepat sebelum mempertimbangkan kenaikan lebih lanjut.

Dolar Selandia Baru merosot hingga 1,7 persen menjadi 55,86 sen AS sesaat setelah keputusan diumumkan, sebelum beranjak naik dari level terendahnya. Obligasi domestik menguat, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bertenor dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan suku bunga turun 12 basis poin menjadi 3,82 persen.

Breman mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa Komite Kebijakan Moneter telah memperkirakan akan terjadi pergerakan nilai tukar setelah keputusan tersebut diumumkan.

“Tentu saja, kami menyambut penguatan dolar Selandia Baru ketika tekanan inflasi meningkat,” kata Breman. “Namun, kami harus mempertimbangkannya bersama seluruh faktor lain yang memengaruhi inflasi dalam jangka menengah. Karena itu, kami terus memantau dan menilai dengan cermat dampaknya terhadap inflasi ke depan.”

‘Benar-Benar Terkejut’

Keputusan mempertahankan suku bunga mengejutkan para ekonom dan pelaku pasar. Investor sebelumnya memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada Rabu mencapai 95 persen.

“Kami benar-benar terkejut dengan keputusan RBNZ untuk mempertahankan suku bunga,” kata Stephen Toplis, Kepala Riset Bank of New Zealand. “Bank sentral memang tidak wajib mengikuti ekspektasi pasar dan konsensus, tetapi jarang sekali mereka mengambil keputusan yang sepenuhnya berlawanan dengan keduanya. Dengan langkah ini, RBNZ secara langsung menambah tekanan inflasi karena mendorong dolar Selandia Baru yang sudah lemah untuk semakin terpuruk.”

Komite Kebijakan Moneter memutuskan mempertahankan suku bunga dengan hasil pemungutan suara 4-3. Paul Conway, Hayley Gourley, dan Karen Silk memilih kenaikan sebesar 25 basis poin.

Anggota yang mendukung penahanan suku bunga menekankan risiko pemulihan ekonomi yang lemah, terutama pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Mereka memilih menunda keputusan pada pertemuan kali ini untuk mengamati dan menilai permintaan serta kondisi keuangan.

RBNZ menyatakan dua anggota yang mendukung penahanan suku bunga, Breman dan Prasanna Gai, “menilai bahwa kemungkinan perubahan mendadak dalam kondisi global membawa risiko yang signifikan”.

Komite menilai terdapat “risiko signifikan” terhadap prospek ekonomi global yang dapat berdampak besar pada Selandia Baru, termasuk melalui permintaan ekspor, nilai tukar perdagangan, nilai tukar mata uang, dan kondisi keuangan.

Keputusan pada Rabu diambil hanya 10 hari sebelum pemilihan umum. Pemerintahan koalisi kanan-tengah menghadapi persaingan ketat, sementara blok kiri-tengah yang dipimpin Partai Buruh mengusulkan untuk mengembalikan mandat ganda RBNZ, yakni menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan lapangan kerja.

Perdana Menteri Christopher Luxon menyoroti penurunan biaya cicilan kredit pemilikan rumah sejak dirinya menjabat pada akhir 2023 sebagai faktor yang meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, suku bunga kredit perumahan telah meningkat selama 12 bulan terakhir dan berpotensi naik lebih lanjut.

RBNZ menahan suku bunga meskipun inflasi dalam waktu dekat diperkirakan jauh lebih tinggi daripada perkiraan para pembuat kebijakan dalam pernyataan kebijakan September. Kondisi ini dipicu oleh kenaikan biaya bahan bakar dan pelemahan dolar Selandia Baru.

Proyeksi para ekonom menunjukkan inflasi akan bertahan di atas kisaran target RBNZ sebesar 1-3 persen hingga akhir 2027. Kondisi ini mendorong investor memperhitungkan kemungkinan OCR yang lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

RBNZ menyatakan inflasi, yang sedikit melambat menjadi 3,7 persen pada kuartal III, diperkirakan meningkat menjadi 4,4 persen pada kuartal IV. Namun, bank sentral menilai prospek inflasi dalam waktu dekat masih tidak pasti.

“Pertumbuhan belanja rumah tangga yang lemah membatasi kemampuan sejumlah perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen guna memulihkan margin keuntungan,” kata RBNZ. “Namun, semakin lama inflasi bertahan pada level tinggi, semakin besar risiko kenaikan biaya memengaruhi ekspektasi inflasi serta perilaku penetapan harga dan upah, sehingga membuat inflasi bertahan lebih lama.”

The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga di Tengah Tekanan Inflasi

Rabu, 28 Oktober 2026 11:10 WIB

Enda Curran

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125998/the-fed-diproyeksi-tahan-suku-bunga-di-tengah-tekanan-inflasi/2>

Bloomberg, Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mempertahankan suku bunga pada Rabu (28/10), meskipun data inflasi September tercatat lebih tinggi dari perkiraan.

Jika suku bunga tidak berubah, Gubernur The Fed Kevin Warsh kemungkinan akan menghadapi tekanan untuk menjelaskan alasan para pembuat kebijakan tidak mengambil tindakan saat ini, setelah mereka secara bulat memutuskan menaikkan suku bunga bulan lalu untuk mengatasi inflasi yang terus meningkat.

“Federal Reserve hampir pasti akan melewatkan kenaikan suku bunga pada pertemuan Oktober, sesuai dengan ekspektasi pasar,” kata Stephanie Roth, kepala ekonom Wolfe Research. Namun, setelah laporan harga konsumen dan produsen September dirilis, dia menambahkan, “Kami menilai Warsh dan anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) lainnya semakin khawatir terhadap inflasi dan tetap bertekad menaikkan suku bunga lebih lanjut. Mereka kemungkinan akan mengisyaratkan hal itu secara tersirat.”

Proyeksi yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa pejabat The Fed mendukung satu kali kenaikan suku bunga tambahan tahun ini. Warsh kemungkinan akan ditanya mengenai proyeksi tersebut saat berbicara kepada wartawan setelah pertemuan. Pada Selasa, investor memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase pada pekan ini kurang dari 10 persen, tetapi telah memperhitungkan kemungkinan kenaikan pada pertemuan kebijakan terakhir tahun ini, yang dijadwalkan pada Desember.

The Fed akan merilis pernyataan setelah pertemuan pada pukul 14.00 waktu Washington, Rabu. Warsh dijadwalkan menggelar konferensi pers 30 menit kemudian.

Inflasi

Data inflasi terbaru menunjukkan tekanan harga yang terus bertahan di berbagai sektor ekonomi. Indeks harga konsumen (IHK) pada September naik dengan laju tercepat dalam lima bulan, sementara indikator inflasi yang mendasari tren harga meningkat lebih tinggi dari perkiraan. Data tersebut kemudian disusul laporan yang menunjukkan indeks harga produsen (IHP) pada September naik dengan laju tercepat dalam lebih dari empat tahun. Meski Warsh enggan berkomentar mengenai prospek kebijakan moneter, dia kemungkinan akan menghadapi pertanyaan tentang bagaimana dirinya dan pejabat lainnya menafsirkan data terbaru tersebut.

Sinyal Kebijakan

Sejumlah pejabat penting The Fed memanfaatkan periode menjelang pertemuan pekan ini untuk meredam ekspektasi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga bulan ini.

Wakil Gubernur The Fed Philip Jefferson dan Gubernur The Fed New York John Williams, dalam pidato terpisah sekitar sebulan lalu, mengatakan bank sentral masih memiliki waktu untuk menilai kondisi ekonomi sebelum mempertimbangkan kenaikan suku bunga berikutnya. Deputy Gubernur The Fed Christopher Waller kemudian mengatakan para pejabat memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu kebijakan dan tidak harus memperketat kebijakan moneter pada dua pertemuan berturut-turut.

Warsh menghindari pemberian petunjuk mengenai arah kebijakan dan tetap berpegang pada pilihannya untuk tidak memberikan panduan tentang perkiraan suku bunga para pejabat. Dalam sebuah acara di Bangkok awal bulan ini, dia menegaskan tidak ingin mendahului hasil keputusan dalam pertemuan mana pun.

“Saya tidak percaya pada pernyataan sekarang tentang apa yang mungkin saya lakukan dalam pertemuan-pertemuan yang masih tersisa tahun ini,” katanya dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF). “The Fed memasuki babak baru, dan kami tidak lagi melakukan hal seperti itu.”

Perbedaan Pendapat

Meski The Fed diperkirakan tidak mengubah suku bunga pada Rabu, ada kemungkinan tidak semua pejabat sepakat dengan keputusan tersebut. Tiga gubernur bank regional The Fed berbeda pendapat ketika bank sentral mempertahankan suku bunga pada Juli. Mereka saat itu lebih memilih kenaikan sebesar 0,25 poin persentase dan berpotensi kembali mengambil sikap serupa bulan ini.

Salah satu pejabat yang berbeda pendapat tersebut, Gubernur The Fed Cleveland Beth Hammack, terus memperingatkan bahwa guncangan pasokan yang berulang dapat membuat perusahaan dan rumah tangga terbiasa dengan inflasi. Kondisi itu, menurutnya, akan menyulitkan pejabat bank sentral untuk meredakan tekanan harga. Gubernur The Fed Minneapolis Neel Kashkari, yang juga berbeda pendapat pada Juli, mengatakan tugas bank sentral adalah mengendalikan inflasi setelah lima tahun menghadapi guncangan pasokan. Pejabat ketiga yang berbeda pendapat pada Juli, Gubernur The Fed Dallas Lorie Logan, mengatakan awal bulan ini bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan. Namun, dia mencatat kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury) juga dapat membantu memperlambat perekonomian.

Konferensi Pers

Konferensi pers pada September berlangsung jauh lebih singkat dari biasanya dan mencakup pertanyaan dari lebih banyak media. Perubahan lebih lanjut mungkin akan dilakukan. Warsh telah mengumumkan pembentukan satuan tugas yang melibatkan para ahli eksternal. Tim tersebut antara lain bertugas meninjau jadwal konferensi pers dan aspek lain dari strategi komunikasi bank sentral.

Keyakinan Konsumen AS Naik Tak Terduga Jelang Pemilu Sela

Rabu, 28 Oktober 2026 06:45 WIB

Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125959/keyakinan-konsumen-as-naik-tak-terduga-jelang-pemilu-sela/2>

Bloomberg, Keyakinan konsumen Amerika Serikat (AS) secara tak terduga meningkat pada Oktober untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir. Kenaikan ini didorong oleh pandangan yang lebih positif terhadap pasar tenaga kerja dan kondisi bisnis.

Indeks keyakinan konsumen yang dirilis Conference Board naik 7,5 poin menjadi 91,7, tertinggi sejak Juni, menurut data yang dirilis pada Selasa (27/10). Angka tersebut melampaui seluruh proyeksi ekonom dalam survei Bloomberg.

Indeks ekspektasi konsumen untuk enam bulan ke depan naik hampir 7 poin pada Oktober menjadi 72,6. Sementara itu, indeks yang mengukur kondisi saat ini meningkat ke level tertinggi sejak April.

“Pemulihan ini sejalan dengan penurunan harga bensin eceran dari September ke Oktober,” kata Fergus McCormick, ekonom senior di Conference Board, dalam sebuah pernyataan. “Namun, meskipun

meningkat pada Oktober, keyakinan konsumen masih berada dalam tren penurunan jangka panjang yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.”

Survei tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak warga AS yang menilai kondisi bisnis baik dibandingkan buruk. Sementara itu, persentase responden yang menilai lapangan kerja tersedia melimpah naik ke level tertinggi dalam enam bulan.

Meski keyakinan konsumen meningkat pada bulan ini, masyarakat masih mengkhawatirkan dampak kenaikan harga terhadap anggaran rumah tangga serta pertumbuhan upah yang tertinggal dari inflasi. Biaya pinjaman juga belakangan meningkat, sehingga rumah, kendaraan, dan barang-barang mahal lainnya semakin sulit dijangkau.

Dengan pemilihan paruh waktu yang tinggal sepekan lagi, keterjangkauan biaya hidup tetap menjadi isu utama bagi pemilih dan memengaruhi penilaian mereka terhadap perekonomian. Namun, warga AS kini menunjukkan pandangan yang lebih positif terhadap pasar tenaga kerja, sementara tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berada pada level yang secara historis rendah.

Survei keyakinan konsumen tersebut juga menunjukkan perbaikan pada selisih antara responden yang menilai lapangan kerja tersedia melimpah dan mereka yang menganggap pekerjaan sulit didapat. Indikator ini banyak dipantau ekonom untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja.

Rencana Pembelian

Rencana konsumen untuk membeli barang-barang mahal menunjukkan hasil beragam, sementara minat untuk berlibur sedikit menurun. Meski demikian, sentimen konsumen selama ini menjadi indikator yang kurang akurat untuk memprediksi belanja pribadi, yang terbukti tetap tangguh dan terus menopang pertumbuhan ekonomi.

“Pasar tenaga kerja masih mendukung aktivitas belanja,” kata Ben Ayers, ekonom senior di Nationwide, dalam sebuah catatan. “Tren survei konsumen masih lemah, tetapi hal itu tidak menghentikan rumah tangga untuk mempertahankan laju pembelian yang solid.”

Dalam enam bulan terakhir, konsumen berusia di bawah 35 tahun dan mereka yang berpenghasilan minimal US\$100.000 menunjukkan keyakinan yang lebih tinggi. Pada Oktober, sentimen membaik di seluruh kelompok politik, terutama di kalangan pendukung Partai Republik.

Survei untuk laporan ini dilakukan pada 1-21 Oktober.

Indeks keyakinan konsumen Conference Board umumnya berfokus pada kondisi pasar tenaga kerja. Sementara itu, indeks sentimen konsumen yang dirilis secara terpisah oleh University of Michigan lebih menitikberatkan pada pandangan masyarakat mengenai kondisi keuangan pribadi dan biaya hidup. Meski demikian, kedua indeks tersebut cenderung bergerak searah dalam beberapa tahun terakhir.

Indeks sentimen konsumen University of Michigan yang dirilis pekan lalu sedikit turun ke level terendah dalam lima bulan, seiring harga-harga yang tinggi dan kenaikan suku bunga yang menekan optimisme masyarakat.

Bank Sentral Kanada Naikkan Suku Bunga ke 2,5%, Inflasi Tembus 3,2%

Rabu, 28 Oktober 2026 21:43 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-kanada-naikkan-suku-bunga-ke-25-inflasi-tembus-32>

KONTAN.CO.ID - OTTAWA. Bank Sentral Kanada alias Bank of Canada (BoC) pada Rabu (28/10/2026) menaikkan suku bunga kebijakan utamanya untuk pertama kali dalam lebih dari tiga tahun. Bank sentral tersebut juga mengatakan kenaikan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencegah lonjakan biaya energi memicu inflasi yang lebih luas.

BoC menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,5%, sesuai dengan ekspektasi pasar secara luas. Bank sentral itu juga menaikkan proyeksi inflasi 2027 menjadi 3,1%, dari perkiraan 2,0% yang disampaikan pada Juli. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kanada tahun ini diperkirakan mencapai 1,0%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 0,7%.

“Dengan prospek inflasi yang jauh lebih tinggi dan ekonomi yang menunjukkan ketahanan, kenaikan suku bunga kebijakan diperlukan untuk mengurangi risiko kenaikan harga energi yang tinggi merambat dan menjadi inflasi yang meluas,” kata Gubernur BoC Tiff Macklem dalam pernyataan pembuka kepada wartawan.

“Ada kemungkinan suku bunga kebijakan perlu dinaikkan lebih lanjut, tetapi mengingat berbagai ketidakpastian, kami akan melangkah dengan hati-hati.”

Tingkat inflasi tahunan Kanada mencapai 3,2% pada September, melampaui kisaran target bank sentral sebesar 1%–3%. Kenaikan tersebut hampir seluruhnya didorong oleh meningkatnya harga energi dan biaya transportasi yang terkait dengan energi.

Macklem mengatakan inflasi diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir tahun ini dan bertahan di sekitar 3% selama sebagian besar tahun depan, sebelum kembali mendekati target 2% pada pertengahan 2028.

“Dewan Gubernur sepakat bahwa risiko terhadap inflasi telah meningkat dan ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter semakin terbatas,” kata Macklem.

Kenaikan suku bunga ini merupakan yang pertama sejak Juli 2023 dan menjadi perubahan kebijakan pertama dalam satu tahun terakhir.

Meski telah dinaikkan, suku bunga tersebut masih berada di bawah tingkat netral, yaitu tingkat suku bunga yang tidak dianggap membatasi maupun mendorong aktivitas ekonomi.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya dan survei BoC, Macklem mengatakan bahwa penerusan kenaikan biaya kepada konsumen diperkirakan meningkat selama tahun depan sehingga mendorong inflasi secara keseluruhan.

“Kombinasi harga energi yang lebih tinggi dan peningkatan penerusan biaya memperbesar persistensi inflasi,” katanya.

Namun, ia menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah ketidakpastian, termasuk ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan kemungkinan penyelesaian konflik di Timur Tengah yang lebih cepat.

Para ekonom yang menentang kenaikan suku bunga mengatakan inflasi inti, yang tidak memperhitungkan komponen dengan harga bergejolak, masih berada di sekitar 2%. Mereka juga

menilai kenaikan suku bunga dapat menghambat pemulihan ekonomi yang masih moderat, di tengah ketegangan perdagangan dengan AS dan kondisi pasar tenaga kerja yang lemah.

Macklem mengatakan tarif baru AS akan memperlambat ekonomi Kanada pada kuartal IV. Namun, ia menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan akan kembali meningkat pada 2027, seiring berlanjutnya belanja konsumen, peningkatan ekspor, dan menguatnya investasi bisnis.

Setelah mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 3,3% pada kuartal II, ekonomi Kanada diperkirakan melambat menjadi 2% pada kuartal III dan kembali turun menjadi 0,8% pada kuartal IV, menurut laporan kebijakan moneter terbaru BoC.

Meski demikian, laporan tersebut menaikkan proyeksi produk domestik bruto (PDB) untuk 2027 dan 2028 menjadi masing-masing 2%, dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,8% untuk kedua tahun tersebut yang disampaikan pada Juli.

Macklem mengatakan tambahan pertumbuhan ini akan membantu menyerap kapasitas ekonomi yang masih menganggur atau belum dimanfaatkan.

Dolar Kanada sedikit menguat dan diperdagangkan pada C\$ 1,4050 per dolar AS, atau setara dengan 71,17 sen AS.

BoC dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga berikutnya pada 9 Desember.

Won Korea Selatan dan Peso Filipina Paling Tertekan, Rupiah Melemah ke Rp 18.185

Rabu, 28 Oktober 2026 09:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-dan-peso-filipina-paling-tertekan-rupiah-melemah-ke-rp-18185>

KONTAN.CO.ID - Sejumlah mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (28/10/2026).

Won Korea Selatan dan peso Filipina mencatatkan pelemahan terdalam di antara mata uang regional yang dipantau Reuters.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.10 GMT, won Korea Selatan melemah 0,70% ke level 1.335,60 per dolar AS. Sementara itu, peso Filipina turun 0,30% ke posisi 64,05 per dolar AS.

Rupiah juga bergerak di zona merah dengan pelemahan 0,22% ke level Rp 18.185 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp 18.145 per dolar AS.

Baht Thailand turut melemah 0,25% ke level 33,825 per dolar AS. Dolar Singapura turun 0,05% ke posisi 1,282 per dolar AS, sedangkan yen Jepang relatif stabil di level 157,95 per dolar AS.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia masih mampu menguat. Dolar Taiwan naik 0,10% ke posisi 32,42 per dolar AS, sementara ringgit Malaysia menguat 0,12% ke level 4,082 per dolar AS.

Yuan China relatif stabil di level 6,668 per dolar AS. Adapun rupee India tidak berubah di posisi 95,115 per dolar AS.

Rupiah Melemah 8,33% Sepanjang 2026

Secara kumulatif sejak akhir 2025, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang mencatatkan pelemahan cukup besar terhadap dolar AS.

Berdasarkan data Reuters, rupiah berada di level Rp 18.185 per dolar AS, melemah sekitar 8,33% dibandingkan posisi akhir tahun lalu sebesar Rp 16.670 per dolar AS.

Peso Filipina mencatatkan pelemahan kumulatif lebih besar, yakni 8,20% sejak akhir 2025. Baht Thailand juga tertekan 7,02%, sedangkan rupee India melemah 5,51%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 7,85% secara kumulatif terhadap dolar AS sejak akhir 2025. Yuan China juga menguat 4,80%, sementara dolar Singapura naik 0,29%.

Pergerakan mata uang regional tersebut menunjukkan perbedaan kinerja sepanjang tahun ini, dengan sejumlah mata uang masih menghadapi tekanan terhadap dolar AS.

Inflasi Australia Memanas, Peluang Kenaikan Suku Bunga RBA Tembus 85%

Rabu, 28 Oktober 2026 08:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-australia-memanas-peluang-kenaikan-suku-bunga-rba-tembus-85>

KONTAN.CO.ID - Inflasi Australia meningkat pada kuartal III-2026, memperkuat ekspektasi pasar bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada pekan depan.

Kenaikan harga bahan bakar dan tekanan inflasi inti yang masih tinggi menjadi faktor utama yang membayangi perekonomian Negeri Kanguru.

Mengutip Reuters, Rabu (28/10/2026), indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) Australia naik 1,3% pada kuartal III-2026, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,6% pada kuartal sebelumnya. Secara tahunan, inflasi CPI mencapai 3,9%.

Tekanan juga terlihat pada inflasi inti. Indikator trimmed mean, yang digunakan untuk mengukur tren inflasi dengan mengurangi pengaruh perubahan harga ekstrem, naik 1% secara kuartalan. Secara tahunan, inflasi inti bertahan di level 3,6%, jauh di atas target RBA sebesar 2%–3%.

Data inflasi September turut menunjukkan tekanan harga yang kuat. CPI naik 0,8% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga inflasi tahunan meningkat menjadi 4,3%.

Setelah rilis data tersebut dan pernyataan bernada hawkish dari pimpinan bank sentral, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan RBA Selasa pekan depan mencapai 85%. Angka ini meningkat dari probabilitas 69% sebelum data inflasi diumumkan.

Saat ini, suku bunga acuan Australia berada di level 4,6%. RBA telah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali sepanjang tahun ini hingga mencapai level tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Total kenaikan mencapai 100 bps, lebih agresif dibandingkan pengetatan moneter di banyak negara maju lainnya.

Tekanan inflasi juga diperbesar oleh kenaikan harga energi. Harga minyak mentah Brent telah meningkat sekitar 10% sepanjang kuartal ini dan diperdagangkan di atas US\$ 110 per barel.

Bank sentral khawatir kenaikan biaya energi akan merembet ke harga barang dan jasa lainnya, sehingga membuat inflasi bertahan lebih lama.

Inflasi Australia sendiri telah berada di atas target bank sentral selama lebih dari lima tahun. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran bahwa ekspektasi kenaikan harga akan semakin mengakar di kalangan rumah tangga dan pelaku usaha.

Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser sebelumnya mengatakan bank sentral menyadari data CPI berpotensi lebih tinggi daripada proyeksi pada Agustus.

Hasil inflasi terbaru akan menjadi pertimbangan dalam menilai kapasitas ekonomi yang masih tersedia serta besarnya tekanan harga.

Di sektor perumahan, harga rumah baru tidak berubah pada September. Sejumlah pengembang meningkatkan diskon di tengah perlambatan permintaan terhadap hunian baru.

Namun, tekanan harga pada komponen lain masih kuat. Inflasi barang meningkat 4,6% secara tahunan pada September, sementara inflasi jasa mencapai 4,1%.

Perkembangan tersebut memperkuat tantangan RBA dalam menekan inflasi tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keputusan suku bunga pekan depan akan menjadi perhatian pelaku pasar untuk melihat seberapa jauh bank sentral siap memperketat kebijakan moneternya.

Bank Sentral Selandia Baru Tahan Suku Bunga 2,75%, Meski Buka Peluang Pengetatan

Rabu, 28 Oktober 2026 08:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-selandia-baru-tahan-suku-bunga-275-meski-buka-peluang-pengetatan>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral Selandia Baru, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), mempertahankan suku bunga acuan atau official cash rate (OCR) di level 2,75% pada Rabu (28/10/2026).

Keputusan ini di luar perkiraan mayoritas ekonom yang memprediksi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps).

Mengutip Reuters, sebanyak 22 dari 27 ekonom yang disurvei memperkirakan RBNZ akan menaikkan suku bunga acuan.

Namun, bank sentral memilih menahan suku bunga, sembari memberikan sinyal bahwa pengetatan kebijakan moneter kemungkinan masih diperlukan jika sesuai dengan prospek ekonomi.

Dalam pernyataannya, komite kebijakan RBNZ menyepakati bahwa kebijakan moneter yang lebih ketat kemungkinan diperlukan, “bergantung pada prospek ekonomi”.

Keputusan tersebut muncul di tengah kekhawatiran bank sentral terhadap inflasi yang berada di luar kisaran target 1%–3%. Kondisi ini mendorong RBNZ menaikkan suku bunga pada dua pertemuan sebelumnya.

Meski demikian, suku bunga acuan saat ini masih jauh di bawah puncaknya sebesar 5,5% pada Agustus 2024.

Sebelumnya, RBNZ menjalankan siklus pelonggaran moneter secara agresif ketika perekonomian melemah dan tekanan inflasi mereda.

Keputusan terbaru ini menunjukkan bahwa RBNZ masih mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan kondisi perekonomian.

Arah suku bunga berikutnya akan bergantung pada perkembangan inflasi serta prospek ekonomi Selandia Baru.

Dolar AS Bertahan di Level Tertinggi Dua Pekan Rabu (28/10), Menanti Sinyal The Fed

Rabu, 28 Oktober 2026 07:47 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-bertahan-di-level-tertinggi-dua-pekan-rabu-2810-menanti-sinyal-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan di level tertinggi dalam dua pekan pada perdagangan Rabu (28/10), menjelang keputusan kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dan sejumlah bank sentral lainnya.

Pelaku pasar mencermati sinyal The Fed untuk mengukur peluang perubahan suku bunga pada Desember mendatang.

Mayoritas mata uang utama dunia bergerak terbatas menjelang pengumuman kebijakan bank sentral AS tersebut. Euro bertahan di US\$ 1,1129, sementara pound sterling stabil di US\$ 1,3307.

Di sisi lain, dolar AS menguat 0,1% terhadap yen Jepang menjadi 158,03 yen. Dolar Selandia Baru atau kiwi stabil di US\$ 0,5682 menjelang keputusan suku bunga Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), yang secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga.

Adapun dolar Australia menguat tipis 0,1% menjadi US\$ 0,7031 menjelang rilis data inflasi konsumen Australia untuk September.

Pasar secara umum memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya. Berdasarkan perangkat FedWatch milik CME Group, kontrak berjangka suku bunga The Fed menunjukkan probabilitas sebesar 91% bahwa Federal Open Market Committee (FOMC) akan menahan suku bunga.

Meski demikian, perhatian investor tertuju pada petunjuk mengenai arah kebijakan berikutnya, terutama apakah peluang kenaikan suku bunga pada Desember masih terbuka.

“The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga hari ini untuk menggerakkan pasar. The Fed hanya perlu mengubah persepsi pasar mengenai probabilitas kenaikan suku bunga pada Desember,” ujar Chris Weston, kepala riset Pepperstone Group Ltd di Melbourne.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,3% pada Selasa (27/10) menjadi 102,40. Level tersebut merupakan posisi tertinggi sejak 14 Oktober.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun tidak berubah di level 4,9967%.

Di pasar aset kripto, bitcoin bergerak stabil di US\$ 80.736,07. Adapun ether menguat tipis 0,1% menjadi US\$ 2.345,25.

Pergerakan pasar valuta asing dan obligasi selanjutnya akan bergantung pada keputusan The Fed serta komunikasi bank sentral mengenai prospek suku bunga, yang dapat memengaruhi ekspektasi investor terhadap arah dolar AS.

Defisit Perdagangan AS Melebar, Impor Tembus Rekor akibat Investasi Infrastruktur AI

Rabu, 28 Oktober 2026 21:58 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanti Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-perdagangan-as-melebar-impor-tembus-rekor-akibat-investasi-infrastruktur-ai>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit perdagangan barang Amerika Serikat (AS) secara tak terduga melebar pada September, seiring lonjakan impor yang mencapai rekor tertinggi. Kenaikan ini didorong oleh kuatnya permintaan barang modal terkait pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI), yang mengindikasikan bahwa perdagangan menjadi salah satu faktor penghambat signifikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III.

Data yang dirilis Departemen Perdagangan AS pada Rabu (28/10/2026) menunjukkan kondisi perdagangan terus memburuk. Hal ini mendorong sejumlah ekonom memperkirakan perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal lalu hingga 4 poin persentase.

Meski demikian, estimasi awal pemerintah AS mengenai PDB kuartal Juli–September yang akan dirilis pada Kamis diperkirakan tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hal ini didukung oleh lonjakan belanja AI dan konsumsi masyarakat yang solid.

“Meski perdagangan akan membebani PDB kuartalan, kondisi ini justru menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan, ekonomi AS karena mencerminkan berlanjutnya investasi bisnis dan momentum belanja konsumen,” kata Daniel Vielhaber, ekonom di Nationwide.

Biro Sensus Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa defisit perdagangan barang meningkat 2,1%, atau US\$ 2,8 miliar, menjadi US\$ 134,9 miliar pada September. Angka tersebut merupakan yang terbesar sejak Maret 2025.

Sebelumnya, para ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan defisit perdagangan barang sebesar US\$ 130,2 miliar. Kesenjangan perdagangan barang tersebut terus melebar sepanjang kuartal III.

Impor barang naik 2,4%, atau US\$ 8,1 miliar, menjadi US\$ 344,1 miliar pada September. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan impor barang modal sebesar 7,5%. Secara tahunan, impor barang modal melonjak 77,2% pada September.

“Sebagian besar perangkat keras yang dibutuhkan perusahaan teknologi berasal dari luar negeri, sehingga mendorong pelebaran defisit perdagangan secara besar-besaran,” kata Stephen Stanley, kepala ekonom AS di Santander US Capital Markets.

Selain lonjakan investasi AI, belanja konsumen yang terus menunjukkan kekuatan meskipun biaya hidup meningkat juga mendorong kenaikan impor.

Impor barang konsumsi meningkat 3,1% pada September, sedangkan impor barang lainnya naik 6,7%. Namun, impor pasokan industri, termasuk emas dan minyak bumi, turun 6,0%.

Emas tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDB. Impor makanan dan kendaraan bermotor juga mengalami penurunan.

Ekspor barang meningkat US\$ 5,3 miliar, atau 2,6%, menjadi US\$ 209,2 miliar. Pengiriman makanan melonjak 12,8%. Ekspor barang modal naik 5,4%, sementara ekspor produk konsumen meningkat 6,5%. Sebaliknya, ekspor kendaraan bermotor dan pasokan industri mengalami penurunan.

Ekonom Pantheon Macroeconomics memperkirakan perdagangan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 4 poin persentase. Sementara itu, ekonom di Oxford Economics memperkirakan dampaknya mencapai 3,25 poin persentase.

Perdagangan tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB selama tiga kuartal berturut-turut.

Namun, sebagian barang yang diimpor pada September berakhir sebagai persediaan yang belum terjual di tingkat pedagang grosir dan pengecer. Kondisi ini berpotensi mengurangi dampak negatif terhadap PDB.

Biro Sensus juga melaporkan persediaan grosir meningkat 0,6% pada September. Persediaan di tingkat pengecer naik 0,3%, sementara persediaan di dealer kendaraan bermotor dan suku cadang meningkat 0,2%.

Di luar kendaraan bermotor dan suku cadangnya, persediaan ritel meningkat 0,4% setelah naik tipis 0,1% pada Agustus. Komponen ini turut diperhitungkan dalam penghitungan PDB.

Sebelum data perdagangan dan persediaan dirilis, survei Reuters terhadap para ekonom memperkirakan ekonomi AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 3,2% pada kuartal III. Pada kuartal II, ekonomi AS tumbuh sebesar 2,2%.

“Pertumbuhan sekitar 1% kini tampaknya lebih mungkin terjadi, meskipun kami mengakui bahwa angka utama PDB kuartal lalu bahkan lebih sulit dipastikan daripada biasanya,” kata Oliver Allen, ekonom senior AS di Pantheon Macroeconomics.

Tertekan Rupiah & Harga Minyak, Defisit APBN Berpotensi Tembus 3%

Rabu, 28 Oktober 2026 18:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126071/tertekan-rupee-harga-minyak-defisit-apbn-berpotensi-tembus-3/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi menembus batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), seperti diatur undang-undang, apabila tekanan pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak terus berlanjut hingga akhir tahun.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai risiko tersebut muncul di tengah target penerimaan negara pada kuartal IV-2026 yang sulit tercapai, sementara pemerintah berencana menggenjot belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Hingga Spetember 2026, defisit sudah mencapai Rp319 T, atau setara dengan 1,24% PDB. Sementara itu, target penerimaan negara sebesar Rp813 triliun di Q4 2026 akan sulit terwujud," kata Wijayanto kepada Bloomberg Technoz, Rabu (28/10/2026).

"Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan mendongkrak belanja Q4 2026 hingga Rp1.300 triliun, untuk menstimulus pertumbuhan. Dalam situasi harga minyak yang terus tinggi dan rupiah yang terus melemah, maka ada potensi cukup moderat bahwa defisit akan melebihi threshold 3%," sambungnya.

Kalaupun pemerintah mampu menjaga defisit di bawah 3% PDB, Wijayanto tetap menyoroti adanya tantangan pembiayaan melalui penerbitan surat utang negara (SBN).

Menurutnya pemerintah tetap akan menghadapi persaingan pasokan surat utang dari banyak negara maju, sehingga berpotensi perlu menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk menarik investor.

"Yield [imbal hasil] SBN 10 tahun saat ini saja sudah mencapai 7,45%," tuturnya.

Selain meningkatkan risiko defisit, pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak juga berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah.

Sebagai catatan, Harga minyak West Texas Intermediate [WTI] untuk pengiriman Desember naik 0,3% menjadi US\$100,18 per barel pada pukul 06.01 waktu Singapura, Rabu. Sementara itu, minyak Brent untuk penyelesaian Desember turun 1,7% dan ditutup pada US\$113,88 per barel pada perdagangan Selasa.

Wijayanto menyebut pagu subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp338 triliun. Namun, realisasinya hingga September 2026 telah mencapai Rp376 triliun, melampaui pagu anggaran tersebut.

Jika harga minyak bertahan di level US\$90 per barel dan nilai tukar rupiah mencapai Rp18.000/US\$, maka biaya subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV-2026 diperkirakan mencapai Rp180 triliun hingga Rp190 triliun.

Dengan demikian, total biaya subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 berpotensi mencapai hingga Rp566 triliun.

Wijayanto menegaskan, angka tersebut belum memasukkan kewajiban utang kompensasi dan subsidi pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang menurutnya mencapai sekitar Rp280 triliun pada September 2026.

Tahan Belanja

Untuk menjaga defisit tetap terkendali, Wijayanto meminta pemerintah meninjau kembali rencana peningkatan belanja hingga Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026.

Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan kualitas pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal ketimbang mengejar besarnya belanja dalam waktu singkat.

Dia juga menyarankan pemerintah mengevaluasi belanja yang tidak wajib, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan berbagai bantuan sosial.

"Jika ada ruang berutang di Q4 2026, sebaiknya dihemat, dimanfaatkan di tahun 2027 yang kemungkinan akan sama menantang, atau bahkan berpotensi lebih menantang," pungkas Wijayanto.

Untuk diketahui, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah, dengan berada di posisi Rp18.183/US\$ pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (28/10/2026).

BI Klaim Insentif Hedging Mampu Tarik Dana Asing US\$9 Miliar

Rabu, 28 Oktober 2026 17:40 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126069/bi-klaim-insentif-hedging-mampu-tarik-dana-asing-us-9-miliar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengklaim insentif biaya lindung nilai (hedging) telah menarik masuk dana asing sekitar US\$9 miliar atau setara Rp163,58 triliun hingga 20 Oktober 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kebijakan yang mulai berlaku pada Juni 2026 lalu, diberikan agar investor asing bersedia menempatkan dananya di Indonesia dengan risiko nilai tukar yang lebih terkelola.

"Kita mulai kebijakan ini di bulan Juni, dan per Oktober tanggal kemarin ya, 20 Oktober, itu sudah masuk sekitar US\$9 miliar. Tambah juga ada dalam bentuk renminbi juga ada sekitar Rp200 juta," kata Destry dalam wawancaranya bersama Metro TV, dikutip Rabu (28/10/2026).

Destry tak menampik bilamana Indonesia membutuhkan aliran masuk modal asing untuk memperkuat pasar keuangan domestik di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Oleh karena itu, BI tak hanya mengandalkan kebijakan suku bunga saja, tetapi juga melewati cara-cara lain salah satunya biaya lindung nilai.

Lindung nilai (hedging) merupakan cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.

Dengan demikian, investor asing yang membawa dana ke Indonesia umumnya akan melakukan lindung nilai untuk mengamankan posisi investasinya dari risiko perubahan nilai tukar.

"Makanya kita kasih insentif yang satu tahun itu jadi besar, ketimbang yang untuk yang 3 bulan, 6 bulan," tegasnya.

Di sisi lain, BI juga meningkatkan insentif khususnya untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), guna mendorong investor mengonversi dolar ke rupiah dan menempatkan dananya pada instrumen keuangan domestik.

Destry menjelaskan dana tersebut dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun saham, sesuai dengan instrumen investasi yang dipilih investor.

"Dengan DNDF, kan kita kasih yang 1 tahun itu 45% insentifnya. Jadi dalam bentuk diskon-nya gitu. Jadi hedging costnya at least buat mereka tuh mereka bisa [dapat] 45%," tuturnya.

Rupiah Rp18.183/US\$ Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Ini Kata BI

Rabu, 28 Oktober 2026 16:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126056/rupiah-rp18-183-us-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah-ini-kata-bi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) merespons pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah, dengan berada di posisi Rp18.183/US\$ pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (28/10/2026).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea menilai pergerakan rupiah dan mata uang kawasan hari ini masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik Timur Tengah.

"Kondisi ini menjaga harga minyak tetap tinggi, di atas US\$115 per barel, serta meningkatkan risiko fiskal ke depan. Ekspektasi kenaikan suku bunga AS juga meningkat," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).

Dia mengklaim sentimen risk-off (pembalikan modal) yang memburuk mendorong penguatan dolar AS dan arus keluar dana dari pasar negara berkembang. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan imbal hasil atau yield obligasi.

Dari domestik, kekhawatiran atas potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI turut menekan aliran dana. Kebutuhan valas domestik yang meningkat menjelang akhir bulan juga menambah tekanan.

"Secara umum, pergerakan rupiah masih sejalan dengan mata uang kawasan. Secara bulanan, rupiah melemah 1,15%. Sementara itu, cadangan devisa tetap terjaga sebesar US\$146,3 miliar pada akhir September 2026," klaimnya.

Dia memastikan bahwa bank sentral akan terus hadir di pasar untuk menjaga mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai fundamentalnya. Langkah stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan spot.

"BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," tegasnya.

Bank Indonesia, lanjutnya, terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tutup perdagangan Rabu (28/10/2026) melemah 0,17% di level Rp18.183/US\$, setelah sempat menyentuh posisi All Time Low (ATL) di Rp18.188/US\$ siang tadi.

Namun jika dilihat dari posisi penutupan, maka rupiah yang finis di posisi Rp18.183/US\$ adalah yang terlemah sepanjang sejarah.

Pelemahan rupiah diperparah dengan aksi jual di pasar obligasi siang ini. Data Bloomberg menunjukkan kenaikan yield terjadi di semua tenor.

Kenaikan paling tajam terjadi di tenor 3 tahun sebesar 13,6 basis poin (bps) ke 7,26%, disusul tenor 12 tahun 10,8 bps jadi 7,59%. Sementara, tenor acuan 10 tahun naik 5,9 bps jadi 7,61%.

Setali tiga uang, pasar saham sempat turut terkoreksi 0,3% ke 5.250,12, sebelum berbalik arah pada 15:05 menjadi 5.268,36.

Tekanan di pasar surat utang domestik dipicu oleh kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun ke 5% jelang pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS, The Fed. Kenaikan yield ini juga turut mempertahankan posisi indeks dolar AS tetap tinggi di 102,43.

Kenaikan itu merembet ke pasar obligasi global. Yield obligasi pemerintah Jepang naik 2,3 bps jadi 2,81%, disusul Australia naik 5,5 bps jadi 5,2%, Korea Selatan naik 9,1 bps jadi 4,11%, dan China 0,5 bps jadi 1,61%.

BI Soroti Minimnya Arus Dana Asing yang Jadi Penekan Rupiah

Rabu, 28 Oktober 2026 16:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126044/bi-soroti-minimnya-arus-dana-asing-yang-jadi-penekan-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyoroti rendahnya arus dana asing yang masuk ke pasar Indonesia yang menyebabkan semakin terpuruknya nilai tukar rupiah.

Destry menyebut secara global kondisi imbal hasil yang tinggi dan potensi kenaikan Fed Fund Rate menyebabkan perekonomian dunia memasuki era higher for longer.

“Tentunya ini kan akan spill over ke negara-negara lain, termasuk negara berkembang yang selama ini kita banyak mendapatkan inflow juga dari negara-negara maju,” kata Destry dalam wawancaranya di Metro TV, Selasa (27/10/2026).

Sehingga, menurut Destry arus dana asing yang masuk ke Indonesia menjadi terbatas, menyebabkan suplai dolar menjadi minim.

“Jadi kalau sudah suplai terbatas, sementara kita punya demand-nya kan tinggi, harga minyaknya naik, berarti kan kita harus punya kebutuhan untuk biaya kebutuhan dolar juga lebih tinggi.

Pada akhirnya, penyeimbang dari sisi suplai menjadi dibutuhkan sehingga mau tidak mau terjadi penyesuaian pada nilai tukar di emerging market, termasuk Rupiah.

Menurut Destry, saat ini otoritas moneter berusaha menyamakan pergerakan Rupiah dengan pergerakan mata uang lain di emerging market secara keseluruhan.

Penguatan Ekspor

Selain itu, Destry juga menyoroti terkait dengan ekspor Indonesia yang harus ditingkatkan sehingga dapat menambah devisa yang masuk ke Indonesia.

“Makanya mungkin berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk bagaimana lebih memperhatikan, memfokuskan ekspor itu supaya tidak terjadi transfer pricing atau under invoice, itu saya rasa hal yang positif ya,” katanya.

Destry memaparkan bahwa saat ini masih banyak potensi-potensi ekspor yang tidak tergarap yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan.

Sementara itu, ia juga menggarisbawahi peran Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas. Menurutnya sentimen global yang dibarengi dengan guncangan yang berasal dari domestik akan menyebabkan sentimen, seperti investor yang lebih memilih berjaga-jaga.

“Nah, ini yang terus kita, terus terang memang kita berusaha untuk meningkatkan juga untuk memonitor, benar enggak ini ada underlying? Karena kita benar-benar ingin meningkatkan governance dari supply demand valas di domestik,” kata Destry.

Ia juga mengingatkan bahwa yang perlu dihaga adalah volatilitas yang minimal sehingga dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai arah gerak rupiah.

“Bahwa kalau ada timing menguat dia pasti akan tetap menguat, tapi kalau lagi ada tekanan yang tinggi, ada sentimen dan sebagainya, dia akan melemah. Jadi dia bergerak di koridor seperti itu,” katanya.

Sebagai informasi, Rupiah tutup perdagangan Rabu (28/10/2026) melemah 0,17% di level Rp18.183/US\$, setelah sempat menyentuh posisi All Time Low (ATL) di Rp18.188/US\$ siang tadi.

Namun jika dilihat dari posisi penutupan (closing), maka rupiah yang finis di posisi Rp18.183/US\$ adalah yang terlemah sepanjang sejarah.

Pelemahan rupiah diperparah dengan aksi jual di pasar obligasi siang ini. Data Bloomberg menunjukkan kenaikan yield terjadi di semua tenor.

Kenaikan paling tajam terjadi di tenor 3 tahun sebesar 13,6 basis poin (bps) ke 7,26%, disusul tenor 12 tahun 10,8 bps jadi 7,59%. Sementara, tenor acuan 10 tahun naik 5,9 bps jadi 7,61%.

Rupiah Rekor Terlemah, Menkeu & BI Didesak Ambil Langkah Kongkret

Rabu, 28 Oktober 2026 15:57 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126037/rupiah-rekor-terlemah-menkeu-bi-didesak-ambil-langkah-kongkret/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu mengambil langkah bauran kebijakan yang konkret untuk memperkuat fundamental demi meredam volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi merespons pergerakan rupiah yang terus melemah, hingga puncaknya berada di level Rp18.183/US\$

atau ambrol 0,17% pada penutupan perdagangan Rabu (28/10/2026), setelah sempat menyentuh posisi All Time Low (ATL) di Rp18.188/US\$ siang tadi.

Jika dilihat dari posisi penutupan (closing), maka rupiah yang finis di posisi Rp18.183/US\$ adalah yang terlemah sepanjang sejarah.

"Dalam situasi rawan seperti ini, bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh BI dan pemerintah tidak boleh sebatas bersifat seremonial atau normatif. Dibutuhkan langkah-langkah taktis jangka pendek untuk meredam volatilitas, sekaligus intervensi struktural jangka menengah agar fundamental rupiah kembali kokoh," kata Rahma kepada Bloomberg Technoz, Rabu (28/10/2026).

Lebih lanjut, ia menilai pelemahan rupiah terjadi saat ini pada dasarnya bukan hanya berasal dari tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor ketidakpastian suku bunga global dan geopolitik, tetapi faktor domestik juga mempengaruhinya.

Di antaranya, keluarnya aliran modal asing (capital outflow) setelah penyesuaian indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta pelemahan daya beli kelas menengah.

Dengan demikian, dari sisi moneter, Rahma mendorong BI mengoptimalkan instrumen yang dapat menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah bagi investor asing. Instrumen tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Menurut dia, upaya tersebut diperlukan untuk menahan arus modal keluar sekaligus menjaga efektivitas transmisi suku bunga.

Selain itu, BI perlu memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui strategi triple intervention, yakni di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Intervensi tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan secara terukur dan disertai komunikasi yang transparan untuk menjaga ekspektasi pasar serta mencegah kepanikan investor yang dapat memicu aksi jual secara bersamaan.

Sementara di sisi fiskal, Rahma menekankan pentingnya penguatan pasokan valuta asing dari dalam negeri, terutama melalui pengawasan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE).

"Intervensi Fiskal dan pengendalian impor [Pemerintah] sangat penting, untuk mengendalikan permintaan valas sektoral. Pemerintah melalui kementerian teknis harus menekan demand valas yang tidak esensial di sektor korporasi maupun impor barang konsumtif non-esensial demi memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan [current account]," tegasnya.

Kendati begitu, ia tetap menekankan bahwa di tengah tekanan pasar keuangan, disiplin fiskal juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Menurut Rahma, pemerintah perlu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB), disertai alokasi belanja yang produktif, transparan, dan tepat sasaran.

Daya Beli Kelas Menengah Jadi Perhatian

Tak hanya itu, ia turut mengingatkan pemerintah akan risiko pelemahan rupiah terhadap sektor riil, terutama melalui kenaikan harga bahan baku dan barang konsumsi impor (imported inflation).

Depresiasi rupiah, kata Rahma berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Tekanan tersebut pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang dan jasa, sehingga memperberat beban rumah tangga.

"Pemerintah harus sigap menyalurkan stimulus tepat sasaran atau bantalan sosial bagi kelompok rentan dan kelas menengah yang mulai tergerus, guna menjaga stabilitas permintaan domestik sebagai jangkar pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sebagai catatan, rupiah kembali terpankaskan 0,1% ke Rp18.171/US\$ dalam perdagangan spot, Rabu (28/10/2026). Tak lama berselang, rupiah kembali menyusut 0,15% jadi Rp18.180/US\$ pada 09:08 WIB.

Sementara itu, di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) rupiah kembali menembus Rp18.219/US\$, setelah terpankaskan 0,19%.

Tekanan terhadap rupiah datang dari dua arah. Dari sisi eksternal, indeks dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat 0,1% ke 102,42, sejalan dengan kenaikan yield obligasi pemerintah AS, US Treasury, sebesar 3,3 basis poin (bps) jadi 5,02%.

Kenaikan dolar AS dan yield US Treasury ini dipicu oleh harga minyak mentah Brent yang kembali terdorong 1,44% jadi US\$115,52/barel. Padahal, bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan, meski inflasi September tercatat lebih tinggi daripada perkiraan.

BI Pacu Pendalaman Pasar Uang, Aktivitas Transaksi Jadi Tantangan

Rabu, 28 Oktober 2026 12:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126006/bi-pacu-pendalaman-pasar-uang-aktivitas-transaksi-jadi-tantangan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai peningkatan aktivitas transaksi dan pemanfaatan produk serta infrastruktur pasar masih menjadi tantangan dalam pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

Karena itu, BI mendorong percepatan implementasi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030) dengan menggeser fokus pengembangan dari penguatan fondasi menuju peningkatan aktivitas pasar.

Gubernur BI Dstry Damayanti mengatakan, keberhasilan pendalaman PUVA tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan regulasi dan infrastruktur, tetapi juga harus tercermin dari peningkatan aktivitas transaksi dan perluasan partisipasi pelaku pasar.

“Keberhasilan pendalaman PUVA tidak cukup berhenti pada tersedianya ketentuan dan infrastruktur, tetapi harus tercermin dari peningkatan aktivitas transaksi, perluasan partisipasi pelaku pasar yang kompeten, pembentukan harga yang semakin baik, serta penguatan tata kelola dan integritas pasar,” kata Dstry dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026)

Untuk itu, Dstry mendorong industri agar lebih aktif menyediakan likuiditas, mengembangkan inovasi, dan mengatasi hambatan implementasi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan pendalaman PUVA menuju 2030, yang diharapkan dapat memperkuat transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Empat Prioritas Strategis

BI juga membeberkan empat prioritas strategis untuk mengakselerasi implementasi BPPU 2030 bersama Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

Destry menyebut bahwa empat langkah tersebut diantaranya terkait pengembangan pasar uang, pengembangan pasar valuta asing, penguatan pelaku pasar, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan.

BI menyebut bahwa pengembangan pasar uang difokuskan pada penguatan Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai alternatif pembiayaan sektor riil, perluasan penggunaan INDONESIA sebagai referensi suku bunga berbagai produk keuangan, serta peningkatan likuiditas Overnight Index Swap (OIS) untuk mendukung pembentukan suku bunga yang lebih efisien.

Upaya tersebut didukung perluasan basis investor dan peningkatan aktivitas transaksi di pasar sekunder.

Pengembangan pasar valuta asing dilakukan melalui perluasan akses lindung nilai dan penguatan konektivitas pasar domestik dengan pasar global.

Sementara, optimalisasi VASTRA diarahkan untuk mempermudah akses lindung nilai bagi investor global, meningkatkan daya tarik aset Rupiah, serta mendukung aliran investasi portofolio berkelanjutan.

Sementara itu, penguatan ekosistem Renminbi, termasuk pengembangan Renminbi Clearing Bank, ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi transaksi Renminbi-Rupiah serta mendukung implementasi Local Currency Transaction (LCT) Indonesia–China.

Penguatan pelaku pasar difokuskan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tresuri Indonesia, serta penerapan kode etik pasar. Penguatan tersebut didukung peningkatan peran APUVINDO sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) dalam mendorong standarisasi praktik dan tata kelola pasar.

Mayoritas Harga Pangan Kompak Melandai, tapi Tidak dengan Beras

Rabu, 28 Oktober 2026 09:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125986/mayoritas-harga-pangan-kompak-melandai-tapi-tidak-dengan-beras/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan nasional pada hari ini, Rabu (28/10/2026) mengalami penurunan mulai dari cabai-cabai hingga seluruh jenis daging. Tapi tidak untuk beras yang justru mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 08.00 WIB, harga Beras kualitas bawah II naik Rp100 menjadi Rp14.800/kg, atau naik 0,68%. Harga beras kualitas medium II juga naik Rp50 menjadi Rp16.450/kg, atau naik 0,3%.

Kemudian, harga beras kualitas super I naik Rp50 menjadi Rp18.000/kg, atau naik 0,28%. Beras kualitas super II naik Rp50 menjadi Rp17.450/kg, atau naik 0,29%.

Pedagang menuangkan beras di salah satu warung sembako di kawasan Jati Padang, Jakarta, Selasa (12/8/2025) (Bloomberg Technoz/Andrian Kristianto)

Sementara itu, harga beras kualitas bawah I tidak berubah atau tetap Rp14.950/kg. Begitu juga beras kualitas medium I tidak berubah, tetap Rp16.650/kg.

Di sisi lain, harga seluruh jenis cabai turun semua. Cabai merah besar turun Rp2.950 menjadi Rp72.750/kg, atau turun 3,9%. Cabai merah keriting juga turun Rp3.000 menjadi Rp85.100/kg, atau turun 3,41%.

Harga cabai rawit hijau pun turun Rp400 menjadi Rp79.700/kg, atau turun 0,5%. Begitu juga cabai rawit merah yang turun Rp5.100 menjadi Rp100.350/kg, atau turun 4,84%.

Lalu, harga daging ayam ras segar turun Rp1.100 menjadi Rp39.500/kg, atau turun 2,71%, beserta telurnya yang juga turun Rp200 atau 0,67% menjadi Rp29.500/kg.

Daging sapi kualitas 1 turun Rp100 menjadi Rp152.550/kg, atau turun 0,07%. Daging sapi kualitas 2 juga turun Rp50 menjadi Rp143.550/kg, atau turun 0,03%.

Sementara, harga minyak goreng curah naik Rp50 menjadi Rp20.350/kg, atau naik 0,25%. Tetai, minyak goreng kemasan bermerek 1 turun Rp50 menjadi Rp24.400/kg, atau turun 0,2%, serta kemasan bermerek 2 turun Rp50 menjadi Rp23.600/kg, atau turun 0,21%.

Harga bawang merah ukuran sedang turun Rp100 menjadi Rp37.150/kg, atau turun 0,27%. Bawang putih ukuran sedang juga turun Rp450 menjadi Rp38.300/kg, atau turun 1,16%.

Harga gula pasir kualitas premium tidak berubah atau tetap Rp20.600/kg. Sementara gula pasir lokal naik Rp50 menjadi Rp19.400/kg, atau naik 0,26%.

Pengangguran di Indonesia Turun ke 4,65%, Ekonom Soroti Kualitas Pekerjaan

Rabu, 28 Oktober 2026 16:05 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-di-indonesia-turun-ke-465-ekonom-soroti-kualitas-pekerjaan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia turun menjadi 4,65% pada 2026, mendekati level terendah sejak 1994.

Namun, klaim tersebut dinilai belum cukup menggambarkan kondisi pasar kerja, terutama kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat di tengah sorotan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peneliti Makroekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan masyarakat Indonesia cenderung tidak memiliki kemampuan finansial untuk menganggur dalam waktu lama setelah kehilangan pekerjaan.

Akibatnya, pekerja yang terkena PHK kerap segera mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup, meskipun pekerjaan yang diperoleh memiliki kualitas rendah.

“Orang Indonesia itu enggak bisa afford untuk menganggur. Dia kena PHK seminggu, dua minggu kemudian pasti udah harus bekerja lagi, apa pun pekerjaannya. Dan kualitas pekerjaannya sendiri pun pasti sangat rendah,” ujar Riefky kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Menurut Riefky, angka pengangguran tidak bisa menjadi satu-satunya indikator untuk menilai kondisi ketenagakerjaan nasional. Pasalnya, seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja dalam statistik Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi memang angka pengangguran ini bukan jadi tolak ukur yang proper untuk kita melihat kualitas pekerjaan dan juga kualitas kesejahteraan masyarakat. Tapi dilihat berapa besar informalitasnya, tingkat upahnya, nah itu yang memang belum membaik sejauh ini,” jelasnya.

Riefky menegaskan, persoalan ketenagakerjaan saat ini bukan hanya mengenai penurunan jumlah penganggur, melainkan juga kualitas pekerjaan yang dinilai semakin memburuk.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan penurunan TPT menjadi 4,65% mencerminkan keberhasilan program penguatan sektor riil dan investasi dalam mendorong penyerapan tenaga kerja.

“Capaian TPT 4,65% ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Haryo menjelaskan, berdasarkan metodologi yang mengacu pada standar Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan BPS, TPT dihitung dari persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja nasional.

Pemerintah menyebut TPT sebesar 4,65% pada 2026 mendekati angka 4,36% yang tercatat pada 1994. Haryo menilai capaian tersebut signifikan karena jumlah angkatan kerja Indonesia telah meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 83,32 juta orang pada era 1990-an menjadi 155,41 juta orang pada 2026.

Menurut Haryo, penurunan rasio pengangguran di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut menunjukkan penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

Sebagai pembanding, pemerintah mencatat TPT pernah mencapai 11,24% pada 2005 akibat lesunya penyerapan tenaga kerja dan tekanan ekonomi domestik pasca krisis moneter yang belum menunjukkan perbaikannya, serta gejolak pandemi COVID-19 pada 2020 sebesar 7,07%.

Penurunan hingga 4,65% pada 2026 dinilai mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional.

Haryo menambahkan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan (upskilling), dan peningkatan utilisasi industri.

Pemerintah menyatakan fokus kebijakan tidak hanya mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja berkualitas yang berdampak langsung terhadap taraf hidup masyarakat.

Cadangan Emas BI Turun 5,68%, Benarkah Indonesia Jual Emas?

Rabu, 28 Oktober 2026 17:40 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-emas-bi-turun-568-benarkah-indonesia-jual-emas>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai cadangan emas moneter Indonesia sebesar US\$ 11,74 miliar pada September 2026, turun 5,68% dibandingkan posisi Agustus 2026 yang mencapai US\$ 12,45 miliar.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan nilai cadangan emas moneter BI lebih disebabkan oleh koreksi harga emas global dibandingkan aksi penjualan emas oleh bank sentral.

Pada periode yang sama, harga emas dunia mengalami koreksi cukup tajam. Josua menjelaskan, pelemahan harga emas dipengaruhi oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS), penguatan dolar AS, serta aksi ambil untung dan pengurangan posisi investor di pasar emas.

Menurutnya, kenaikan imbal hasil obligasi membuat daya tarik emas cenderung berkurang karena logam mulia tersebut tidak memberikan pendapatan bunga.

“Dengan demikian, penurunan nilai cadangan emas lebih tepat dibaca sebagai penyesuaian nilai pasar aset, bukan sebagai bukti berkurangnya cadangan emas secara fisik,” ujar Josua kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Di sisi lain, penurunan nilai cadangan emas tidak diikuti oleh penurunan cadangan devisa secara keseluruhan dalam jumlah yang sama. Total cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US\$ 146,32 miliar pada September 2026, turun sekitar US\$ 187 juta dibandingkan posisi Agustus 2026 sebesar US\$ 146,51 miliar.

Bahkan, komponen cadangan dalam valuta asing meningkat sekitar US\$ 519 juta. Menurut Josua, kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi cadangan devisa tetap terjaga meskipun nilai emas mengalami koreksi.

Terkait strategi pengelolaan cadangan emas, Josua menilai BI perlu mempertahankan emas sebagai instrumen diversifikasi strategis dan membuka ruang untuk meningkatkan kepemilikannya secara bertahap dalam jangka menengah.

Namun, ia mengingatkan agar BI tidak melakukan pembelian emas secara agresif ketika kebutuhan likuiditas dolar AS sedang tinggi.

Sebagai catatan, sejak kuartal 1 2023 volume cadangan emas BI mengalami peningkatan. Pada kuartal I 2023 volumenya mencapai 78,67 ton, kemudian meningkat menjadi 89,4 ton pada kuartal III 2025, meningkat menjadi 85,5 ton pada kuartal II 2025, dan meningkat menjadi 87,04 ton pada kuartal II 2026.

Josua memperkirakan porsi emas dalam cadangan devisa pada September 2026 masih sekitar 8%. Emas tetap memiliki peran sebagai penyimpan nilai jangka panjang, pelindung terhadap risiko geopolitik, serta instrumen untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu mata uang.

Meski demikian, emas memiliki keterbatasan karena harganya dapat berfluktuasi tajam, tidak menghasilkan bunga, dan tidak sepraktis aset valuta asing yang likuid untuk memenuhi kebutuhan intervensi harian.

Karena itu, peningkatan porsi emas sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan pembayaran utang luar negeri, impor energi, serta potensi arus modal keluar.

Sebaliknya, menjual emas secara terburu-buru hanya karena harganya sedang turun juga dinilai kurang tepat karena berpotensi mengurangi manfaat diversifikasi dalam jangka panjang.

“Intinya, yang perlu diperbesar oleh BI adalah ketahanan cadangan devisa, bukan sekadar jumlah emasnya,” kata Josua.

Ia menambahkan, dalam jangka pendek BI perlu mengutamakan aset valuta asing yang aman dan mudah dicairkan untuk menghadapi tekanan terhadap rupiah. Sementara itu, dalam jangka menengah, diversifikasi ke emas tetap relevan untuk melindungi cadangan devisa dari risiko perubahan nilai dolar AS, inflasi global, dan ketidakpastian geopolitik.

Josua juga menilai komposisi ideal cadangan devisa perlu ditentukan melalui pengujian berbagai skenario tekanan pasar, bukan semata-mata mengikuti pergerakan harga emas. Selain itu, transparansi mengenai perubahan jumlah kepemilikan emas dan dampak penilaian kembali harga pasar perlu diperkuat agar penurunan nilai cadangan emas tidak keliru dipersepsikan sebagai penjualan emas ataupun pelemahan ketahanan eksternal Indonesia.

Di tengah tekanan terhadap rupiah, kenaikan harga minyak, serta ketidakpastian arus modal akibat risiko geopolitik dan persoalan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Josua menilai pengelolaan cadangan devisa perlu mengutamakan kecukupan likuiditas dan keamanan aset.

Menurutnya, cadangan dalam bentuk dolar AS dan surat berharga pemerintah negara maju yang berkualitas tinggi dengan tenor relatif pendek tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas valuta asing dan mendukung stabilisasi nilai tukar.

Rupiah Tertekan, BI Sebut Konflik Timur Tengah hingga Arus Keluar Modal Jadi Pemicu

Rabu, 28 Oktober 2026 16:15 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-tertekan-bi-sebut-konflik-timur-tengah-hingga-arus-keluar-modal-jadi-pemicu>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global, terutama terkait penyelesaian konflik Timur Tengah yang mendorong harga minyak bertahan di level tinggi dan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS).

Untuk diketahui, Rupiah spot ditutup pada level Rp 18.184 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Rabu (28/10/2026), melemah 0,15% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 18.156 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), Erwin Gunawan Hutapea membeberkan, pelemahan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global, terutama terkait penyelesaian konflik Timur Tengah yang mendorong harga minyak bertahan di level tinggi dan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, ketidakpastian tersebut turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan mata uang negara-negara kawasan.

“Pergerakan Rupiah dan mata uang kawasan hari ini masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik Timur Tengah,” ujar Erwin dalam pernyataan tertulis, Rabu (28/10/2026).

Menurut dia, ketidakpastian tersebut menjaga harga minyak tetap tinggi, yakni di atas US\$ 115 per barel, sekaligus meningkatkan risiko fiskal ke depan. Di sisi lain, ekspektasi kenaikan suku bunga AS juga meningkat sehingga menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Erwin menjelaskan, memburuknya sentimen risk-off mendorong penguatan dolar AS dan memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang atau emerging markets. Tekanan juga terjadi di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.

Dari dalam negeri, kekhawatiran terhadap potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) turut memengaruhi aliran dana. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing (valas) menjelang akhir bulan juga menambah tekanan terhadap rupiah.

Meski demikian, BI menilai pergerakan rupiah secara umum masih sejalan dengan mata uang negara-negara kawasan. Secara bulanan, rupiah tercatat melemah 1,15%.

Di tengah tekanan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia masih terjaga sebesar US\$ 146,3 miliar pada akhir September 2026.

Erwin menegaskan, BI terus melakukan langkah stabilisasi untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah tetap sesuai dengan fundamentalnya serta memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Stabilisasi dilakukan melalui transaksi di pasar non-deliverable forward (NDF), domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pasar spot. Selain itu, BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Bank Indonesia terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya,” tandasnya.

Pemkab Magelang membidik investasi yang mampu berdayakan masyarakat

Rabu, 28 Oktober 2026 13:32 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/650879/pemkab-magelang-membidik-investasi-yang-mampu-berdayakan-masyarakat>

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berkomitmen mendampingi investor dalam memenuhi persyaratan perizinan sehingga tidak menghambat masuknya investasi yang diharapkan juga mampu berdayakan masyarakat di daerah tersebut.

"Pemkab Magelang tidak akan mempersulit. Kami berharap investasi yang ada merupakan investasi berkelanjutan, dengan arah pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman kami dalam mendampingi para pengusaha dan investor untuk berkolaborasi," kata Bupati Magelang Grengseng Pamuji dalam kegiatan Magelang Growth Investment in Collaboration (MAGiC) 2026 di Magelang, Selasa (27/10).

Ia mengatakan investasi di Kabupaten Magelang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, lebih dari itu harus mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Selain itu, ia mengatakan investasi yang masuk harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

"Pemerintah Kabupaten Magelang tentu berharap investasi yang ada nanti selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Magelang, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat. Kami melihat investasi, pemerintah, dan dunia usaha itu muaranya adalah pemberdayaan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan Kabupaten Magelang memiliki keunggulan komparatif yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan industri mikro

diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

Pengembangan Tumpeng Menoreh di Desa Ngargoretno, menurut dia, menjadi salah satu inspirasi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah lain. Kolaborasi dengan investor dan pelaku usaha dinilai penting agar potensi daerah tidak berhenti sebagai keunggulan alam, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Jateng raih penghargaan sebagai provinsi terbaik atasi kemiskinan

Rabu, 28 Oktober 2026 00:50 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/650783/jateng-raih-penghargaan-sebagai-provinsi-terbaik-atasi-kemiskinan>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam acara Puncak Penganugerahan Mandaya Award di Jakarta.

Dalam kategori tersebut, Jateng bersanding dengan tiga provinsi lain yaitu Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam pernyataan di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan kepada provinsi Jateng yang telah melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai cara, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat.

"Provinsi Jateng telah mendapatkan Mandaya Awards, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

"Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan oleh Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota," tegasnya.

Berdasarkan data, angka kemiskinan di Jateng per Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau 3,29 juta penduduk, atau turun 0,18 persen dibandingkan September 2025 sebesar 9,39 persen.

Capaian penurunan itu, kata dia, perlu terus dijaga melalui kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga.

Termasuk juga Baznas Jateng, serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), diperkuat juga melalui program Kecamatan Berdaya.

"Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri, kita menerapkan 'collaborative government' (pemerintahan kolaboratif) dengan berbagai pihak, termasuk 177 kampus. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan," katanya.

Selain Pemprov Jateng, beberapa kabupaten di Jateng juga mendapatkan penghargaan dalam acara tersebut, di antaranya Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo untuk kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.

Serta, Kabupaten Pekalongan untuk kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.

"Ini bukti bahwa 'output' daripada kegiatan pembangunan adalah masyarakat bisa berdaya dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan penghargaan Mandaya Award merupakan simbol transformasi penanganan kemiskinan di Indonesia.

Upaya tidak hanya berpusat pada pemberian bantuan sosial, kata dia, tetapi bergeser pada pemberdayaan masyarakat, termasuk memberikan pendidikan layak bagi abak keluarga miskin atau kurang mampu melalui Sekolah Rakyat.

"Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri," katanya.

25.410 Warga Kebumen Keluar dari Kemiskinan, Pemkab Kebumen Raih Penghargaan Nasional

Rabu, 28 Oktober 2026 21:57 WIB

Penulis: Fajar Ady Pamungkas, Editor: Deni Setiawan

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1270950/25410-warga-kebumen-keluar-dari-kemiskinan-pemkab-kebumen-raih-penghargaan-nasional>

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen berkurang 25.410 jiwa sepanjang 2024–2025.

Tingkat kemiskinan turun dari 15,71 persen menjadi 13,58 persen atau berkurang 2,13 poin persentase dalam setahun.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kebumen turun dari 187.950 jiwa pada 2024 menjadi 162.540 jiwa pada 2025.

Penurunan tersebut menjadi dasar penghargaan Mandaya Awards 2026 kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan yang diterima Pemkab Kebumen dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Penghargaan ini menjadi yang kedua bagi Kebumen dalam ajang Mandaya Awards.

Pada 2025, Kebumen meraih peringkat ketiga kategori Kabupaten.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani pada 16 Oktober 2025.

Pemkab Kebumen menjalankan penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program tersebut diarahkan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan peluang memperoleh penghasilan.

Meski mengalami penurunan, 162.540 warga Kebumen masih tercatat berada di bawah garis kemiskinan pada 2025.

Tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan tersebut berlanjut melalui akses pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan bantuan yang tepat sasaran. (*)

Pemkab Banyumas Optimalisasi Aset, Upayakan Gaet Investor Pertokoan Kebondalem

Rabu, 28 Oktober 2026 05:50 WIB

Penulis: Moh Anhar, Editor: M Syofri Kurniawan

<https://jateng.tribunnews.com/banyumas/1270842/pemkab-banyumas-optimalisasi-aset-upayakan-gaet-investor-pertokoan-kebondalem>

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemkab Banyumas mulai menata pemanfaatan aset di Kompleks Pertokoan Kebondalem, Purwokerto. Termasuk menawarkan ruko kosong disewakan dan lahan mangkrak untuk investasi.

Namun, penyelesaian hak dan kewajiban antara Pemkab Banyumas dengan PT Graha Cipta Guna (GCG) masih berproses melalui koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menjelaskan, Pemkab Banyumas terus melakukan langkah-langkah menyelesaikan persoalan aset Kebondalem sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan optimal sekaligus menghindari timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.

Menurutnya, sejak menerima penyerahan hak pengelolaan aset dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada Maret 2025.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan sejak penyerahan aset Kebondalem dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pemkab Banyumas terus melakukan konsultasi, baik kepada Kejati Jawa Tengah maupun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat penyelesaian persoalan Kebondalem sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Di tengah proses penyelesaian hak dan kewajiban tersebut, Pemkab Banyumas juga mulai menata pemanfaatan aset Kebondalem yang masih kosong.

Terhadap ruko di Kompleks Pertokoan Kebondalem yang masih kosong atau belum disewakan oleh PT Graha Cipta Guna kepada pihak lain, Pemkab Banyumas telah melakukan penilaian menggunakan jasa appraisal.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemkab Banyumas kemudian menawarkan ruko-ruko yang masih kosong kepada pihak ketiga yang berminat untuk menyewa.

Penawaran tersebut menjadi salah satu langkah Pemkab Banyumas dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, khususnya bangunan pertokoan yang belum dimanfaatkan atau belum disewakan.

Selain ruko kosong, Pemkab Banyumas juga membuka peluang investasi terhadap lahan kosong bekas pedagang kaki lima (PKL), bangunan mangkrak, serta kios-kios di kawasan Kebondalem.

Sebagian kios tersebut saat ini telah digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemkab Banyumas telah menawarkan lahan dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga untuk melakukan investasi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam skema yang ditawarkan, investasi dilakukan melalui kerja sama bagi hasil secara proporsional antara investor dan Pemkab Banyumas, dengan memperhitungkan nilai investasi masing-masing pihak.

Poin-poin Penting dalam Keputusan The Fed Tahan Suku Bunga

Kamis, 29 Oktober 2026 06:00 WIB

Kate Davidson

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126090/poin-poin-penting-dalam-keputusan-the-fed-tahan-suku-bunga>

Bloomberg, Berikut poin-poin utama dari keputusan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (28/10):

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan dengan suara 10-2 untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran target 3,75%-4%.

Deputi Gubernur The Fed Lisa Cook dan Gubernur Federal Reserve Bank of Cleveland Beth Hammack menentang keputusan tersebut. Keduanya memilih kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase.

The Fed menyatakan, "Akumulasi lebih banyak informasi akan membantu Komite menentukan sikap kebijakan yang tepat untuk memastikan kembalinya inflasi secara tepat waktu ke target 2% komite."

The Fed mengubah pernyataannya dengan menyebut aktivitas ekonomi tumbuh pada laju yang "kuat" dan kembali menegaskan, "Meski ketidakpastian masih tinggi, antara lain akibat perkembangan geopolitik, belanja domestik tetap tangguh."

The Fed kembali menyatakan bahwa penambahan lapangan kerja "sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, sementara tingkat pengangguran tidak banyak berubah."

The Fed Tahan Suku Bunga, Fokus Jinakkan Inflasi AS

Kamis, 29 Oktober 2026 05:00 WIB

Maria Eloisa Capurro

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126087/the-fed-tahan-suku-bunga-fokus-jinakkan-inflasi-as>

Bloomberg, Para pejabat bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan dan menegaskan kembali komitmen mereka dalam menjinakkan inflasi, meski tanpa memberikan sinyal yang jelas apakah mereka akan menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Desember.

Kendati demikian, Gubernur The Fed Kevin Warsh, dalam konferensi pers usai pengumuman keputusan tersebut, menegaskan bahwa jajarannya "telah memperjelas kesiapan untuk bertindak sesuai tuntutan keadaan, dan kami telah menunjukkan kemauan kami untuk bertindak."

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan federal funds rate pada kisaran 3,75-4 persen melalui pemungutan suara dengan hasil 10-2. Deputi Gubernur Federal Reserve Lisa Cook dan Gubernur Federal Reserve Cleveland Beth Hammack berbeda pendapat karena memilih kenaikan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase.

Walaupun menepis anggapan bahwa ekonomi AS mulai mengalami kepanasan (overheating), Warsh menyoroti sejumlah faktor yang menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak lebih kuat dari perkiraan, termasuk pengeluaran konsumen yang sehat dan investasi bisnis yang solid.

Karena itu, ia mengungkapkan, diskusi para pejabat dalam pertemuan kebijakan pekan ini sangat terpusat pada isu inflasi.

“Menurunkan inflasi adalah tanggung jawab kami,” kata Warsh. “Itulah alasan pembahasan FOMC selama beberapa hari terakhir terutama berfokus pada aspek stabilitas harga dalam mandat kami.”

Dalam pernyataan setelah pertemuan, para pejabat mengatakan mereka berharap data yang dirilis dalam beberapa pekan mendatang dapat membantu menentukan keputusan berikutnya.

“Penambahan informasi akan membantu komite menentukan arah kebijakan yang tepat untuk memastikan inflasi kembali ke target 2 persen dalam waktu yang tepat,” kata para pembuat kebijakan pada Rabu (28/10). “Komite akan mewujudkan stabilitas harga.”

Kondisi Keuangan

Warsh juga membahas sejumlah indikator yang mengukur kemudahan atau kesulitan perusahaan dan rumah tangga dalam memperoleh pinjaman, yang dikenal sebagai kondisi keuangan. Sebelumnya, dia menyebut kondisi keuangan cukup longgar. Namun, pada Rabu, dia mengatakan kondisi tersebut telah menegang.

“Pelaku pasar mulai lebih selektif dalam mengalokasikan modal. Meski kondisi keuangan secara keseluruhan lebih ketat, saya tidak bersedia dan tidak dapat menyebutnya benar-benar ketat,” ujarnya.

Imbal hasil (yield) Obligasi AS (US Treasury) bertenor pendek turun, sementara bunga untuk tenor yang lebih panjang naik usai konferensi pers Warsh, seiring fokus investor yang tertuju pada komentarnya terkait kondisi keuangan yang kian menegang.

Meski para pedagang (traders) masih bertaruh para pejabat akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember, mereka mulai memangkas taruhan terhadap potensi kenaikan tambahan pada tahun 2027. Pasar berjangka (futures markets) kini tidak lagi sepenuhnya memperkirakan tiga kenaikan lagi dalam siklus ini.

Keputusan menahan suku bunga ini diambil kurang dari sepekan sebelum pemilihan paruh waktu (midterm elections) AS pada bulan November. Di tengah ketidakpuasan luas terhadap ekonomi, Partai Demokrat difavoritkan untuk memenangi suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan sedikit lebih unggul dalam jajak pendapat untuk sejumlah persaingan penting untuk kursi Senat.

Faktanya, tidak ada kekurangan data sejak pertemuan bulan September yang membuktikan kekhawatiran seputar inflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan September melesat ke level tertingginya dalam lima bulan terakhir. Lonjakan tersebut sebagian besar didorong oleh tingginya harga energi akibat perang Iran, meski laporan juga menunjukkan terjadinya inflasi berbasis luas (broad-based inflation) di lintas sektor barang dan jasa.

"Inflasi masih terlalu tinggi," kata Warsh. "Energi dan harga-harga terkait telah kembali bergerak naik dalam beberapa pekan terakhir, dan tugas kami adalah memastikan bahwa perubahan harga relatif di beberapa sektor tidak meluas ke seluruh sektor ekonomi."

Menanti Data Baru

Para pembuat kebijakan akan mendapatkan data baru pada Kamis (29/10), saat Biro Analisis Ekonomi (BEA) merilis angka indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) bulan September, yang merupakan indikator inflasi pilihan utama The Fed.

Pengeluaran konsumen yang kuat serta derasnya aliran investasi ke sektor kecerdasan buatan (AI) juga terus mendorong pertumbuhan. Para ekonom memproyeksikan data yang juga akan dirilis Kamis

bakal menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS berada di laju tahunan yang kokoh pada kisaran 3,2% di kuartal ketiga.

Pernyataan setelah pertemuan menggambarkan aktivitas ekonomi telah berekspansi "dengan laju yang kuat," setelah sebelumnya menyebutnya "solid" pada pertemuan lalu. Para pejabat menyebut belanja domestik "tangguh." Mereka juga mengulangi pernyataan bahwa tingkat pengangguran hanya sedikit berubah dan inflasi masih berada di level tinggi.

Warsh juga membeberkan bahwa bank sentral akan menerapkan penyesuaian jadwal pertemuan secara bertahap, dengan rencana pemungutan suara penetapan suku bunga pada tujuh dari delapan pertemuan tahun depan. Pada tahun 2028, tambahnya, dua dari delapan pertemuan tersebut akan dikhususkan untuk diskusi luas alih-alih untuk menetapkan suku bunga.

Fluktuasi Ekspektasi Suku Bunga

Ekspektasi investor terhadap pertemuan ini berubah drastis selama beberapa pekan terakhir. Sesaat setelah keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga pada September, taruhan untuk kenaikan lagi di bulan ini sempat melonjak ke atas 70%, merujuk pada penetapan harga di pasar berjangka dana federal (federal funds futures).

Ekspektasi tersebut seketika berbalik setelah dua anggota pemungut suara kunci FOMC—Gubernur The Fed New York John Williams dan Wakil Gubernur Philip Jefferson—menyatakan bahwa langkah The Fed pada bulan September telah mengulur waktu bagi bank sentral untuk menilai kondisi ekonomi. Probabilitas kenaikan di mata investor langsung anjlok di bawah 30% dan terus menurun, hingga berada di bawah 10% pada Rabu pagi.

Warsh sempat angkat bicara pada 16 Oktober, ketika ia menyebut "kondisi dunia secara umum sesuai dengan ekspektasi kami" sejak pertemuan The Fed bulan September. Pasar menafsirkan pernyataan itu sebagai keputusan untuk tidak mengubah ekspektasi investor, yang sekaligus menjadi sinyal implisit bahwa para pejabat kemungkinan besar akan menahan suku bunga.

Penolakan Cook atas keputusan ini terjadi di tengah upayanya melawan langkah Presiden AS Donald Trump yang ingin memecatnya. Para pejabat administrasi telah menjadwalkan persidangan di Gedung Putih pada awal November guna menyelidiki tuduhan penipuan KPR yang selama ini terus dibantah oleh Cook.

Di sisi lain, Cook telah menyatakan bahwa ia tidak akan dapat menghadiri persidangan tersebut.

Inflasi Tinggi, The Fed Tetap Pertahankan Suku Bung di Kisaran 3,75%-4%

Kamis, 29 Oktober 2026 04:55 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-tinggi-the-fed-tetap-pertahankan-suku-bung-di-kisaran-375-4>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga tetap stabil di level 3,75%-4%, seperti yang diharapkan. The Fed memilih untuk menunda perubahan apa pun pada biaya pinjaman hingga setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS) yang digelar minggu depan dan menunggu data lebih lanjut tentang laju inflasi.

Keputusan mempertahankan suku bunga tidak mendapat suara bulat. Di mana, Gubernur Fed Lisa Cook, yang saat ini menjadi target Presiden Donald Trump untuk dicopot dari bank sentral, memilih kenaikan suku bunga 25 basis poin. Demikian pula Presiden Fed Cleveland Beth Hammack, seorang tokoh yang secara konsisten berpandangan keras, yang juga memilih kenaikan suku bunga pada bulan Juli dengan alasan yang sama.

Selain mempertahankan suku bunga, The Fed juga mengakui bahwa inflasi "tetap tinggi," meningkatkan penilaiannya terhadap perekonomian, dan mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin akan terjadi tergantung pada kinerja inflasi.

"Pengumpulan informasi lebih lanjut akan membantu Komite menentukan sikap kebijakan yang tepat untuk memastikan kembalinya inflasi tepat waktu ke target 2% Komite," kata Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dalam pernyataan kebijakan terbarunya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (29/10/2026).

"Komite akan memberikan stabilitas harga," lanjutnya.

Pernyataan kebijakan terbaru The Fed merupakan perubahan yang signifikan dari pertemuan 15-16 September, dengan sedikit petunjuk mengenai jenis panduan ke depan yang menurut Ketua Fed Kevin Warsh ingin dihindari.

Penilaian The Fed terhadap perekonomian ditingkatkan menjadi "kuat" dari ekspansi "solid" yang terlihat pada pertemuan September, sementara investasi masih dipandang kuat dan pertumbuhan lapangan kerja sejalan dengan angkatan kerja.

KEKHAWATIRAN BAHWA INFLASI SEMAKIN MELUAS

Hasil pertemuan minggu ini sudah banyak diperkirakan setelah para pejabat tinggi The Fed mengindikasikan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga lagi setelah kenaikan seperempat poin persentase yang disetujui bulan lalu, meskipun data inflasi sementara itu lebih kuat dari perkiraan dan kekhawatiran bahwa tekanan harga semakin meluas di seluruh perekonomian.

Biaya energi tetap tinggi, termasuk untuk bahan bakar diesel, yang merupakan input utama untuk pelayaran, pertanian, dan industri lainnya.

Inflasi dan biaya hidup secara umum telah menjadi isu sentral dalam pemilihan politik yang akan menentukan apakah Partai Republik Trump tetap mengendalikan kedua majelis Kongres pada 3 November, atau apakah Partai Demokrat akan menduduki posisi kepemimpinan dan memperoleh kekuasaan pengawasan yang lebih kuat, termasuk atas The Fed.

Investor memperkirakan, kenaikan suku bunga lebih lanjut akan diperlukan, dimulai pada bulan Desember 2026 dan berlanjut hingga tahun 2027, untuk menurunkan inflasi yang saat ini sekitar satu poin persentase di atas target The Fed dan menunjukkan sedikit kemajuan dalam beberapa bulan terakhir.

Bank sentral AS telah gagal mencapai target inflasinya selama lima setengah tahun, sebuah fakta yang membuat beberapa pejabat khawatir bahwa bisnis dan rumah tangga semakin terbiasa dengan kenaikan harga yang lebih cepat dan mungkin merencanakannya dengan cara yang akan membuat inflasi lebih sulit dikendalikan.

Ekonomi AS Tumbuh 3,4% pada Kuartal III 2026, Belanja Konsumen Jadi Penopang

Kamis, 29 Oktober 2026 22:20 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-as-tumbuh-34-pada-kuartal-iii-2026-belanja-konsumen-jadi-penopang>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III 2026. Ketahanan belanja konsumen dan peningkatan investasi perusahaan yang didorong kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mampu mengimbangi dampak kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Produk domestik bruto (PDB) AS meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3,4% pada periode Juli–September 2026, menurut estimasi awal yang dirilis Biro Analisis Ekonomi di bawah Departemen Perdagangan AS, Kamis (29/10/2026).

Angka tersebut melampaui perkiraan ekonom yang disurvei Reuters, yakni pertumbuhan sebesar 3,2%. Proyeksi para ekonom sebelumnya berada dalam rentang pertumbuhan 1% hingga 4,2%.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini berbanding terbalik dengan penilaian rumah tangga terhadap kondisi perekonomian. Sentimen konsumen mengalami kemerosotan tajam, sementara tingkat persetujuan terhadap Presiden Donald Trump mencapai rekor terendah.

Laporan PDB tersebut dirilis kurang dari sepekan sebelum pemilihan paruh waktu AS pada Selasa (3/11/2026). Pemilu ini akan menentukan partai yang mengendalikan Kongres AS.

Pertumbuhan ekonomi AS juga berada jauh di atas tingkat pertumbuhan yang dianggap tidak memicu inflasi oleh sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed), yakni sekitar 2%.

Pada Rabu (28/10/2026), bank sentral AS mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran 3,75%–4,00%. Namun, The Fed mengakui bahwa tekanan inflasi masih tinggi.

Para ekonom sebelumnya memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga pada Desember mendatang.

Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan kepada wartawan bahwa "aktivitas ekonomi berkembang dengan laju yang kuat." Ia juga mencatat bahwa "meskipun ketidakpastian masih ada, sebagian disebabkan oleh perkembangan geopolitik, belanja domestik tetap tangguh."

Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai pertumbuhan PDB yang kuat belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi perekonomian AS. Hal ini karena belanja terkait AI semakin mendominasi investasi bisnis.

Investor kini semakin mencermati peningkatan biaya proyek AI jangka panjang, terutama karena potensi keuntungan dari investasi tersebut masih belum pasti.

Perusahaan teknologi telah meminjam dana dalam jumlah besar selama setahun terakhir untuk membiayai investasi AI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap belanja peralatan apabila perusahaan mulai mengurangi pengeluaran.

Meski demikian, para ekonom memperkirakan investasi AI masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusinya berpotensi melemah. Pengurangan belanja diperkirakan lebih mungkin terjadi dibandingkan penghentian investasi secara menyeluruh. **Belanja Konsumen AS Masih Kuat**

Belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, tumbuh sebesar 3,8% pada kuartal III 2026. Angka tersebut sama dengan pertumbuhan pada kuartal II 2026. Rendahnya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara historis dan perekrutan tenaga kerja yang moderat membantu menopang konsumsi masyarakat. Namun, kenaikan upah pada sejumlah periode masih tertinggal dibandingkan laju inflasi.

Selain itu, rumah tangga AS mulai mengurangi porsi tabungan dan menggunakan simpanan yang telah dikumpulkan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari.

Harga rata-rata bensin yang masih berada di atas US\$ 4 per galon juga menjadi tantangan bagi konsumen. Kondisi ini berlangsung ketika perang antara AS dan Israel melawan Iran terus berlanjut, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap harga energi.

Presiden Jerman Peringatkan China soal Ketergantungan Ekonomi Negara Lain

Kamis, 29 Oktober 2026 16:27 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/presiden-jerman-peringatkan-china-soal-ketergantungan-ekonomi-negara-lain>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan China agar upaya mencapai kemandirian ekonomi tidak menciptakan ketergantungan sepihak di negara lain. Peringatan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara China dan Uni Eropa (UE).

Dalam pidatonya di Universitas Peking, Beijing, pada Kamis (29/10/2026), Steinmeier menyoroti ketidakseimbangan perdagangan antara China dan Eropa. Ia menilai, upaya China melindungi perekonomiannya dari guncangan eksternal perlu dilakukan tanpa membuat negara lain rentan terhadap kebijakan ekonomi Beijing.

“Dapat dipahami bahwa China ingin melindungi perekonomiannya dari guncangan eksternal dan pengaruh negatif,” ujar Steinmeier dalam teks pidatonya.

Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kemandirian ekonomi China tidak boleh berujung pada ketergantungan negara lain terhadap Negeri Tirai Bambu tersebut.

Steinmeier dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Jumat (30/10/2026). Kunjungan selama lima hari yang dijalaninya hingga Sabtu itu berlangsung ketika hubungan dagang China dan Eropa menghadapi tekanan.

Uni Eropa sebelumnya menyebut pelebaran defisit perdagangan dengan China sebagai kondisi yang tidak berkelanjutan. Pada September 2026, UE juga memperingatkan akan menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk mengatasi ketimpangan perdagangan tersebut.

Jerman bersama Prancis turut mengusulkan pembentukan mekanisme respons cepat baru di tingkat Uni Eropa untuk menghadapi negara-negara yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi kawasan. China diperkirakan menjadi salah satu fokus dari usulan kebijakan tersebut.

Akses Pasar dan Subsidi China Jadi Sorotan

Dalam pidatonya, Steinmeier juga menyoroti ketimpangan akses pasar antara perusahaan Eropa dan China.

Menurut dia, sejumlah perusahaan Eropa menghadapi keterbatasan akses ke pasar China. Sebaliknya, pasar Eropa dibanjiri produk impor dari China yang mendapatkan subsidi pemerintah.

Selain itu, kontrol dan pembatasan ekspor bahan baku yang diterapkan Beijing turut menjadi perhatian Eropa. Kebijakan tersebut dinilai menambah tantangan bagi perusahaan-perusahaan Eropa yang membutuhkan pasokan bahan baku untuk menjalankan kegiatan industrinya.

Steinmeier menegaskan bahwa Eropa bertekad mempertahankan basis industrinya. Karena itu, penyelesaian persoalan perdagangan dengan China menjadi penting untuk menjaga daya saing industri dan kepentingan ekonomi kawasan.

Meski demikian, ia menyatakan keyakinannya bahwa Uni Eropa dan China masih dapat menemukan solusi melalui dialog.

“Kami tidak menginginkan konfrontasi baru antarblok. Hal itu tidak hanya akan berbahaya bagi keamanan internasional, tetapi juga akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi semua pihak,” kata Steinmeier.

Jelang Keputusan Bunga Bank of Japan, Pasar Obligasi Jepang Bergerak Stabil

Kamis, 29 Oktober 2026 13:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/jelang-keputusan-bunga-bank-of-japan-pasar-obligasi-jepang-bergerak-stabil>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Obligasi pemerintah Jepang (JGB) terpantau stabil pada Kamis (29/10/2026), sehari sebelum keputusan kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ). Permintaan yang kuat dalam lelang surat utang tenor 2 tahun memberikan dukungan bagi pasar.

Pasar juga mendapat sentimen positif dari penguatan obligasi pemerintah AS (US Treasury) setelah Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga dan tidak memberikan banyak sinyal mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Desember.

"Pasar tampaknya menilai langkah tersebut tidak terlalu hawkish (cenderung menaikkan suku bunga) dibandingkan ekspektasi," ujar Yuhi Kawano, analis pasar di Mizuho Securities seperti dikutip Reuters.

Kawano bilang, dalam kondisi seperti ini, dapat dipahami mengapa urgensi bagi Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga secara agresif tergolong rendah, yang seharusnya menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi Jepang.

Imbal hasil (yield) JGB tenor 2 tahun—yang menjadi acuan—turun setengah basis poin menjadi 1,895%, berbalik dari kenaikan tipis sebelumnya pasca-hasil lelang. Imbal hasil akan turun ketika harga obligasi naik.

Indikator permintaan yang disebut bid-to-cover ratio (rasio penawaran terhadap jumlah yang diterbitkan) naik menjadi 4,03 pada lelang tenor 2 tahun, dibandingkan 3,89 pada lelang bulan lalu.

Imbal hasil JGB tenor 10 tahun naik 0,5 basis poin menjadi 2,83%, sementara imbal hasil tenor 5 tahun stabil di angka 2,265%.

Imbal hasil tenor 30 tahun naik setengah basis poin menjadi 3,88%; untuk JGB tenor 20 tahun, belum ada transaksi yang tercatat hingga pukul 05.14 GMT.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters terhadap sejumlah ekonom, BOJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada hari Jumat, namun kemungkinan akan menaikkannya sebesar seperempat poin persentase pada bulan Desember.

Destry Tanggapi Proyeksi Hashim Soal Rupiah Bisa Rp22.000/US\$

Kamis, 29 Oktober 2026 20:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126207/destry-tanggapi-proyeksi-hashim-soal-rupiah-bisa-rp22-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang memproyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menembus Rp20.000-Rp22.000/US\$ apabila kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik merosot.

Menanggapi ini, Destry justru menegaskan bahwa tugas BI yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dia menekankan bahwa pergerakan rupiah sejatinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi fundamental ekonomi domestik hingga dinamika pasar global, termasuk persepsi investor.

"Kalau kita lihat dari fundamental ekonomi sebenarnya kita dalam kondisi yang relatif yang oke dibandingkan dengan peer group kita," kata Destry di sela-sela agenda Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Lebih lanjut, menurutnya pergerakan nilai tukar yang terjadi saat ini merupakan bagian dari fluktuasi di pasar valuta asing.

Di samping itu ia menilai pergerakan rupiah juga sangat dipengaruhi oleh sentimen global yang berada di luar kendali otoritas domestik.

Destry mencontohkan respons positif pasar terhadap perkembangan kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Menurutnya, ekspektasi bahwa The Fed tidak menaikkan suku bunga dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan nilai tukar.

Meski demikian, Destry menegaskan BI berkomitmen menjaga stabilitas rupiah untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif

"Fokus di kita itu adalah memang menjaga stabilitas. Jadi stabilitas itu adalah pertama yang harus kita jaga. Supaya bisa terdapat iklim ekonomi yang kondusif untuk, nantinya bisa ekonomi di sektor riilnya bisa tumbuh dan bisa membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Hashim meminta anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin tidak terlibat dalam praktik tersebut dan mendorong penghentian aktivitas peng gorengan saham.

Hashim memperingatkan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang dinilai tidak sehat di pasar modal.

"Saya mohon kepada kawan-kawan dari Kadin, ini masalah sangat-sangat serius, karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah," ujarnya.

Hashim bahkan memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp20.000-Rp21.000/US\$ apabila arus investasi asing keluar dari pasar saham Indonesia. Dia juga menyebut kemungkinan rupiah mencapai Rp22.000/US\$.

Menurut dia, pelemahan rupiah ke level tersebut akan meningkatkan beban pembayaran pinjaman luar negeri dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi perekonomian Indonesia.

“Jangan sampai rupiah jadi Rp21.000, Rp22.000. Ini jadi punya dampak politik yang luar biasa negatif,” katanya.

Hashim Klaim 40% Kegiatan Ekonomi Tak Tercatat, Tembus Rp10.000 T

Kamis, 29 Oktober 2026 18:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126189/hashim-klaim-40-kegiatan-ekonomi-tak-tercatat-tembus-rp10-000-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengklaim sekitar 35%-40% aktivitas ekonomi di Indonesia tidak tercatat, dengan potensi nilai ekonomi mencapai sekitar Rp10.000 triliun.

Klaim tersebut diutarakan Hashim mengacu kepada angka ekonomi yang disampaikan oleh Bank Dunia.

"Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35%-40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Padahal, Hashim bilang aktivitas ekonomi tersebut turut mencakup kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara tunai tanpa disertai bukti bayar atau kuitansi.

Dia mencontohkan seperti jasa tukang cukur dan tukang pijat yang dibayar tanpa kuitansi sehingga transaksi tersebut tidak tercatat dalam administrasi perpajakan. Praktik serupa terjadi dalam jumlah besar di berbagai sektor, termasuk warung makan dan salon kecantikan.

"Itu kurang lebih menurut bank dunia Rp10.000 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, Hashim menilai besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat tersebut menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia berpotensi lebih besar dibandingkan yang selama ini terukur.

Adikandung RI 1 tersebut bahkan menyinggung potensi penerimaan pajak dari transaksi sehari-hari yang menurutnya seharusnya dikenai pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dia menyebut salah satu contoh potensi pajak yang belum dipungut dari transaksi sehari-hari tersebut antara lain terkait tarif PPN sebesar 11%.

Dia bahkan memperkirakan posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia berpeluang berada di peringkat ke-11 atau ke-12, bukan ke-16 seperti yang disebutkan selama ini.

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin ini menilai besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan.

"Seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita harusnya termasuk negara besar G12, tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, perimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut," tegasnya.

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.132/US\$

Kamis, 29 Oktober 2026 15:56 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126174/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp18-132-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan dengan penguatan 0,28%, ke Rp18.132/US\$. Sentimen eksternal yang mereda usai bank sentral Amerika Serikat (AS) menahan suku bunga acuannya memberi ruang penguatan bagi sebagian besar mata uang Asia.

Rupiah sore ini menguat bersama won Korea Selatan, ringgit Malaysia, peso Filipina, dolar Singapura, yuan offshore. Sebaliknya, dolar Taiwan melemah cukup tajam, disusul rupee India yang melemah terbatas bersama baht Thailand, dolar Hong Kong dan yen Jepang.

Penurunan yield di sebagian surat utang tenor pendek, yang jadi tanda adanya aksi beli, menopang laju rupiah sore ini. Yield 1 tahun terpankaskan 5,2 basis poin (bps) ke 6,91%, diikuti tenor 1,4 bps ke 7,01%, dan tenor 5 tahun turun 5,3 bps ke 7,5%. Adapun, tenor 8 dan 9 tahun lebih terbatas, dan turun hanya 0,5 dan 0,9 bps ke 7,64%.

Begitu juga, yield surat utang RI berdenominasi dolar AS tenor 2 tahun turun 3,3 bps jadi 5,09%, dan tenor 10 tahun turun 1,5 bps ke 6,03%. Namun begitu, Credit Default Swap (CDS) tetap bertahan di level 104,2.

Gerak yield di pasar surat utang domestik sejalan dengan pasar obligasi global. Yield US Treasury terpankaskan ke bawah 5%, tepatnya 4,9%. Sejalan dengan itu, yield obligasi Jepang juga ikut turun ke 2,8%, Australia turun 3,9 bps ke 5,16%, Selandia Baru turun 6 bps ke 4,85%, Korea Selatan turun 5,1 bps jadi 4,07%, lalu China 0,8 bps jadi 1,6%.

Sikap The Fed yang menahan suku bunga acuan di level 3,75% - 4% dengan sikap sedikit lebih dovish meredakan tekanan di pasar negara berkembang. Dengan perubahan sikap dewan gubernur The Fed itu, Bloomberg Economics memperkirakan kenaikan suku bunga fed fund rate pada Desember terpecah jadi 50:50, bukan 85% seperti yang sebelumnya diperhitungkan pelaku pasar.

"Kami memperkirakan kondisi kredit akan semakin menegang jelang rapat Desember, sehingga sebagian fungsi pengetatan yang biasanya dilakukan The Fed sudah berlangsung melalui mekanisme pasar," kata Anna Wong, Ekonom Bloomberg Economics dalam catatannya.

Dengan asumsi itu, ia memperkirakan The Fed akan menahan suku bunga acuan hingga akhir 2026.

Ekonom: Arus Modal Tak Kembali ke RI Meski The Fed Tahan Bunga

Kamis, 29 Oktober 2026 11:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126125/ekonom-arus-modal-tak-kembali-ke-ri-meski-the-fed-tahan-bunga/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan federal funds rate pada kisaran 3,75-4% melalui pemungutan suara dengan hasil 10-2.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, meski FFR tak bergerak, tapi keputusan Federal Reserve hanya memberi jeda tekanan, dan bukan membuka ruang pelonggaran kebijakan bagi Indonesia.

Menurutnya, The Fed tetap melihat ekonomi AS tumbuh kuat dan konsumsi bertahan, sementara perbedaan suara dalam rapat justru mengarah pada kenaikan suku bunga.

Pasar juga masih memperkirakan kebijakan dapat kembali diperketat pada Desember. Kondisi ini membuat imbal hasil US Treasury tetap tinggi dan likuiditas global belum beralih ke aset berisiko.

“Arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia mungkin melambat, tetapi belum akan berbalik menjadi arus masuk. Penyebabnya bukan hanya kebijakan suku bunga AS. Di pasar saham, tekanan juga dipicu oleh konsultasi MSCI, kemudian meluas ke SBN dan SRBI,” sebut Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, dana yang keluar akibat persoalan klasifikasi indeks tidak akan kembali hanya karena The Fed menahan suku bunga.

Imbal hasil SBN sebenarnya sudah cukup menarik, tetapi pelemahan rupiah mengurangi keuntungan investor asing.

“Selama risiko penurunan nilai tukar dinilai lebih besar daripada tambahan imbal hasil yang diperoleh, selisih yield belum cukup untuk menahan arus keluar,” kata Yusuf.

Sisi positifnya, menurut Yusuf, dengan tidak adanya kenaikan suku bunga memberi BI sedikit ruang untuk menjaga stabilitas pasar melalui intervensi di NDF, DNDF, dan pasar spot. Namun ruang kebijakannya tetap sempit.

“Dengan arah The Fed yang masih cenderung ketat, BI perlu mempertahankan suku bunga untuk menjaga rupiah dan belum memiliki ruang yang memadai untuk melonggarkan kebijakan demi mendorong pertumbuhan,” katanya.

Dalam jangka pendek, arah pasar juga masih sangat bergantung pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS.

Sebelumnya, Para pejabat bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan dan menegaskan kembali komitmen mereka dalam menjinakkan inflasi, meski tanpa memberikan sinyal yang jelas apakah mereka akan menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Desember.

Kendati demikian, Gubernur The Fed Kevin Warsh, dalam konferensi pers usai pengumuman keputusan tersebut, menegaskan bahwa jajarannya "telah memperjelas kesiapan untuk bertindak sesuai tuntutan keadaan, dan kami telah menunjukkan kemauan kami untuk bertindak."

Dolar AS Landai, Rupiah dan Mata Uang Asia Bangkit

Kamis, 29 Oktober 2026 09:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126115/dolar-as-landai-rupiah-dan-mata-uang-asia-bangkit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah buka perdagangan Kamis (29/10/2026) dengan penguatan 0,21%% ke Rp18.145/US\$, menyusul dolar dan yield obligasi Amerika Serikat (AS) yang terpankas.

Melansir data realtime Bloomberg 09.10 WIB, indeks dolar AS konsolidasi ke kisaran 102,18 setelah The Fed menahan suku bunga acuannya, sesuai perkiraan pasar. Sedangkan, yield obligasi pemerintah AS, US Treasury ikut turun 1 basis poin (bps) ke 4,98%.

Langkah The Fed yang menahan suku bunga acuan tanpa dibarengi sinyal kebijakan yang akan membuat pelaku pasar berspekulasi bahwa The Fed tetap akan mengerek suku bunga acuan pada Desember nanti.

Meski begitu, sinyal moneter AS yang belum terang itu menyisakan ruang bagi penguatan mata uang Asia. Won Korea Selatan berbalik arah dari perdagangan kemarin jadi menguat 0,71%, diikuti peso Filipina, rupiah, ringgit malaysia, baht Thailand, dolar Singapura, yen Jepang, yuan offshore dan dolar Hong Kong. Sedangkan, dolar Taiwan melemah.

Sementara, harga minyak juga sedikit terpankas setelah pelaku pasar menangkap sinyal adanya upaya diplomatik baru di Timur Tengah untuk mencegah terjadinya serangan militer AS terhadap Iran. Brent turun 0,89% ke US\$114,29/barel dan West Texas Intermediate (WTI) terpankas 0,79% jadi US\$101,97/barel.

Sentimen yang datang dari upaya diplomatik itu yang menjadi katalis dan membuat mata uang kawasan berhasil rebound. Dolar AS diperkirakan melemah terhadap mata uang Asia dengan sinyal yang belum terang dari The Fed saat ini.

Adanya perbaikan sentimen terhadap aset berisiko di tengah koreksi dolar AS dan imbal hasil US Treasury turut menopang gerak rupiah.

Yield US Treasury terpankas 1,6 basis poin (bps) jadi 4,98%. Diikuti penurunan yield obligasi pemerintah Inggris 2,5 bps jadi 5,32%, menyusul obligasi Australia pangkas yield turun 1,9 bps jadi 5,188%, Selandia baru turun 0,6 bps jadi 4,91%, sementara China stabil di 1,61%.

Namun, sebagian negara Asia masih mencatat kenaikan yield, seperti Jepang naik 2,1 bps jadi 2,83%, disusul obligasi RI berdenominasi dolar AS (INDON) naik 0,9 bps jadi 6,04%.

Meski begitu, peluang ini masih tetap dibayangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Desember. Sebab, sikap bank sentral AS yang menahan suku bunga saat ini tidak otomatis menandakan siklus pengetatan telah berakhir.

Jika ternyata data inflasi AS, Personal Consumption Expenditure (PCE) AS yang akan rilis besok dini hari, ternyata lebih tinggi, ekspektasi kenaikan suku bunga bisa kembali menguat dan membatasi ruang penguatan mata uang Asia.

Mayoritas Pangan Hari Ini Turun Lagi, Beras Mulai Landai

Kamis, 29 Oktober 2026 11:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126127/mayoritas-pangan-hari-ini-turun-lagi-beras-mulai-landai/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan nasional pada hari ini, Kamis (29/10/2026) mengalami penurunan mulai dari cabai-cabaian, bawang, daging, hingga seluruh jenis beras.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 10.30 WIB, harga beras kualitas bawah II turun 2,37% atau Rp350 menjadi Rp14.400/kg. Beras kualitas medium I juga turun 1,8% atau Rp300 menjadi Rp16.350/kg.

Kemudian, harga beras kualitas medium II turun 1,22% atau Rp200 menjadi Rp16.250/kg. Begitu juga beras kualitas super I turun 3,06% atau Rp550 menjadi Rp17.450/kg, serta beras kualitas super II turun 3,16% atau Rp550 menjadi Rp16.850/kg.

Hanya beras kualitas bawah I naik 1,01% atau Rp150 menjadi Rp15.050/kg.

Lalu, harga cabai merah besar turun 17,4% atau sekitar Rp13.100 menjadi Rp62.200/kg dan cabai merah keriting turun 10,83% atau sekitar Rp9.300 menjadi Rp77.000/kg.

Cabai rawit hijau jga turun 14,8% atau sekitar Rp11.800 menjadi Rp67.950/kg, diikuti cabai rawit merah turun 12,35% atau sekitar Rp12.700 menjadi Rp90.450/kg.

Harga daging ayam ras segar turun 3,73% atau Rp1.500 menjadi Rp38.700/kg. Harga telurnya juga turun 4,9% atau Rp1.450 menjadi Rp28.150/kg.

Daging sapi kualitas 1 turun 2,39% atau Rp3.650 menjadi Rp149.100/kg, serta daging sapi kualitas 2 turun 1,15% atau Rp1.650 menjadi Rp142.050/kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah naik 1,72% atau Rp350 menjadi Rp20.700/kg. Begitu juga minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 1,23% atau Rp300 menjadi Rp24.650/kg, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 2,33% atau Rp550 menjadi Rp24.150/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 0,94% atau Rp350 menjadi Rp36.800/kg. Sementara bawang putih ukuran sedang naik 0,52% atau Rp200 menjadi Rp38.700/kg.

Terakhir, harga gula pasir kualitas premium tidak berubah atau bertahan di Rp20.550/kg. Tetapi, gula pasir lokal naik 1,29% atau Rp250 menjadi Rp19.600/kg.

Rupiah Tertekan, Gubernur BI Minta Ekspor Digenjot dan Tarik Arus Modal Asing

Kamis, 29 Oktober 2026 18:30 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-tertekan-gubernur-bi-minta-ekspor-digenjot-dan-tarik-arus-modal-asing>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI mendorong peningkatan ekspor dan arus masuk modal asing ke pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, hingga saat ini rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 7,9%. Untuk diketahui, nilai tukar berada di level Rp 18.137 per dolar Amerika Serikat (AS), pada Kamis (29/10/2026).

Destry menyebut volatilitas rupiah relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang negara lain. BI, kata dia, terus berupaya meredam gejolak nilai tukar agar pergerakannya tetap terkendali.

"Kita berada di depresiasi sekitar 7,9% posisi hari ini. Tapi kalau bicara volatilitas, rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang lain," ujar Destry dalam Rapimnas Kadin 2026, Kamis (29/10/2026).

Menurut Destry, tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari kondisi eksternal, terutama ketidakpastian global yang mendorong investor beralih ke aset yang dianggap lebih aman atau safe haven, termasuk dolar Amerika Serikat (AS).

Kondisi tersebut turut menekan arus modal portofolio ke Indonesia. Destry mengatakan, investasi portofolio mengalami penurunan sepanjang 2025 hingga 2026 seiring meningkatnya ketidakpastian global.

"Ketahanan sektor eksternalnya sangat penting untuk rupiah," katanya.

Destry mengatakan, peningkatan ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Ia menyoroti kinerja ekspor nonmigas yang masih menghadapi tantangan, meskipun harga sejumlah komoditas seperti batubara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan nikel mengalami kenaikan.

Menurut dia, kenaikan nilai ekspor tidak selalu mencerminkan peningkatan volume ekspor karena masih dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Namun, Destry menyebut nilai ekspor mulai menunjukkan perbaikan pada Oktober 2026.

Ia juga menyampaikan harapan agar ekspor kembali meningkat pada November dan Desember mendatang.

"Jadi ketahanan sektor eksternalnya sangat penting untuk rupiah," ujar Destry.

Modal Asing

Selain mendorong ekspor, BI juga berupaya menarik arus modal asing melalui kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik. Salah satunya melalui pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging bagi investor asing.

Destry menjelaskan, investor asing cenderung melakukan lindung nilai ketika berinvestasi di Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global. Karena itu, BI memberikan insentif untuk menekan biaya lindung nilai melalui instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF).

Melalui kebijakan tersebut, BI berharap investasi portofolio dapat kembali meningkat dan membantu memperkuat pasokan dolar AS di pasar domestik.

Di sisi lain, Destry menegaskan bahwa penguatan rupiah tidak cukup hanya mengandalkan intervensi di pasar keuangan. Perbaikan struktural di sektor eksternal, terutama peningkatan ekspor dan masuknya modal portofolio, juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valas.

"Kita berusaha men-smoothing. Karena Bank Indonesia tugasnya adalah menjaga stabilitas. Bahwa kemudian ada pelemahan, tentu itu menjadi PR tersendiri. Tapi stabilitasnya itu terjaga. Jadi ini yang tentu memang PR yang memang harus bersama-sama secara struktural diatasi," kata Destry.

BI Sebut Aliran Modal Asing Masuk US\$ 12 Miliar Berkat Insentif Lindung Nilai

Kamis, 29 Oktober 2026 17:17 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-sebut-aliran-modal-asing-masuk-us-12-miliar-berkat-insentif-lindung-nilai>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah menghimpun aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri sekitar US\$ 12 miliar melalui kebijakan insentif transaksi lindung nilai atau hedging menggunakan instrumen swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya BI untuk memperkuat pasokan valuta asing (valas) di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, dana yang dihimpun tersebut terdiri dari hampir US\$ 10 miliar melalui transaksi swap dan sekitar US\$ 2 miliar melalui DNDF.

"Alhamdulillah kita sudah bisa mengumpulkan hampir US\$ 12 miliar. Yaitu sekitar US\$ 2 miliar dalam bentuk DNDF, hampir US\$ 10 miliar dalam bentuk swap," ujar Destry dalam Rapatnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2026, Kamis (29/10/2026).

Destry menjelaskan, BI mulai menerapkan kebijakan insentif tersebut pada Juni 2026, yang kemudian efektif berjalan pada Juli 2026.

Setelah mengevaluasi pelaksanaannya pada Juli, Agustus, dan September 2026, BI kembali meningkatkan insentif pada Oktober 2026.

Melalui kebijakan tersebut, BI memberikan insentif untuk menekan biaya lindung nilai bagi investor yang melakukan transaksi di pasar valas domestik.

Untuk transaksi swap, BI memberikan diskon biaya lindung nilai hingga 30%. Sementara itu, untuk transaksi DNDF, BI meningkatkan insentif hingga 45% terhadap komponen biaya yang dijelaskan dalam skema tersebut.

Destry menerangkan, transaksi swap memungkinkan investor membawa dolar AS untuk ditukarkan menjadi rupiah yang kemudian dapat digunakan untuk investasi.

Sementara melalui DNDF, investor melakukan transaksi jual dolar AS dan melindungi posisi tersebut dengan kontrak pembelian dolar pada masa mendatang.

Menurut Destry, insentif tersebut dapat membuat investasi di pasar keuangan domestik lebih menarik bagi investor asing.

Pasalnya, investor yang masuk ke pasar Indonesia di tengah ketidakpastian global cenderung melakukan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar.

"Kalau kita mau mendatangkan inflow, kita harus membuat portofolio kita menarik. Kalau yield-nya tidak bisa kita naikan lebih tinggi, ya kita bermain saja di hedging cost-nya," jelasnya.

Ia menambahkan, strategi tersebut menjadi alternatif bagi BI untuk menarik aliran modal asing tanpa harus selalu mengandalkan kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kenaikan suku bunga akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian, sehingga BI perlu mempertimbangkan instrumen kebijakan yang lebih terarah.

Di tengah tekanan eksternal, BI juga terus berupaya menjaga stabilitas rupiah melalui kombinasi kebijakan moneter dan penguatan sektor eksternal.

Destry menilai, peningkatan ekspor dan dorongan terhadap investasi portofolio menjadi bagian penting untuk memperkuat ketahanan nilai tukar Indonesia.

Dengan demikian, insentif swap dan DNDF diharapkan dapat membantu memperkuat ketersediaan valas di pasar domestik sekaligus menjaga daya tarik investasi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Ekonomi 2027 Masih Dibayangi Ketidakpastian Global

Kamis, 29 Oktober 2026 16:02 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-2027-masih-dibayangi-ketidakpastian-global>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek ekonomi Indonesia pada 2027 masih dibayangi ketidakpastian global. Mulai dari arah suku bunga, gejolak nilai tukar, hingga ketegangan geopolitik berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,40% pada 2027, meningkat dari perkiraan pertumbuhan 3,10% pada 2026. Meski begitu, pemulihan ekonomi antarnegara diperkirakan belum merata.

Hal tersebut mengemuka dalam Hana Bank Economic Outlook 2027 yang digelar PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) dengan tema Beyond Uncertainty: Winning in the New Global Economic Era.

Direktur Utama Hana Bank Yung Ryul Ko mengatakan, arah kebijakan suku bunga negara-negara ekonomi utama, volatilitas rupiah, dinamika pasar saham, serta risiko geopolitik masih akan memengaruhi perekonomian global dan domestik.

Menurutnya, pelaku usaha dan investor perlu mencermati berbagai risiko tersebut dalam menyusun strategi bisnis maupun mengelola aset pada tahun depan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, dinamika politik domestik dan global akan turut menentukan arah perekonomian Indonesia pada 2027.

Dari dalam negeri, tekanan biaya hidup, inflasi, dan pergerakan rupiah berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat serta kepercayaan konsumen.

"Indonesia masih harus menghadapi tantangan global mulai dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat hingga gangguan di Timur Tengah," ujar Yunarto dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2026).

Ia menambahkan, perlambatan ekonomi global juga dipengaruhi harga energi dan komoditas, perang dagang, kenaikan utang pemerintah, hingga gangguan di Selat Hormuz. Di tengah tekanan tersebut, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.

Di sisi lain, Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro menuturkan, Indonesia masih memiliki peluang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di kawasan ASEAN.

Berdasarkan proyeksi IMF yang dipaparkan Bambang, ekonomi Indonesia dan Filipina diperkirakan tumbuh 5,10% pada 2027. Angka tersebut menempatkan keduanya di posisi kedua tertinggi di ASEAN, setelah Vietnam.

Namun, Bambang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mampu menarik investasi apabila tidak didukung iklim usaha yang memadai.

"Proyeksi PDB yang tinggi belum menjamin imbal hasil," ujar Bambang.

Menurutnya, investor juga mempertimbangkan besarnya permintaan pasar, ketersediaan pemasok, keandalan listrik dan logistik, kepastian perizinan, serta kualitas tenaga kerja sebelum menanamkan modal.

Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat daya saing dan memperbaiki iklim investasi agar peluang pertumbuhan ekonomi pada 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kredit UMKM Mulai Meningkat, Target Pertumbuhan 7%–9% Masih Menantang

Kamis, 29 Oktober 2026 06:36 WIB

Reporter: Aura Putri, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-umkm-mulai-meningkat-target-pertumbuhan-79-masih-menantang>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kredit sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mulai meningkat meski pertumbuhannya masih di bawah target 7%–9% hingga akhir tahun ini.

Mengutip Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI), kredit UMKM per September 2026 tumbuh 2,7% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp 1.539,2 triliun. Realisasi itu lebih tinggi dibanding kredit UMKM pada Agustus 2026 yang sebesar 2,3% YoY.

Guna mendorong pertumbuhan kredit UMKM pada tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan plafon kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun pada 2027.

Dengan penambahan tersebut total plafon kredit UMKM meningkat dari Rp 1.500 triliun menjadi sekitar Rp 1.900 triliun hingga Rp 2.000 triliun di tahun depan.

Memang, pada kuartal III-2026, perbankan masih terus membukukan pertumbuhan cukup tinggi pada kredit UMKM.

Lihat saja, PT Bank Mandiri Tbk mencatat kredit ekosistem turunan yang mencakup segmen SME, mikro, dan konsumen mencapai Rp 174 triliun atau tumbuh 9% YoY.

Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan, pada usaha mikro, kredit non-subsidi Bank Mandiri mencapai Rp 31,2 triliun atau tumbuh 12,9% YoY.

"Pembiayaan ini telah menjangkau 37 provinsi, memperluas dukungan bagi usaha produktif dan kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Timothy dalam paparan kinerja kuartal III-2026, Jumat (23/10/2026).

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatat kredit UKM mencapai Rp 149,2 triliun atau naik 15,4% YoY pada kuartal III-2026.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembang mengatakan, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke beragam sektor untuk mendukung perekonomian nasional, dengan senantiasa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kondisi likuiditas perseroan.

"Penyaluran pembiayaan juga salah satunya ditopang BCA Expo 2026 dan BCA UMKM Fest 2026 yang melibatkan lebih dari 1.600 pelaku usaha," ujar Hendra dalam laporan kinerja kuartal III, Selasa (27/10/2026).

Di sisi lain, PT Bank Permata Tbk juga mencatat pertumbuhan kredit UKM sebesar 16,6% hingga kuartal III 2026. Di mana, penyaluran kredit UKM mencapai Rp 6,9 triliun di akhir September 2026.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli mengatakan, bank berkomitmen untuk terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembiayaan inklusif dan berdampak sosial.

"Pembiayaan tersebut disalurkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan investasi nasabah," ujar Meliza dalam keterangan resmi, Rabu (28/10/2026).

Panen Raya Jagung di Brebes, Wabup Wurja Dorong Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan

Kamis, 29 Oktober 2026 11:10 WIB

Penulis: Wahyu Nur Kholik, Editor: Muslimah

<https://jateng.tribunnews.com/brebes-beres/1270998/panen-raya-jagung-di-brebes-wabup-wurja-dorong-peningkatan-produktivitas-dan-pendapatan>

TRIBUNJATENG.COM, BREBES – Panen raya jagung di Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menjadi momentum untuk mendorong pengembangan potensi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pada Rabu (28/10/2026).

Wakil Bupati Brebes, Wurja, S.E., hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pedesaan.

Dalam sambutannya, Wurja menyampaikan bahwa pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, potensi jagung perlu dikembangkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, serta kerja sama antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, harga jagung yang sedang tinggi menjadi peluang bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan usaha tani yang efisien agar hasil penjualan memberikan manfaat optimal bagi keluarga petani.

“Ketika harga jagung berada pada posisi yang baik, tentu ini menjadi kesempatan bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih menguntungkan. Harapannya, peningkatan pendapatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh para petani dan keluarganya,” ujarnya.

Wurja berharap petani juga terus menjaga kualitas hasil panen, memperhatikan biaya produksi, dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan demikian, pengembangan jagung tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Kepala Desa Wlahar, Waryono, menyampaikan bahwa pertanian jagung memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Ia berharap kegiatan Expo Jagung Pendekar Sakti dapat memperkenalkan potensi pertanian Wlahar sekaligus menambah motivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian.

“Kami berharap para petani jagung di Desa Wlahar semakin sejahtera dan hasil pertanian mereka memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga. Dengan dukungan semua pihak dan semangat gotong royong masyarakat, kami ingin Desa Wlahar terus berkembang menjadi desa yang maju dan mandiri,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Songgom, sebagai bagian dari upaya menghadirkan unsur seni dan budaya dalam kegiatan masyarakat.

Melalui panen raya dan Expo Jagung Pendekar Sakti, potensi pertanian Desa Wlahar diharapkan semakin dikenal dan mampu membuka peluang pengembangan usaha tani. Peningkatan produktivitas yang diiringi pengelolaan biaya dan pemasaran yang baik diharapkan dapat memperkuat pendapatan petani serta mendukung perekonomian desa. (Pet)

Realisasi APBD Kabupaten Tegal Baru 61 Persen, Bupati Minta Percepatan

Kamis, 29 Oktober 2026 17:56 WIB

<https://www.rmoljawatengah.id/realisasi-apbd-kabupaten-tegal-baru-61-persen-bupati-minta-percepatan>

Realisasi keuangan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 baru mencapai sekitar 61 persen atau Rp1,8 triliun per 30 September 2026. Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target akhir tahun tercapai tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.

Capaian tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bupati Tegal.

Dalam evaluasi itu, realisasi fisik APBD tercatat sekitar 68 persen. Sementara realisasi keuangan masih di bawah target Rencana Kerja Operasional (RKO) yang seharusnya mencapai sekitar 75 persen pada akhir Triwulan III.

Perbedaan capaian fisik dan keuangan juga menjadi perhatian karena menunjukkan adanya pekerjaan yang sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam pembayaran atau laporan keuangan.

Ischak meminta kepala perangkat daerah segera mengevaluasi kegiatan yang belum mencapai target, terutama proyek strategis dan kegiatan dengan anggaran besar. Pemantauan jadwal pelaksanaan, perkembangan fisik, administrasi, hingga proses pembayaran perlu diperkuat agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Hambatan administratif, teknis, maupun pengadaan juga diminta segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan langkah penyelesaian yang konkret.

“Percepatan tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan. Kita harus mengejar target, tetapi kualitas tetap menjadi prioritas,” tegas Ischak.

Menurutnya, percepatan realisasi anggaran harus diikuti tanggung jawab penuh kepala perangkat daerah, koordinasi yang kuat oleh Sekretaris Daerah, serta pengawasan terhadap kualitas hasil pembangunan.

Ia menegaskan, penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Setiap pekerjaan harus sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ischak juga mengingatkan aparaturnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, serta pelaksanaan proyek. Seluruh tahapan harus berjalan transparan, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme maupun pungutan liar.

Selain itu, data capaian kinerja harus disampaikan secara jujur, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Arief Ardian, menjelaskan evaluasi POK Triwulan III menggunakan data dengan batas waktu 30 September 2026. Data tersebut dihimpun dari laporan program dan kegiatan perangkat daerah, termasuk kegiatan strategis daerah, kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Arief, data realisasi fisik dan keuangan digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari target, hambatan pelaksanaan, serta kegiatan yang membutuhkan tindak lanjut. Proyeksi penyerapan hingga akhir tahun juga dianalisis berdasarkan APBD Perubahan 2026 untuk menentukan langkah percepatan.

“Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang realistis, memperkuat pengendalian internal, serta melaksanakan pemantauan secara berkala,” ujar Arief.

Ia berharap hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu penyelesaian. Koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat, terutama untuk kegiatan strategis yang membutuhkan penanganan bersama.

Pemkab Tegal mendorong seluruh perangkat daerah memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran secara optimal agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(shofia)

Sekda Jateng Ingatkan Pentingnya Integritas dalam Penyusunan APBD 2027

Kamis, 29 Oktober 2026 15:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11852

KAB SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan pentingnya integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

Setiap keputusan dalam pengelolaan anggaran harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Wahid Bandungan Hotel dan Resort, Kabupaten Semarang pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Ia menyampaikan, penyusunan APBD perlu dilakukan dengan mencermati berbagai perkembangan kebijakan, termasuk masukan terkait penganggaran hibah dan insentif digital.

Oleh karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para sekda kabupaten/kota untuk berdiskusi langsung dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan yang berlaku.

Sekda mengatakan, dinamika kebijakan dan berbagai peristiwa yang terjadi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar semakin cermat dalam mengambil keputusan. Setiap pilihan dalam pengelolaan anggaran memiliki konsekuensi, sehingga perlu didahului asesmen/penilaian yang memadai, dengan mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, dan integritas.

Ia mengingatkan bahwa persoalan integritas tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat keputusan dibuat, tetapi juga berhubungan dengan jejak data dan dokumen yang dapat ditelusuri kembali di kemudian hari.

Maka dari itu, para pejabat pengelola keuangan daerah diminta tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu keputusan dapat dilaksanakan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang menjadi patokan utama adalah kita memiliki amanah. Ini bukan hak, melainkan amanah yang harus kita tunaikan,” ucap Sekda.

Ia menekankan, sekretaris daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya pemerintah, termasuk anggaran yang bersumber dari uang publik. Hal tersebut menuntut kehati-hatian dalam menentukan prioritas, mengalokasikan belanja, serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.

Maka dari itu, Sekda Jateng mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng menjadikan integritas sebagai pedoman utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga pelaksanaan APBD tetap berada pada jalur yang benar sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum dan administrasi.

Ia menilai, penataan regulasi yang baik dapat membantu pemerintah daerah menjalankan proses penganggaran dengan lebih tertib, transparan, dan sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Ketua Forsesdasi Komisariat Wilayah Jawa Tengah, Anang Armunanto, mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi ruang bagi para sekretaris daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai ketentuan penganggaran, khususnya terkait penyusunan APBD 2027.

Menurutnya, sejumlah isu masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, antara lain mekanisme hibah, insentif, serta penganggaran yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi di masing-masing daerah dan memperoleh penjelasan dari narasumber yang berkompeten.

Anang menjelaskan, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar pemahaman mengenai regulasi dan pelaksanaan penganggaran dapat selaras di antara perangkat daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Forsesdasi Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menyiapkan APBD 2027 yang lebih terencana, taat regulasi, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah.